

**PELAKSANAAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA SERANG
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
DI KOTA SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Oleh:
BAYINAH
NIM.6661091174

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2014**

ABSTRAK

Bayinah. NIM: 6661091174. SKRIPSI. Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Rahmawati, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Deden M. Haris, S.Sos., M.Si.

Kata kunci : Peran, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

Permasalahan penelitian adalah verifikasi data jumlah UMKM yang belum ada; Kemitraan, pendampingan, pemasaran, pendidikan dan pelatihan yang kurang optimal. Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Pengusaha Industri UMKM Unggulan di kota Serang. Teori dalam penelitian ini adalah teori Peran Biddle dan Thomas. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Dalam menganalisis data digunakan uji hipotesis *t-test* satu sampel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Disperindagkop di Kota Serang masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 44,12% dari angka minimal 65%. Saran peneliti melakukan pembinaan dan pendampingan yang merata dan berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan sosialisasi dan pelatihan, dan kerjasama.

ABSTRACT

Bayinah. NIM: 6661091174. Thesis. The Implementation of The Role Department of Industry Trade and Cooperative in Serang City in The Local Economy Development (PEL) in Serang City. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Studies. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I: Rahmawati,, S. Sos., M.Si. Supervisor II: Deden M. Harris, S.Sos., M.Si.

Keywords: Local Economic Development (PEL), Role of the Department.

This Research problems is the amount of data verification small and medium macro entrepreneurs (UMKM) who has not yet been. The Partnership, training, mentoring and empowerment is not efficient. The focus of this research is the role of sector micro and medium enterprises in the local economic development (especially local food industry) in Serang City. The aim's of this research is to find out the role of Department of Industry, Trade and Cooperative in Serang City. The method of this research is descriptive quantitative. The subject of this research is entrepreneur of industry excellent UMKM in Serang City. The theory of this research is Biddle and Thomas role's theory. In collecting, the data is by using distributing questionnaires, observation, documentation and interview. In analyzing, the data used hypothesis testing one-sample t-test. This research shows that, the role of Department of Industry, Trade and Cooperatives in Serang City is still low because the results of calculation obtained 44.12% of the minimum 65%. Researcher's suggestions that relevant department need to provide training and equitable mentoring and sustainable, need to conduct monitoring and evaluating, and need to organize socialization and training, and collaboration.

***Berapa banyak tempat tinggal di bumi yang
ditempati. Dan selamanya kerinduan hanya
pada tempat tinggal yang semula.... Syurga ***

(Ibnu Qayyim Al-jauziyyah)

**Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibu, Abah
dan Keluarga tercinta yang menjadi
motivator terbesar dalam penyusunan skripsi ini**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BAYINAH
NIM : 6661091174
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 08 April 1992
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2014



BAYINAH

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : BAYINAH
NIM : 6661091174
Judul : PELAKSANAAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA SERANG
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA
SERANG

Serang, 17 September 2014

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Rahmawati, S.Sos., M.Si.
NIP : 197905252005012001

Pembimbing II,

Deden M. Haris, S.Sos., M.Si.
NIP : 197204072008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sijari, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : BAYNAH
NIM : 6661091174
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERAN DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA SERANG
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DI
KOTA SERANG

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 10 bulan
oktober tahun 2014 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 10 Oktober 2014

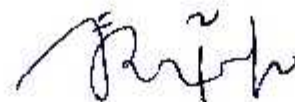
Ketua Penguji:

(Listyaningsih, S.Sos., M.Si.)
NIP. 197501312005012004



Anggota:

(Arenawati, S.Sos., M.Si.)
NIP. 197004102006042001



Anggota:

(Rahmawati, S.Sos., M.Si.)
NIP. 197905252005012001



Mengetahui,

Dekan Fisip
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP.197407052006042011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas nikmat sehat jasmani dan rohani, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih yang terdalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua (Ibu dan Alm. Abah) yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dan do'anya yang memberikan semangat lebih dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang”. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Untuk itu, peneliti sampaikan rasa terimakasih kepada kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

4. Ibu Mia Dwianna W., M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Ibu Rahmawati, S. Sos., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Ibu Hj. Ima Maesaroh.,S.Ag., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan saran selama perkuliahan;
9. Ibu Rahmawati., S.Sos., M.Si.,Dosen Pembimbing I skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang tiada terkira selama proses penyusunan skripsi;
10. Bapak Deden M. Haris, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang tiada terkira selama proses penyusunan skripsi;
11. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., dan Ibu Arenawati,S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Penguji Skripsi. Terimakasih yang tiada terkira atas masukan demi perbaikan penyusunan skripsi ini.
12. Semua dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih atas ilmu pengetahuan selama perkuliahan;

13. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan semua Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang. Terimakasih atas kesediaannya membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyusunan skripsi;
14. Sahabat-sahabatku yang tercinta dan seperjuangan, Ayu Wahyuni, Nita Sabila A, Mariah, Afifatunnisa, Mukaromatunnisa, Najiah, Mariska Ratna Sundari, Khusnul Khotimah M, Leli Rohmawati, Teh Halimah, Teh Yuni, Nurul, Ina hayatunisma, Ade Rohimah, Mulyati, Yeni Handayani, Ikram Wahdi P dan Qori Dzikrullah. Terimakasih atas persahabatan, bantuan, dan motivasi yang begitu besar kepada peneliti selama proses perkuliahan, khususnya selama proses penelitian.
15. Sahabat - sahabat lingkaran: Teh Nisa, Mila, Fenti, Putri, Maliyah, Alya, dan Pipit yang telah menjadi bagian cerita dalam kehidupan peneliti.
16. Adik - adik lingkaran yang supel: Sri, Ovi, Leyla, Nudia, aini terimakasih buat hiburannya.
17. Kawan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2009, khususnya kelas C Reguler, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, perjuangan, dan kenangan selama tiga setengah tahun perkuliahan;
18. Kawan seperjuangan Ilmu Administrasi Negara kelas B, khususnya Weni, Fhera, Yulinda, Siti Rohma Nurjannah, dan teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas pertemanan selama perkuliahan.

19. Para Mas dan Mba warnet maupun rental komputer yang ada di wilayah Brimob dan kampus, terimakasih sebanyak – banyaknya telah menyediakan jasanya yang terjangkau bagi penyusun.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Tidak lupa juga peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan Skripsi ini. Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh.

Serang, 30 September 2014

Bayinah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Perumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Peran.....	17
2.1.2 Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Variabel Penelitian.....	37
3.4.1 Definisi Konsep.....	37
3.4.1 Definisi Operasional.....	37
3.5 Instrumen Penelitian.....	39
3.5.1 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5.3 Uji Validitas.....	46
3.5.4 Uji Reliabilitas.....	47
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian.....	48
3.6.1 Populasi.....	48
3.6.2 Sampel.....	49
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
3.7.1 Uji T-test.....	51
3.7.2 Uji Pihak Kanan.....	52
3.8 Jadwal Penelitian.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum DISPERINDAGKOP Kota Serang.....	56

4.1.1.1 Keadaan Geografis Kota Serang.....	56
4.1.1.2 Visi Dan Misi DISPERINDAGKOP.....	57
4.1.1.3 Struktur Organisasi.....	58
4.1.1.4 Tupoksi DSPERINDAGKOP Kota Serang.....	59
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik.....	64
4.2.1 Uji Validitas Instrumen.....	64
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	65
4.3 Deskripsi Data.....	67
4.3.1 Identitas Responden	67
4.4 Analisis Data	72
4.4.1 Variabel Peran.....	73
4.4.1.1 Orang – Orang Yang Mengambil Bagian Dalam Interaksi Sosial.....	73
4.4.1.2 Perilaku Yang Muncul Dalam Interaksi.....	80
4.4.1.3 Kedudukan Orang – Orang Dalam Perilaku.....	98
4.4.1.4 Kaitan Antara Orang dan Perilaku.....	102
4.5 Pengujian Hipotesis	112
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian.....	115
4.7 Pembahasan.....	117
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	127
3.1 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis dan jumlah UMKM di Kota Serang tahun 2010.....	8
Tabel 3.1	Skor Indikator Menurut Likert.....	41
Tabel 3.2	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	42
Tabel 3.3	Jumlah Industri UMKM Unggulan Perkecamatan di Kota Serang Tahun 2012.....	49
Tabel 3.4	Pengujian Hipotesis Satu Sampel dan Dua Sampel.....	53
Tabel 4.1	Jadual Kegiatan Penelitian.....	55
Tabel 4.1	Jenis Usaha.....	60
Tabel 4.2	Pasar Modern Kota Serang.....	61
Tabel 4.3	Pasar Tradisional Kota Serang	62
Tabel 4.4	Jumlah UMKM Kota Serang Tahun 2012.....	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas.....	67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 : Jenis Kelamin Responden.....	67
Diagram 4.2 : Usia Responden.....	68
Diagram 4.3 : Pendidikan Terakhir Responden.....	69
Diagram 4.4 : Jenis Industri UMKM Unggulan.....	69
Diagram 4.5 : Jumlah Karyawan.....	70
Diagram 4.6 : Jumlah Produksi Perbulan.....	71
Diagram 4.7 : Jumlah Pendapatan Bersih Perbulan.....	72
Diagram 4.8 : Jumlah karyawan pengusaha menunjang kegiatan usaha.....	74
Diagram 4.9 : Kepedulian Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan.....	75
Diagram 4.10: Prioritas Antara Tugas Dan Kepentingan Pribadi Disperindagkop	77
Diagram 4.11: Komitmen Dalam Pengembangan UMKM Unggulan.....	78
Diagram 4.12: Kepedulian DISPERINDAGKOP Terhadap Masalah-Masalah Dalam Pengembangan Umkm Unggulan	79
Diagram 4.13: Sosialisasi yang Berkaitan dengan Kegiatan Pengembangan UMKM Unggulan.....	81
Diagram 4.14: Pendampingan DISPERINDAGKOP Terhadap Pengusaha UMKM Unggulan.....	82
Diagram 4.15: Intensitas Pendampingan yang Dilakukan DISPERINDAGKOP Dalam Pengembangan UMKM Unggulan.....	83
Diagram 4.16: Tempat Atau Lokasi Untuk Pemasaran	84
Diagram 4.17: Lokasi Atau Tempat yang Disediakan DISPERINDAGKOP Mampu Menunjang Kegiatan Usaha.....	.85

Diagram 4.18: Pendidikan dan Pelatihan Pengemasan Produk.....	86
Diagram 4.19: Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pembuatan Label Halal.....	87
Diagram 4.20: Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran Produk.....	88
Diagram 4.21: Pendidikan dan Pelatihan Tentang Manajemen Wirausaha.....	89
Diagram 4.22: Pendidikan dan Pelatihan Tentang Nomor Seri Makanan/P-IRT.	90
Diagram 4.23: Intensitas Pendidikan dan Pelatihan Keseluruhan.....	92
Diagram 4.24: Keikutsertaan Karyawan Pengusaha Umkm Dalam Pendidikan dan Pelatihan.....	93
Diagram 4.25: Praktek Dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.....	84
Diagram 4.26: Hambatan – Hambatan Pengembangan UMKM Unggulan.....	95
Diagram 4.27: Upaya Disperindagkop Dalam Menyelesaikan Hambatan – Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan.....	96
Diagram 4.28: Saran Dan Kritik DISPERINDAGKOP Dalam Pengembangan UMKM Unggulan.....	97
Diagram 4.29: Pendampingan Yang Berkaitan Dengan Pengembangan UMKM Unggulan.....	98
Diagram 4.30: Sosialisasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Pengembangan UMKM Unggulan.....	99
Diagram 4.31: Fasilitas Pemasaran Produk UMKM Unggulan	100
Diagram 4.32: Kerjasama DISPERINDAGKOP Dengan Pelaku UMKM Unggulan	101
Diagram 4.33: Inovasi Disperindagkop Dalam Pengembangan UMKM Unggulan.....	102
Diagram 4.34: Peningkatan Pendidikan Wirausaha Pelaku UMKM Unggulan	103
Diagram 4.35: Peningkatan Pendidikan Wirausaha Para Karyawan.....	104
Diagram 4.36: Pengaruh Pengembangan Oleh DISPERINDAGKOP Terhadap Jumlah Karyawan.....	105

Diagram 4.37: Pengaruh Pengembangan Oleh DISPERINDAGKOP Terhadap Modal Pengusaha UMKM Unggulan.....	106
Diagram 4.38: Pengaruh Pengembangan Oleh DISPERINDAGKOP Terhadap Omset Usaha.....	107
Diagram 4.39: Peningkatan Manajemen Usaha.....	108
Diagram 4.40: Kemampuan UMKM Unggulan Mensejahterakan Karyawan.....	109
Diagram 4.41: Kemampuan UMKM Unggulan Menyediakan Lapangan Pekerjaan.....	110
Diagram 4.42: Pendidikan dan Pelatihan Optimal.....	111
Diagram 4.43: Skor Hasil Kuesioner Perindikator.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	KerangkaPemikiran.....	31
Gambar3.1	Uji Pihak Kanan.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam segala bidang kehidupan bernegara, memiliki salah satu peran dalam mengatur kegiatan ekonomi. Hal itu dikarenakan, suatu perekonomian dalam mekanismenya terkadang tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Istilah yang sering digunakan dalam permasalahan ini adalah kegagalan pasar (*market failure*). Kegagalan pasar adalah pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi (*resource*) secara efisien guna menghasilkan barang – barang dan jasa (Ahmad, 2002:1.1). Kegagalan pasar yang ada terjadi karena beberapa faktor, salah satunya pengangguran (*employment*). Pengangguran sendiri adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru (S.Alam, 2007:6).

Maka pemerintah sebagai salah satu pembuat kebijakan dapat melakukan intervensi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam permasalahan ekonomi ini, karena pada dasarnya sektor publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi (Ahmad, 2002:1.1). Intervensi pemerintah dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dalam APBN. Yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dapat diciptakan kesempatan kerja baru (Ahmad, 2002:1.8).

Tidak hanya melalui kebijakan fiskal dalam APBN, tapi dengan program untuk mengembangkan sektor ekonomi rakyat (Ahmad, 2002:1.8). Berdasarkan fungsi dan intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya membuat Peraturan Perundang – Undangan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan sebagai berikut: 1) Mewujudkan Struktur Ekonomi Perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 3) Meningkatkan peran UMKM dalam Pembangunan Daerah, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dengan adanya landasan tersebut, dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 124 poin pertama yang menyebutkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Maka dalam hal ini dinas daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang – undangan. Khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang menaungi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjalankan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Pengertian UMKM sendiri menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pasal 1 (ayat 1-3) yaitu:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kebanyakan pengusaha yang tergolong dalam UMKM adalah pengusaha mikro, yang termasuk diantaranya pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima (PKL), usaha – usaha yang dibentuk kaum petani di pedesaan, dan para nelayan (Malano, 2011:168).

Tujuan UMKM itu sendiri adalah mengurangi angka pengangguran yang merupakan salah satu faktor terjadinya kegagalan pasar, dan pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data BPS Kota Serang Tahun 2012, banyaknya pencari kerja Kota Serang tahun 2012 sebesar 38.015 jiwa dari jumlah angkatan kerja 274.594 jiwa. Hal itu membuktikan bahwa cukup banyak tingkat pengangguran di Kota Serang yaitu 13.84%. Sedangkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan LAN (Laboratorium Administrasi Negara) FISIP UNTIRTA yang melakukan kegiatan survey selama 20 hari yang berakhir pada 14 Desember 2012 dengan tema “Refleksi Satu Tahun Kinerja Pemerintah Atut-Rano”. Dengan mengambil populasi dari Kota Serang sebesar 330.083 jiwa dengan jumlah sampel 204 responden, yang mana populasi

tersebut mengambil wilayah Kota Serang yang merupakan lokus penelitian peneliti. Peneliti hanya mengutip hasil persentase tingkat penghasilan responden di Kota Serang, yang mana tingkat penghasilan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan berkaitan pula dengan angka kemiskinan. Berikut hasil survey tentang tingkat penghasilan responden yang mana populasinya mengambil Kota Serang sebagai Respondennya. Berdasarkan tingkat pendapatan responden dari Rp. 400.000 – Rp. 600.000,- sebesar 10.71% dan yang kurang dari Rp. 400.000 sebesar 21.43% menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Hal itu dapat diukur berdasarkan indikator BPS, yang salah satunya menyebutkan bahwa indikator kemiskinan adalah dari sumber penghasilan dibawah Rp. 600.000,-/bulan.

Maka hal itu membuktikan bahwa permasalahan yang dihadapi di Kota Serang adalah bagaimana mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya dengan penguatan KUKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu prioritas atau tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Serang (RPJMD Kota Serang Periode 2008-2013) khususnya Pencapaian atas terjalannya hubungan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan, terciptanya kerjasama antara industri besar dengan industri kecil yang mendukung perekonomian daerah. Yaitu dengan terjalannya hubungan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan lembaga keuangan dapat terwujud melalui pencapaian *outcome* berupa terciptanya hubungan yang baik antara UMKM dengan lembaga keuangan. Pencapaian outcome ini dilakukan dengan pelaksanaan output berupa adanya kegiatan promosi produksi UMKM secara berkala dan pemberian

penghargaan oleh lembaga keuangan kepada para UMKM berkinerja baik oleh dinas terkait.

Dengan demikian, untuk mewujudkan prioritas tersebut maka diperlukan peran serta tidak hanya dari pelaku usaha dan masyarakat lokal, tapi pemerintah juga ikut berperan dalam hal ini. Karena telah disinggung sebelumnya, bahwa pemerintah memiliki fungsi – fungsi di bidang ekonomi khususnya bidang UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), karena salah satu prioritas RPJMD Kota Serang berhubungan dengan konsep PEL yaitu peran aktif dari stakeholders (masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah) untuk bekerjasama atau melakukan kemitraan dalam pengembangan sumber daya lokal di Kota Serang khususnya.

UMKM sendiri adalah salah satu jenis usaha yang menyerap cukup banyak sumber daya lokal, akan tetapi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mengoptimalkan sumber daya lokal tidak hanya dari pelaku UMKM, tapi harus ada kerjasama dari pihak – pihak yang lain seperti pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang ada. Maka pemerintah dalam hal ini ikut andil dalam kemajuan UMKM di Kota Serang khususnya, berikut hasil survey yang dilakukan LAN (Laboratorium Administrasi Negara) FISIP UNTIRTA yang melakukan kegiatan survey selama 20 hari yang berakhir pada 14 Desember 2012 dengan tema “Refleksi Satu Tahun Kinerja Pemerintah Atut-Rano”. Salah satunya mengukur program yang dianggap tidak berhasil. Program yang dianggap paling tidak berhasil adalah program dibidang perekonomian sebesar 31.12% yang salah satunya adalah mengenai UKM yang ada di Kota

Serang. Hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan perannya kurang optimal, sehingga pengembangan ekonomi lokal tidak berjalan sesuai harapan karena salah satu sumber daya yang ada tidak optimal dalam menjalankan perannya, khususnya peran sebagai pelaku ekonomi dan intervensi terhadap kegiatan ekonomi di bidang UMKM.

Uraian di atas menggambarkan permasalahan ekonomi lokal di Kota Serang yaitu bagaimana mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. Yaitu dengan penguatan KUKM, Jasa, Perdagangan, dan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu prioritas atau tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Serang (RPJMD Kota Serang Periode 2008-2013). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana stakeholders endogeneous (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya (Supriyadi, 2007). Jadi peran dinas di sini dibutuhkan untuk menjadi jembatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Dengan adanya fakta yang ada, maka Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang menaungi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan yang cukup besar dalam Pengembangan Ekonomi Lokal khususnya di Kota Serang. Karena sesuai dengan tupoksinya, yaitu :

1. Seksi Bina UKM (Usaha Kecil dan Menengah):

- a. Pembinaan dan pemberdayaan UKM sektor Perdagangan dan Jasa;
- b. Pembinaan dan pemberdayaan UKM sektor Industri, Pertanian, dan non Pertanian;
- c. Pembinaan dan pemberdayaan UKM sektor industri, perbengkelan, dan industri kerajinan tangan;
- d. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok usaha bersama/sentra-sentra UKM, untuk menjadi lembaga Koperasi;
- e. Monitoring dan evaluasi perkembangan UKM.

Dengan tugas tersebut, harusnya diharapkan pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dapat menjadi pelaku usaha yang tetap bertahan dan mengembangkan usahanya, serta dapat bermitra dengan pengusaha – pengusaha besar. Sehingga bukan tidak mungkin rakyat menjadi sejahtera karena angka pengangguran yang berkurang dan berdampak pada pengurangan pula terhadap angka kemiskinan karena konsep Pengembangan Ekonomi Lokal yang berjalan. Maka tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang harus bersungguh – sungguh melaksanakan perannya dengan baik. Hal itu dikarenakan UMKM yang mampu bertahan harusnya tidak hanya mampu bertahan, tapi mampu mengembangkan usahanya agar sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, banyak permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang khususnya Bidang UMKM yang berhubungan langsung dengan pelaku UMKM, khususnya UMKM unggulan industri pangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai jembatan bagi

pelaku UMKM dengan dunia usaha. Berikut permasalahan – permasalahan seputar pelaksanaan peran dinas dalam Pengembangan Ekonomi Lokal:

Pertama, Verifikasi data yang tidak dilakukan oleh Dinas Perindustrian , Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang. Sehingga perkembangan dari UMKM yang ada menjadi tidak terukur. Berikut data rekapitulasi jumlah UMKM Kota Serang.

Tabel 1.1
Jenis dan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Serang tahun 2010

NO	URAIAN	UNIT USAHA
1	Industri Pangan	486
2	Industri Sandang	128
3	Industri Kimia dan Bahan	257
4	Industri Kerajinan	27
	Jumlah	898

Sumber: Peneliti Berdasarkan Data Direktori UMKM Kota Serang

Dari tabel di atas tidak menunjukkan perkembangan jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena tidak adanya data pembandingan dari tahun sebelumnya atau setelahnya. Hal itu membuktikan bahwa verifikasi data yang merupakan salah satu tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang belum dilakukan secara optimal. Padahal Dinas tersebut pun sudah memisahkan diri dengan Kabupaten Serang dari tahun 2008 sampai sekarang. Verifikasi data diperlukan untuk mengetahui perkembangan UMKM itu sendiri. Dengan mengetahui perkembangan UMKM itu sendiri, Dinas terkait pun dapat

mengukur kebijakan yang ada apa sudah sesuai apa mesti diperbaharui lagi demi kemajuan perkembangan perekonomian di tingkat lokal. Karena berdasarkan salah satu tupoksinya mengevaluasi dan memonitoring perkembangan UMKM tidak berjalan dengan baik.

Bukan hanya itu, saat observasi awal pada bulan Maret 2013 di salah satu pelaku UMKM Unggulan Sate Bandeng dan Emping ternyata antara data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Serang dengan yang di lapangan tidak sesuai. Alamat yang peneliti datangi di salah satu pengusaha Sate Bandeng berdasarkan data UMKM oleh dinas terkait setelah diverifikasi tidak sesuai, setelah diverifikasi ternyata orang yang tinggal di alamat tersebut bukan pengusaha Sate Bandeng melainkan pegawai disalah satu perusahaan swasta yang sudah lama bertempat tinggal di alamat tersebut. Sedangkan salah satu pengusaha Emping yang saya datangi di kecamatan Taktakan tidak ada karena sudah lama pemilik usaha tersebut telah meninggal dunia. Masalah – masalah tersebut dikarenakan data yang ada tidak diverifikasi ulang, padahal menurut Kepala Bidang UMKM saat diwawancarai pada April 2013 mengungkapkan pendataan ulang UMKM dilakukan tiap tahun, akan tetapi paa kenyataannya pendataan ulang belum dilakukan karena menurut beliau tersendat anggaran.

Kedua, kemitraan yang kurang antara pemerintah dan stakeholder lainnya. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) pada intinya digerakkan karena adanya kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam keberlangsungan program PEL itu sendiri. Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kota Serang salah satu yang mewakili pemerintah daerah yang menjalankan perannya dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) kurang bekerjasama dengan pihak lain, baik dengan dinas lain, maupun swasta dan masyarakat dalam dunia usaha. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memiliki data yang akurat tentang jumlah UMKM di Kota Serang, hal ini karena Dinas ini tidak bekerjasama secara optimal dengan dinas yang berkaitan langsung dengan UMKM sektor – sektor tertentu, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata. Padahal dengan kerjasama dengan Dinas lain dilakukan untuk mengakurasi data yang ada agar mejadi seragam dan akurat. Bukan hanya itu, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang pun belum secara optimal bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sebagai salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena konsep dari Pengembangan Ekonomi Lokal adalah peran aktif dari pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.

Ketiga, pendidikan dan pelatihan (Diklat) UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait yang kurang optimal. Kepala Bidang UMKM Kota Serang mengungkapkan saat wawancara kedua pada tanggal 03 April 2013 Pukul 10.30 WIB di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, mengungkapkan pendidikan dan pelatihan memang ada, tapi tergantung anggaran. Kota Serang sendiri menurutnya termasuk kota yang masih baru, jadi belum memiliki anggaran untuk melakukan pendidikan pelatihan yang kontinu. Diklat yang sudah dilakukan adalah salah satunya Diklat yang diadakan oleh Dinas

UMKM Provinsi Banten, yaitu Pendidikan sertifikasi halal. Diklat tersebut diikuti oleh perwakilan para pelaku UMKM unggulan.

Tetapi menurut salah satu pengusaha emping yang merupakan pelaku UMKM unggulan belum pernah didatangi pihak dinas untuk mengikuti Diklat. Sehingga tidak jarang UKM yang ada tidak mengalami perkembangan dalam kemampuan usaha karena tidak meratanya pelaksanaan Diklat tersebut. Keterampilan – keterampilan baru yang tidak dimiliki untuk kebutuhan pengembangan usaha dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang kurang optimal. Kalaupun ada Diklat, tetapi tidak dirasakan oleh semua UMKM (tidak merata). Anggaran bukanlah menjadi alasan pihak dinas untuk tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Walau Kota Serang tergolong kota yang masih baru, bukan tidak mungkin tugas Disperindagkop sebagai salah satu pembina bisa terlaksana dengan optimal, jika pihak dinas memiliki kemauan dan tidak setengah - setengah melaksanakan tugasnya demi terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Kota Serang.

Keempat, pendampingan oleh dinas terkait kepada pelaku UKM yang kurang optimal. Pendampingan dapat diartikan sebagai satu interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat yang sadar diri dan terdidik (tidak berarti punya pendidikan formal). (<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pendampingan.html>. di akses 30 September 2014). Pola pendampingan dalam kegiatan usaha dan bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi salah satu upaya yang amat potensial untuk

menurunkan kredit macet atau kredit bermasalah (*NPL/Non Performance Loan*)(<http://smedcugm.blogspot.com/> di akses 4 Juni 2013).

Akan tetapi menurut Kepala Bidang UMKM pendampingan yang dilakukan hanya sekedar mendampingi pelaku UKM untuk meminjam bantuan modal pada pihak per kreditan. (saat wawancara kedua pada tanggal 3 April 2013 Pukul 10.30 WIB di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Serang). Padahal menurut beberapa pelaku UMKM unggulan, peminjaman modal usaha dilakukan sendiri, sehingga tidak jarang pelaku UMKM ini meminjam modal ala kadarnya kepada kerabat dekat. Hal itu dikarenakan proses peminjaman modal pada kredit usaha rakyat yang mengalami kendala pada ketidakpercayaan pihak Kreditur untuk memberikan pinjaman dan pelaku UMKM pun tidak mau diribetkan dengan proses dan persyaratan peminjaman. Maka pihak dinas dalam hal ini harusnya melakukan pendampingan pada pengusaha UMKM agar dapat mengembangkan usahanya melalui penguatan modal. Pendampingan tidak hanya berupa pendampingan dalam pinjaman modal, akan tetapi bantuan lain berupa dukungan dan bantuan menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengembangan usaha pun perlu dilakukan guna usaha yang dijalankan baik berproduktif.

Kelima, fasilitas pemasaran UMKM yang kurang optimal. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro,

kecil, dan menengah (*Pasal 1 ayat 10 UU NO 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*). Akan tetapi tidak sesuai dengan pengertian tersebut, pengembangan yang ada kurang optimal dilakukan pihak dinas terkait. Salah satunya fasilitas untuk promosi dan tempat pemasaran hasil produk – produk unggulan UMKM di kota Serang pun belum memadai. Promosi yang ada terkesan dari mulut kemulut, harusnya pihak dinas memberikan fasilitas promosi melalui pembinaan dan pemberdayaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu dengan memanfaatkan media internet sebagai alat promosinya. Tidak hanya itu, tempat yang strategis dan nyaman bagi para konsumen baik konsumen domestik maupun luar domestik yang akan membeli hasil produk UMKM unggulan Kota Serang. Maka dengan demikian, dinas terkait diharapkan mampu menyediakan tempat yang strategis dan nyaman bagi para wisatawan domestik maupun luar yang ingin membeli produk – produk UMKM unggulan sebagai buah tangan khas Banten.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data jumlah UMKM dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang yang belum ada.
2. Kemitraan antara stakeholder yang lain kurang optimalnya.
3. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dinas terkait terhadap UMKM yang ada kurang optimal.
4. Pendampingan kurang optimal yang dilakukan dinas terkait terhadap UMKM yang ada.
5. Fasilitas pemasaran UMKM yang kurang optimal dilakukan oleh dinas terkait.

1.3 Batasan Masalah

Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam proses kajian penelitian, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada: “Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Pembatasan Masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu: “Seberapa Besar Peran Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota khususnya Peran Bidang UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) di Kota Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan tersendiri bagi perkembangan teori – teori ilmu sosial.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota khususnya Peran Bidang UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi instansi terkait guna memperbaiki kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut.

3) Bagi Pihak lain

Pihak lain disini bisa masyarakat, dosen maupun mahasiswa lainnya serta pihak – pihak terkait. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kondisi real yang terjadi dilapangan dan dapat dijadikan sebagai masukan positif bagi semua pihak terkait hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berikut adalah landasan teori maupun landasan/dasar hukum yang relevan dengan konteks penelitian terkait dengan Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori – kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru).http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran (di akses 24 Juli 2013). Jadi peran di sini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang – orang yang memiliki posisi atau jabatan di lingkungannya. Berikut juga pengertian peranan menurut Soekanto.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Jadi hampir sama dengan pengertian sebelumnya, peranan menurut Soekanto adanya kedudukan yang tidak bisa dipisahkan dengan peranan itu

sendiri. Sedangkan menurut Ralf Dahrenrof (dalam sudarma, 2008:63-64) menyebutkan beberapa asosiasi yang berkaitan dengan istilah “peranan”.

1. “peranan” selalu diartikan sebagai suatu hal yang tersedia bagi orang yang akan memainkannya, yaitu si pelaku. Coraknya “di luar”. Suatu peranan sudah ada di luar orang yang bersangkutan sebelum dibagikan atau disampaikan untuk dipentaskan.
2. Hal yang tersedia ini dapat dirumuskan sebagai sejumlah sikap, gerak, tutur kata, dan perilaku yang diharapkan.
3. Bersama dengan pola – pola perilaku lain merupakan suatu keseluruhan. Tiap – tiap peranan bersifat “bagian”, sebagaimana nyata dari istilah lain “pars” dan istilah inggris “part” untuk peranan.
4. Mengingat bahwa pola perilaku atau “sikap” sudah tersedia sebelum dimainkan oleh pelaku, maka ia harus mempelajari dan menghafalkan perannya supaya mampu untuk itu.
5. Dari segi si pemain tidak ada peranan atau persona dramatis yang bersifat habis – habisan dalam arti menghabiskan semua kemungkinannya. Dengan kata lain, orang dapat menghafalkan dan memainkan lebih dari satu peranan.

Dari beberapa pemikiran tersebut, peran dimaknai sebagai satu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, sikap, yang diharapkan oleh masyarakat yang muncul dan menandai sifat dan tindakan si pemegang status atau kedudukan sosial. Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi menurut Levinson, dalam peranan adanya norma atau aturan, adanya konsep untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir adalah adanya orang atau

masyarakat yang memiliki perilaku untuk melaksanakan aturan atau norma yang telah dibuat sesuai konsep sebagai organisasi maupun masyarakat.

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008: 224) mengemukakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Jadi peran di sini diartikan sebagai suatu rumusan untuk membatasi perilaku – perilaku yang telah dibuat oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu organisasi di masyarakat atau lingkungan kerja.

Dalam teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Selanjutnya, Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008: 225) menjelaskan bahwa peran individu yang satu dengan yang lainnya, ataupun antar kelompok dalam kehidupan sosial terjadi karena hadirnya sosok aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu, serta sosok target atau sasaran, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Selain itu, Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008: 216) menjelaskan bahwa ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, berikut diantaranya, yaitu:

1. *Expectation* (harapan)
2. *Norm* (Norma)

3. *Performance* (wujud perilaku)
4. *Evaluation* (penilaian)
5. *Sanction* (sanksi)

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1999: 268). Peran merupakan bentuk tingkah laku yang diharapkan dari orang yang diharapkan memiliki status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan tanpa peranan, contoh: kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan, seperti Guru, Insinyur, Dokter, Gubernur, Camat, Ketua Osis dan sebagainya. Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang. Karena, dengan peranan yang dimilikinya ia akan dapat mengatur dirinya dan orang lain.

Soekanto (1999: 269) memaparkan bahwa peranan mencakup tiga hal. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Robert Park dalam Turner dalam Hudaeri dan Roby (2005:10), setiap orang selalu dan dimanapun, disadari atau tidak, memainkan suatu peran. Dimana Peran itu berkaitan erat dengan struktur sosial, dan individu itu hanya bisa memainkan peran dalam batas – batas kedudukannya dalam struktur sosial. Peran yang dimainkan individu mempunyai beberapa tipe sebagai berikut:

1. peran psikosomatik (*psychosomatic role*), yaitu perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar biologis.
2. peran psikodromatik (*psycodromatic role*), yaitu peran yang dimainkan individu dalam memngharapkan suatu konteks sosial tertentu.
3. peran sosial (*social role*), yaitu peran individu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kategori – kategori sosial.

Menurut Sarwono (2008:215-230) teori peran (*role theory*) merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam antropologi dan sosiologi. Istilah ‘peran’ diambil dari dunia teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh, ia diharapkan berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

Sarbin dalam Santoso (2010: 222) mengemukakan bahwa uraian tentang peran sosial tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek lain dari individu yang terlibat dalam peranan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Hal ini terjadi agar alasan aspek-aspek lain dari individu itulah yang menentukan peranan sosial yang akan dipilih dan dilakukan oleh individu yang bersangkutan dalam hubungannya dengan situasi sosial yang sedang dihadapi individu tersebut. Aspek-aspek peranan sosial tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Ia juga menguraikan aspek-aspek peranan sosial sebagai berikut:

1. *Status*. Yang dimaksud adalah kebebasan seseorang dalam posisi tertentu untuk mengambil inisiatif bertingkah laku dan mempertahankan tujuan kelompok. Dalam status ada dua hal yang penting, yakni:
 - a. ada pribadi lain yang mempunyai harapan
 - b. individu/pribadi mengantisipasi dengan tingkah laku, khususnya dalam situasi sosial.
2. *Position*. Posisi sebagai satu dengan lain harapan atau antisipasi reaksi yang diisyaratkan. Dengan pernyataan tersebut, setiap individu yang ada

dalam situasi sosial, memiliki harapan berupa tingkah laku yang menjadi miliknya (tingkah lakunya sendiri) dan tingkah laku individu lain

3. *Expectation*. Harapan adalah kesediaan untuk mendapat penguatan. Penguatan meliputi tingkah laku individu dan yang lain. Oleh karena itu, dalam harapan terkandung dua hal penting yaitu:
 - a. hak, yaitu harapan peran sosial dimana pemegang peran turut serta bertingkah laku dalam bentuk tertentu yang ditujukan kepada pemegang peranan pasangannya.
 - b. kewajiban, yaitu harapan peran sosial di mana pemegang peran pasangannya memberi reaksi terhadap pemegang peran individu lain dalam situasi sosial.

Dalam harapan tersebut tingkah laku yang tampak berupa tingkah laku yang berpasang-pasangan sehingga ada kesesuaian peranan dari masing-masing individu yang ada dalam situasi sosial. Ketidaksesuaian tingkah laku individu yang ada dalam situasi sosial menyebabkan terjadinya *discrepancy* (ketidacocokan), yaitu individu tidak berfungsi di dalam situasi sosial.

Peran sendiri mencakup seluruh lapisan kehidupan sosial, termasuk juga pemerintah. Cadwallader dalam Sadyohutomo (2008:17) memaparkan bahwa peran pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah antara lain dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyedia *service* dan barang publik (*supplier of public goods and services*)
2. Mengatur dan memfasilitasi (*regulatinf and facilitating*)
3. Sebagai *social engineering*
4. Sebagai *arbiter*

Dapat disimpulkan dari keempat peran pemerintah yang dikemukakan oleh Cadwallader diatas bahwa pemerintah memiliki peran dari segala lini kehidupan dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini memiliki peranannya pada tiap tataran di dalam masyarakat. Begitupun dalam bidang perekonomian, keempat peranan ang dikemukaka oleh Cadwallader tersebut masuk dalam bidang ini.

Muluk (2006:58) menjelaskan menguatnya peran pemerintah bukan berarti tidak akan muncul masalah. Begitupun dengan peran dinas sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah, kenyataan di lapangan cukup banyak permasalahan yang berkaitan dengan peranannya di masyarakat khususnya peran dinas yang peneliti teliti.

Dari sekian banyak teori peran yang dipaparkan, peneliti memilih untuk menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:215) yang membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Jadi menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:224), pembagian golongan dalam suatu peran oleh orang – orang dilihat dari kedudukan orang – orang tersebut dalam perilaku dan interaksi sosial. Dalam teori ini, peran tersebut melihat orang – orang (kelompok) bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi sesuai dengan kedudukannya. Begitupun dengan penelitian peneliti yang berjudul “Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang”. Bagaimana tugas pokok dan fungsi suatu dinas berperan dalam pengembangan ekonomi lokal. Jadi, dengan menggunakan teori Biddle dan Thomas, maka peneliti dapat mengetahui peran suatu dinas tersebut dalam pengembangan ekonomi lokal. Hal itu dikarenakan dinas merupakan salah satu perkumpulan manusia yang berkelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dengan teori tersebut

diharapkan peneliti dapat mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsi tersebut berperan dalam PEL berdasarkan teori Biddle dan Thomas.

2.1.2. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana stakeholders endogeneous (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Prinsip penerapannya adalah kerjasama stakeholders yang akan sangat menentukan keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1984 dalam Supriyadi, 2007).

Dari pengertian tersebut tentang pengembangan ekonomi lokal dikaitkan dengan peran dinas yang diteliti memiliki keterkaitan karena dinas merupakan salah satu penyelenggara di pemerintah yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang ikut berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal karena sesuai dengan tupoksi dan kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan, dan dinas terkait sebagai pelaksanaannya maka harus berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Jadi setiap proses yang dilakukan oleh suatu kelompok pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan konsep pengembangan ekonomi lokal, berikut tujuan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan fokus penerapannya:

1. Membentuk jaringan kerja kemitraan antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional dan global.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga lokal (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan PEL.
3. Terjadinya kolaborasi antar aktor baik publik, bisnis dan masyarakat
4. Secara kolektif akan mendorong kondisi yang nyaman dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan fokus penerapannya, tujuan dari PEL itu sendiri adalah meningkatkan kapasitas pasar di tingkat lokal dengan kemitraan antara

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketiganya berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal. Terlebih pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur perekonomian di tingkat lokal dan regional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga berkurangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam proses implementasi perencanaan dan penerapan PEL ini menggunakan prinsip pendekatan ekonomi, kemitraan, dan kelembagaan.

1. Prinsip ekonomi

- a. Mulai dengan kebutuhan pasar
- b. Menfokuskan pada kluster dari kegiatan ekonomi yang ada, yang produksinya dijual ke daerah luar (*economic base*) dan multiplier effect di daerahnya kuat
- c. Menhubungkan produsen skala kecil dengan supplier kepada perusahaan ekspor.

2. Prinsip Kemitraan

- a. Adanya tanggung jawab dari masing-masing stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai aktor pengembang dan pengelola ekonomi lokal.
- b. Masing-masing stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berperan aktif dalam bekerjasama
- c. Kemitraan mengandalkan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar atau asing
- d. Inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar, dan permintaan bukan produksi atau *supply*

3. Prinsip Kelembagaan

- a. Fasilitas dialog diantara stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif
- b. Mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan
- c. Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung

Ketiga prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai strategi pendekatan dan proses perencanaan mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan dalam kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai forum yang terorganisasikan guna memfasilitasi komunikasi antar pemerintah, masyarakat dan stakeholders dan berbagi kelompok yang berkepentingan terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan. Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam PEL berkaitan

erat dengan prinsip keterbukaan, pemberdayaan, efisiensi, dan *good governance*.

Dengan demikian, dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran
4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Supriyadi, 2007)

Dalam konteks pembangunan wilayah, keberhasilan PEL akan mendorong percepatan pertumbuhan wilayah yang berkembang dan tertinggal. Sehingga akan berkurangnya anggapan eksploitasi pembangunan wilayah maju terhadap wilayah miskin (kesenjangan wilayah). Pada akhirnya, konsep PEL menjadi alternatif bagi pengembangan wilayah yang didasarkan atas pembangunan kapasitas lokal (sumberdaya alam, manusia, kelembagaan) semakin berkembang.

Dari pemaparan di atas tentang PEL, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik sentral konsep dari Pengembangan Ekonomi Lokal Sendiri adalah adanya peran aktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melakukan kemitraan atau kerjasama dalam mengelola sumber daya lokal dengan maksud memanfaatkan potensi lokal agar perluasan lapangan kerja terwujud, sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di tingkat lokal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dani Danuar Tri U (2013) melakukan penelitian tentang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Semarang dalam rangka merumuskan solusi untuk pengembangannya. UMKM kreatif dianggap mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan berbekal pada ilmu pengetahuan,

keaktifitas, inovasi serta mampu mengembangkan lapangan pekerjaan. Namun, UMKM kreatif di Kota Semarang masih belum mampu memberikan predikat khusus bagi kota ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini.

Moh. Fatkhul Mujib (2010) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Usaha Kecil & Menengah (UKM) Studi Pada Pelaku UKM Di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui pengaruh gender dan nilai kewirausahaan terhadap strategi dan kinerja UKM. Hasil penelitian ini adalah Nilai kewirausahaan mempunyai pengaruh secara langsung positif terhadap kinerja usaha dan pengaruh tidak langsung positif terhadap kinerja usaha melalui strategi. Meskipun pemilik/pengelola usaha perempuan memiliki nilai kewirausahaan yang lebih rendah dari pada laki-laki namun dalam prakteknya, perempuan memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dari pada laki - laki. Sebab, perempuan memiliki potensi dan keunggulan dalam menjalankan usahanya.

Galih Sri Rahayu (2010) melakukan penelitian Tentang Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Umkm Kabupaten Klaten Dalam Pemberdayaan Ukm Tenun Lurik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah UKM di Kabupaten Klaten. Salah satu UKM yang berpotensi untuk

dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah UKM Tenun Lurik. Akan tetapi UKM Tenun Lurik ini masih menemui beberapa kendala dalam menjalankan usaha mereka. Untuk itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten sebagai pemegang wewenang dalam pembinaan UKM berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan UKM Tenun Lurik agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih mandiri. Hasil penelitian ini adalah Produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten yang sudah baik dalam menjalankan kinerjanya.

Naning Sri Utami (2005) melakukan penelitian tentang Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali Untuk Meningkatkan Ekspor Furniture Di Pasar Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelayanan - pelayanan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk meningkatkan ekspor furniture di Kabupaten Boyolali serta hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali maupun para pengusaha sendiri. Hasil penelitian ini adalah upaya peningkatan ekspor furniture, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Boyolali berperan sebagai fasilitator yang menjembatani perusahaan furniture dengan pihak lain yang berkepentingan, misalnya buyer, bank dan lain-lain.

Sedangkan yang peneliti lakukan adalah berfokus pada Seberapa Besar Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam

Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang. Dimana peran Disperindagkop Kota Serang salah satunya mencakup tentang bagaimana dinas melakukan pembinaan, pemberdayaan kepada para pelaku UMKM, khususnya UMKM unggulan untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dalam pasar tradisional maupun modern dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan atas penyerapan tenaga lokal yang dilakukan UMKM. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan rendahnya pelaksanaan peran Disperindagkop terhadap perkembangan dan kemajuan UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan tugas pokok dari salah satu bidang yang bertugas melakukan pembinaan dan pemberdayaan tidak melaksanakan tugasnya dengan kurang baik. contohnya tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan dinas terkait, dinas hanya menyampaikan undangan dari kementerian maupun provinsi, itu pun yang mendapatkan undangan hanya UMKM itu - itu saja, bantuan jaminan dan kemudahan dalam perkreditan yang kurang berjalan, fasilitas pemasaran yang kurang optimal. maka dalam observasi awal didapatkan hipotesis sementara peneliti bahwa pelaksanaan peran Disperindagkop termasuk rendah, dan angka yang diharapkan paling tinggi mencapai 65%.

2.3. Kerangka Berpikir

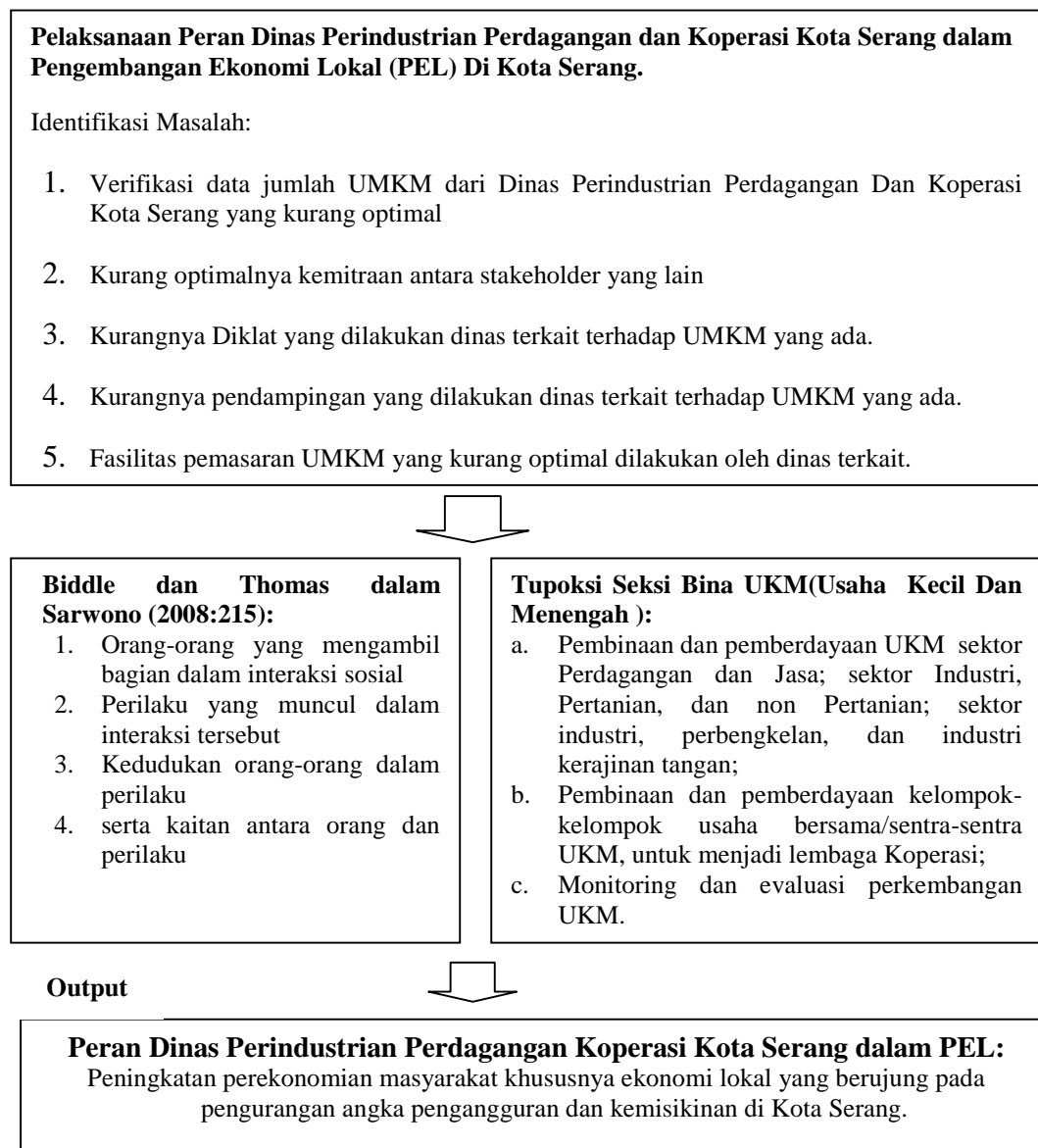
Peran aktif Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal adalah salah satu cara untuk mengembangkan UMKM, khususnya UMKM industri pangan Lokal di Kota Serang.

Permasalahan yang terjadi di lapangan merupakan input dalam penelitian ini, dimana permasalahan dalam hal pelaksanaan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang tersebut, antara lain: Verifikasi data jumlah UMKM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Serang yang belum ada; Kemitraan antara stakeholder yang lain kurang optimal; Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan dinas terkait terhadap UMKM yang ada kurang optimal; Pendampingan yang kurang optimal dilakukan dinas terkait terhadap UMKM yang ada; Pemasaran UMKM yang kurang optimal dilakukan oleh dinas terkait. Dari beberapa masalah tersebut, fokus penelitian adalah Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang.

Penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang ini menggunakan teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:215) membagi peristilahan dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, yaitu adanya aktor dan target dalam interaksi sosial; (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, yaitu tindakan atau praktek yang dilakukan dalam interaksi sosial serta adanya penilaian atas perilaku tersebut; (3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku dalam bersikap. mempengaruhi perilaku orang-orang; (4) Kaitan antara orang dan perilaku, yaitu sikap orang dalam berperilaku.

Selanjutnya, variabel tersebut dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan hasilnya (*outcome*) adalah optimalnya Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang. Hal ini akan berdampak (*effect*) pada terwujudnya: peningkatan penyerapan tenaga kerja, menurunnya angka kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dari peneliti untuk merumuskan jawaban sementara atas penelitian yang kebenarannya tentu saja masih harus diuji secara empiris. Menurut Black dan Champion (2001:109) hipotesis adalah suatu pernyataan sementara mengenai sesuatu, yang keandalannya biasanya tak diketahui. Walaupun sebagai jawaban sementara, hipotesa penting artinya untuk memberi batasan pada peneliti mengenai hal-hal yang akan diteliti, sehingga pengumpulan data yang akan dilaksanakan terfokus pada hipotesa tadi (Sandjaja, 2006:73).

Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan pengamatan di lapangan, pengumpulan data di lapangan, kajian pustaka, dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Hipotesis menggambarkan keyakinan peneliti tentang jawaban dari masalah yang akan ditelitinya. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data (Bungin, 2009:75).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis deskriptif yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari observasi peneliti dan pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini, yaitu:

“Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang paling tinggi mencapai angka 65% dari nilai ideal”

$H_0 : \mu \leq 65\%$

H_a : Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang tercapai melebihi 65%.

$H_a : \mu > 65\%$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman,2006:42). Sedangkan, metodologi ialah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1991:7-8). Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Usman, 2006:42). Jadi metode penelitian adalah cara untuk mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik untuk dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Umumnya ada empat karakteristik penelitian ilmiah empiris, yaitu *sistematik*, *logik*, *empirik*, dan *replikatif*. *Sistematik* berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. *Logik* berarti pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau hukum yang menjadi kaidah bekerjanya akal yaitu logika. Sesuatu dapat dikatakan benar bilamana dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Faham *empirisme* menekankan unsur *aposteriori* atau unsur yang berasal dari kesan indrawi. *Replikatif* berarti suatu penelitian yang pernah dilaksanakan harus dapat diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bilamana dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama (Sandjaja, 2006:39-43).

Pemilihan dan penentuan metode penelitian tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan perumusan masalah, kalau permasalahannya hanya difokuskan pada satu variabel atau aspek dan tujuannya ingin mendapatkan deskripsi dari variabel atau aspek tersebut, maka metodenya adalah metode deskriptif atau survai (Sukmadinata, 2008:278). Penelitian mengenai Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui Seberapa Besar Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Menurut Zuriah (2007:47), penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Sukmadinata (2008:72-73) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Bungin (2009:36) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai

situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa terhadap satu variabel, yaitu variabel Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang.

Jadi, penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

3.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam proses kajian penelitian, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada: “Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang.”

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi (*locus*) penelitian Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang adalah pada Bidang UMKM Disperindagkop Kota Serang dan pada sejumlah industri UMKM Unggulan yang tersebar di wilayah Kota Serang. Kota Serang dipilih karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang strategis sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Banten dan lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah:

1. Peran

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Jadi peran di sini diartikan sebagai suatu rumusan untuk membatasi perilaku – perilaku yang telah dibuat oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam suatu organisasi di masyarakat atau lingkungan kerja.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana stakeholders endogeneous (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Peran Disperindagkop Kota Serang dalam pengembangan ekonomi lokal

khususnya industri UMKM Unggulan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional akan menjabarkan konsep dalam rincian yang terukur. Yaitu menurut Biddle dan Thomas mengenai indikator peran, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

Merupakan hal yang berkenaan dengan siapa yang memiliki peran dalam suatu interaksi atau kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan pemebrdayaan UMKM, dan orang – orang yang menjadi bagian dari peran tersebut dilihat dari latar belakang dan sikapnya dalam melakukan kegiatan agar diketahui sesuai dengan tujuannya apa.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.

Berkenaan segala aktivitas yang ditimbulkan dari kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara tugas dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.

Kedudukan orang-orang dalam perilaku merupakan indikator yang berkenaan dengan posisi atau jabatan orang – orang yang memilki peranan yang dikaitkan dengan sikap yang muncul dalam kegiatan tersebut.

4. serta kaitan antara orang dan perilaku.

Kaitan antara orang dan perilaku merupakan kebijakan yang berorientasi pada usaha yang didistribusikan secara adil.

Definisi operasional ini kemudian akan dikembangkan menjadi pertanyaan - pertanyaan yang berbentuk kuesioner dan akan diberikan kepada para pengusaha UMKM Unggulan yang menilai berapa besar peran Disperindagkop melakukan tugasnya. Hasilnya kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya.

3.5. Instrumen Penelitian

Menurut Bungin, pengertian dasar dari instrumen penelitian adalah: *Pertama*, instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. *Kedua*, instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kesalahan di bagian ini, dapat dipastikan suatu penelitian akan gagal atau berubah dari konsep semula. *Ketiga*, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi, yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Instrumen penelitian kuantitatif harus reliabilitas dan validitas. Untuk mencapai kedua unsur ini, sebuah instrumen penelitian kuantitatif harus memiliki tingkat kepekaan yang dapat dipercaya (Bungin, 2009:95).

Arikunto dalam Zuriyah mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Ungkapan “*Garbage tool garbage*

result” merupakan hubungan antara instrumen dengan data. Margono dalam Zuriyah mengungkapkan bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil dengan baik apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah penelitian) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Data yang salah atau tidak menggambarkan data empiris bisa menyesatkan peneliti sehingga kesimpulan penelitian yang ditarik atau dibuat peneliti bisa keliru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian, antara lain:

1. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel, harus jelas spesifik sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang akan digunakan;
2. Sumber data atau sumber informasi, baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian (Zuriyah, 2007:168).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel sebagai variabel mandiri, yaitu Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang. Adapun pengukuran yang digunakan peneliti untuk variabel adalah skala pengukuran instrumen skala Likert. Skala Likert tersebut digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen tersebut memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, maupun sebaliknya dari sangat negatif sampai sangat positif yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skor Tiap Indikator Menurut Likert

JAWABAN	SKOR
A	4
B	3
C	2
D	1

Sumber: Peneliti, 2014

Berikut tabel 3.2 yang merupakan kisi-kisi instrumen penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang:

Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No.Item Kuesioner
Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang	1.Orang orang yang mengambil bagian dalam interaksi social	1. pengalaman 2. sikap	1 s/d 11
	2.Perilaku yang muncul dalam interaksi	1. Praktek kegiatan 2. Konflik atau masalah 3. Pemecahan masalah 4. Penilaian	12 s/d 29
	3.Kedudukan orang – orang dalam perilaku 4. kaitan antara orang dan perilaku	1. Kesesuaian antara posisi dengan tugas 2. Profesionalisme pekerjaan sesuai posisi atau jabatan	30 s/d 43

Sumber: Peneliti, 2014

3.5.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang, khususnya Peran Bidang UMKM Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

- (1) Data primer adalah data utama yang langsung diperoleh dari responden melalui kuesioner. Data primer didapatkan dari studi lapangan, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian.
- (2) Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapat oleh peneliti. Data sekunder ini merupakan data-data atau dokumen-dokumen

pendukung yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

2. Sumber data

- (1) Responden adalah para pelaku industri UMKM unggulan yang tersebar di wilayah Kota Serang khususnya Industri UMKM Unggulan pangan yang berada di Kecamatan Serang, Taktakan, dan Kasemen.
- (2) Literatur adalah data-data kepustakaan berdasarkan *text book* yang berkaitan dengan penelitian dalam penyusunan deskripsi teori.

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Adapun tujuan penggunaan kuesioner, yaitu 1) Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan 2) Memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, dimana di satu pihak pertanyaan ini memberi alternatif jawaban yang harus dipilih dan di lain pihak memberi kebebasan bagi responden untuk menjawab secara bebas lanjutan dari pertanyaan sebelumnya.

2. Observasi

Menurut Bungin (2009:133), observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dengan observasi, peneliti dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi non partisipasi, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan (Zuriah, 2007:179). Dalam penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara menggunakan pertanyaan yang tersusun secara sistematis, yaitu menggunakan kuesioner yang pilihan alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak tersusun secara sistematis, dimana pertanyaannya disesuaikan dengan keadaan. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi sebagai bahan sekunder dalam merumuskan masalah penelitian.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian berdasarkan *text book*.

5. Studi dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan, surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). Menurut Kartodirdjo dalam (Bungin, 2009:144), sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

Dari beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, kuesioner merupakan instrumen yang utama (primer) karena data pada kuesioner merupakan data yang akan diperlakukan dalam pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan rumusan statistik untuk mengetahui Seberapa Besar Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang lainnya tetap relevan untuk digunakan dalam menunjang penelitian.

3.5.3. Uji Validitas

Menurut Singarimbun (1995:124), Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Gay (1983) dalam

(Sukardi, 2008:121), mengemukakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang dapat mengukur apa yang hendak diukur akan menghasilkan penelitian yang valid.

Validitas memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, validitas sebenarnya menunjuk kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut bukan pada instrumennya. Suatu instrumen dikatakan valid atau memiliki validitas bila instrumen tersebut benar-benar mengukur aspek atau segi yang akan diukur. *Kedua*, validitas menunjukkan suatu derajat atau tingkatan, validitasnya tinggi, sedang atau rendah, bukan valid dan tidak valid. *Ketiga*, validitas instrumen juga memiliki spesifikasi tidak berlaku umum (Sukmadinata, 2008:228-229).

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *pearson product moment* dengan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 16.0*. Berikut ini rumus dari korelasi *pearson product moment* (Arikunto, 2002:146)

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi *product moment*
- $\sum x$ = Jumlah skor dalam sebaran x
- $\sum y$ = Jumlah skor dalam sebaran y
- $\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan
- $\sum x^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x
- $\sum y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y
- n = Jumlah sampel

3.5.4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari bahasa Inggris *rely*, yang berarti percaya, dan *reliable* yang artinya dapat dipercaya (Purwanto, 2007:161). Reliabilitas menunjuk pada kemampuan instrumen untuk digunakan sebagai alat ukur, sejauh mana alat pengukur tersebut dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen lebih besar, maka instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun, 1995:140). Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *alpha cronbach*, yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Pengujian reliabilitas dibantu dengan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 16.0*. Berikut ini rumus *alpha cronbach* yang digunakan untuk menguji reliabilitas (Arikunto, 2002:171):

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{b^2}{i^2} \right]$$

Keterangan:

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

σ_b^2 = Jumlah varians butir

σ_1^2 = Varians total

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2009:99).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Industri Pangan UMKM Unggulan yang tersebar di wilayah Kota Serang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Jumlah Industri UMKM Unggulan per Kecamatan di Kota Serang
Tahun 2010

NO	KECAMATAN	AKTIF
1	Serang	6
2	Taktakan	49
3	Cipocok Jaya	-
4	Walantaka	-
5	Kasemen	7
6	Curug	-
Total		62

Sumber: Pengolahan data, 2014

Dengan demikian, populasi penelitian untuk mengetahui Seberapa besar peran Bidang UMKM di Kota Serang adalah sebanyak 62 Industri UMKM Unggulan.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Bungin, 2009:81). Karena populasi yang ada berjumlah 62 responden, maka peneliti menggunakan sampel jenuh yaitu mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bungin (2009:164), Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan

data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), dan proses pembeberan (*tabulating*).

Menurut Zuriyah (2007:198), analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti. Pada analisa statistik deskriptif dipaparkan data dan angka-angka yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, kemudian bila perlu disajikan dalam bentuk grafik. Pada pemaparan ini dikemukakan jumlah sampel yang dirinci menurut atribut variabel, kemudian dipaparkan *mean*, *mode*, atau *median* data yang diperoleh serta standar deviasi dan kisaran (*range*) datanya (Sandjaja, 2006:215).

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKM adalah analisis statistik deskriptif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada. Analisis statistik deskriptif biasanya dipergunakan kalau tujuan penelitiannya untuk penjajagan atau pendahuluan, tidak menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada (Zuriyah, 2007:198). Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun data di lapangan, dimana dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian

yang telah terjawab, kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.

2. *Coding*, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah melalui tahap *editing* tersebut melalui tahapan *koding*, dimana data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean ini menggunakan dua cara, yaitu *pengkodean frekuensi* yang digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu dan *pengkodean lambang* yang digunakan pada poin yang tidak memiliki bobot tertentu. (Bungin, 2009:164-165).
3. *Tabulating*, yaitu bagian terakhir dari pengolahan data, dimana data-data dimasukkan pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.

Setelah data terkumpul dan diolah dengan tahap-tahap seperti yang disebutkan diatas, maka data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik sederhana, dimana data mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKMyang diperoleh dari kuesioner yang bersifat kuantitatif tersebut diuji melalui analisis data.

3.7.1. Uji t-test

Uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio. Untuk menganalisis Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota

Serangdalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKM, maka dalam pengujian hipotesis deskriptif digunakan uji t-test untuk satu sampel atau satu variabel. Berikut ini rumus uji t-test satu sampel:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{n}}$$

Keterangan:

- \underline{t} = Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung
- \bar{X} = Nilai rata-rata x
- μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan
- S = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah anggota sampel

3.7.2. Uji Pihak Kanan

Bentuk pengujian hipotesa tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Hipotesa satu arah harus diuji dengan statistik satu arah atau uji satu sisi (*one-tailed test*) dan hipotesa dua arah harus diuji dengan tes statistik dua arah atau uji dua sisi (*two-tailed test*). Pada suatu penelitian dengan tingkat signifikansi 0,05 atau $\alpha = 0,05$, maka daerah penolakan H_0 adalah 5% dan daerah penerimaan H_0 adalah 95%. Pada uji satu sisi daerah penolakan tersebut dapat terletak di sebelah kanan atau sebelah kiri dan besarnya 5%. (Bungin, 2009:164-165).

Adapun syarat untuk pengujian hipotesis satu sampel dan dua sampel untuk uji satu pihak dan uji dua pihak ditunjukkan pada tabel 3.4 berikut (Kurniawan, 2010:12):

Tabel 3.4
Pengujian Hipotesis Satu Sampel dan Dua Sampel

PENGUJIAN HIPOTESIS		PENGUJIAN HIPOTESIS SATU SAMPEL	PENGUJIAN HIPOTESIS DUA SAMPEL
UJI DUA PIHAK/ARAH		$H_0 : \mu_1 = 0$ $H_1 : \mu_1 \neq 0$	$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
UJI SATU PIHAK/ARAH	Uji Pihak Kanan	$H_0 : \mu_1 \leq 0$ $H_1 : \mu_1 > 0$	$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 > \mu_2$
	Uji Pihak Kiri	$H_0 : \mu_1 \geq 0$ $H_1 : \mu_1 < 0$	$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

Sumber: Alberth Kurniawan, 2010

Hipotesis peneliti dalam penelitian Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam PEL di Kota Serang adalah sebagai berikut:

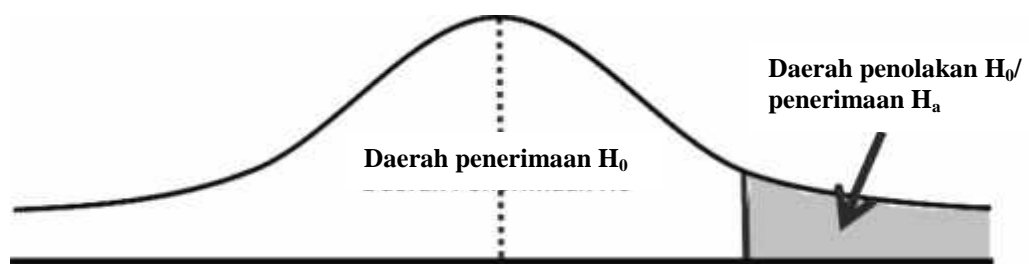
Hipotesis nol : Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKM paling tinggi mencapai angka 65% dari nilai ideal.

Hipotesis alternatif : Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKMStrategi Pengembangan Koperasidi Kabupaten Serang tercapai melebihi 65%.

$$H_0 : \mu \leq 65\%$$

$$H_a : \mu > 65\%$$

Dengan melihat hipotesis statistik tersebut, maka pengujian hipotesis dalam penelitian Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang Khususnya Peran Bidang UMKM adalah dengan menggunakan uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan jika hipotesis nol (H_0) berbunyi "lebih kecil atau sama dengan (\leq)", sedangkan pada hipotesis alternatifnya (H_a) berbunyi "lebih besar ($>$)". Sinonim dari kalimat "lebih kecil atau sama dengan" adalah "paling besar", sedangkan sinonim dari kalimat "lebih besar" adalah "paling kecil".



Gambar 3.2
Uji Pihak Kanan

3.8. Jadwal Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada tabel 3.5 berikut:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang

4.1.1.1 Keadaan Geografis Kota Serang

Kota Serang secara geografis terletak antara $50^{\circ}99'$ – $60^{\circ} 22'$ Lintang Selatan dan $1060^{\circ} 07'$ – $1060^{\circ}25'$ Bujur Timur. Apabila memakai koordinat system UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat keTimur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 21,7Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga disebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km.

Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 70 mm dan rata-rata 19 hari hujan.

4.1.1.2 Visi dan Misi Disperindagkop Kota Serang

Visi

Visi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang Tahun 2008-2013 Sabagai Berikut: “Terwujudnya IKM UKM dan Koperasi Di Kota Serang yang Produktif”

Misi

Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang adalah:

- Mewujudkan kapasitas kelembagaan yang berkualitas.
- Mendorong produktivitas industri kecil dan menengah yang berkelanjutan.
- Meningkatkan akses usaha kecil dan menengah terhadap pelayanan perdagangan.
- Memperkuat manajemen kepengurusan, permodalan, usaha dan pemasaran koperasi.

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas: H. Odjat Sukardjat, Spdi.,MBA

Pit Sekretaris: Kusna Ramdani, S.Sos.,M.Si

Kasubag Umum dan Kepegawaian: Ansori

Kasubag Keuangan: Hj. Erlin Puspa Dewi, SE.,MM

Kasubag Program, Evaluasi Dan Pelaksanaan: Siti Rohimah, S.Ag., M.Si

Kabid Perindustrian: Kusna Ramdani, S.Sos.,M.Si

Kasie Industry Kimia dan Hasil Hutan: Khori Sri Rahayu, ST.,M.Si

Kasie Industry Logam, Mesin, Elektronik dan Tekstil: Sjarif Hidajat, SE

Kabid Perdagangan: Um Rochmat Hidayat, ST.,MM

Kasie Perdagangan dalam dan Luar Negeri: Sri R Herlina, SE

Kasie Pengelolaan Informasi dan Perlindungan Konsumen: Sugiri,
ST.,M.Si

Kasie Pengelolaan dan Pengembangan Pasar: Suyono, SE

Kabid Koperasi dan UMKM: H. Samsul Ma'arif, S.Ag.,M.Pd

Kasie Bina Koperasi: Drs. Heru Prihatin

Kasie Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Dra. Anah Suhanah

Kasie Fasilitas dan Kemitraan: Tondi Apriliaries Sagala, S.Sos

4.1.1.4 Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Disperindagkop Kota Serang

Bidang Perindustrian

Pembangunan bidang industri diarahkan pada upaya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga IKM mampu berdaya sains baik di pasar lokal maupun internasional, pembangunan industri yang berkelanjutan, dimana produk industri harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga dapat menghasilkan industri produk bersih (*green product/ ecological product*) terutama industri – industri yang berpotensi menghasilkan limbah.

Bidang perindustrian memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang industri logam, mesin, elektronik dan tekstil (ILMET) industri agro, aneka dan kerajinan (IAAK), serta industri kimia dan hasil hutan (IKHH).

Bidang perindustrian melakukan pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM) Kota Serang dalam bentuk pelatihan, bantuan alat dan promosi produk melalui pameran bagi IKM formal (sudah memiliki ijin industri) dan IKM non formal (belum memiliki ijin industri) yang jumlahnya meningkat setiap tahun, seperti:

Tabel 4.1
Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Tahun 2010 (unit usaha)	Tahun 2011 (unit usaha)	Tahun 2012 (Unit usaha)
1.	IKM formal	265	268	280
2.	IKM non formal	2.523	2.682	2.746
	Jumlah	2.788	2.950	3.026

Sumber: profil Disperindagkop Kota Serang tahun 2013

Dari tabel di atas mengenai jenis usaha dapat dilihat bahwa jumlah unit usaha IKM formal antara tahun 2010 dengan tahun 2011 hanya sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 3 unit, sedangkan tahun 2012 bertambah menjadi 12 unit. Sedangkan IKM non formal dari segi jumlah lebih banyak dari IKM formal yaitu 1:10 unit usaha. IKM non formal mengalami peningkatan jumlah unit usaha antara tahun 2010 dengan 2011 dan 2012 berturut – turut sebesar 162 unit dan 76 unit. Berarti peningkatan antara tahun 2011 dengan 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2011.

Bidang Perdagangan

Pembangunan Bidang Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem informal pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional serta jaringan perdagangan ekspor; meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien dengan harapan akan terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri.

Bidang perdagangan memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan informasi dan perlindungan konsumen serta pengelolaan dan pengembangan pasar.

Bidang perdagangan melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan terhadap 6 (enam) pasar tradisional dan juga pembinaan pengawasan terhadap pasar modern yang terdapat di Kota Serang.

Tabel 4.2
Pasar Modern Kota Serang

No	NAMA PERTOKOAN	JUMLAH
1	RAMAYANA DEPT. STORE	1 UNIT
2	BOROBUDUR DEPT. STORE	1 UNIT
3	ROBERTA DEPT. STORE	1 UNIT
4	LOTTE MART	1 UNIT
5	HERO SUPERMARKET (GIANT)	1 UNIT
6	CARREFOUR	1 UNIT
7	MATAHARI (MALL OF SERANG)	1 UNIT
8	ALFAMART	29GERAI
9	INDOMART	35GERAI
10	ANEKA SWALAYAN	1 UNIT
11	LAIN – LAIN	4000 Unit

Sumber: profil Disperindagkop Kota Serang tahun 2013

Dari tabel di atas menunjukkan cukup banyaknya pasar moder yang tersebar di wilayah Kota Serang, akan tetapi tidak semua produk UMKM Unggulan diterima di pasar modern tersebut. Produk UMKM Unggulan yang sudah diterima di pasar modern salah satunya adalah

produk Sate Bandeng, itu pun tidak semua pertokoan mau menerima produk tersebut untuk dijual. Hal itu berkaitan dengan kemampuan para pelaku UMKM Unggulan dalam menanggung kerugian jika barang tidak laku di jual, karena daya tahan produk yang tidak begitu lama.

Tabel 4.3
Pasar Tradisional Kota Serang

No	Nama Pasar	Lokasi	Luas M ²	Jumlah		
				KIOS	LOS	PK L
1	PASAR RAU	KEC. SERANG	57.000	3487	1032	600
2	SERANG PLAZA	KEC. SERANG	13.030	475	74	100
3	KARANGANTU	KEC. KASEMEN	3.000	56	110	53
4	BANTEN LAMA	KEC. KASEMEN	30.000	20	700	93
5	KEPANDEAN	KEC. TAKTAKAN	30.000	140	0	10
6	KELODRAN	KEC. WALANTAKA	6.000	78	90	60

Sumber: profil Disperindagkop Kota Serang tahun 2013

Dari tabel di atas menunjukkan kurang meratanya pasar yang ada di Kota Serang, hal itu berkaitan dengan dua kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional. Seperti Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, para pengusaha UMKM Unggulan menyatakan bahwa produk – produk UMKM yang ada di pasarkan di pasar tradisional, seperti pasar rau dan pasar Banten lama.

Bidang Koperasi dan UMKM

Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) diarahkan pada pengembangan KUKM agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta fasilitasi dan kemitraan. Berikut tabel tentang jumlah UMKM di Kota Serang tahun 2012:

Tabel 4.4
Jumlah UMKM Kota Serang tahun 2012

No	Jenis Usaha	Jumlah UKM	Jumlah Tenaga Kerja	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	11.095	18.070	4.829.733.765	32.198.225.100
2	Usaha Kecil	2.476	12.940	19.669.143.971	131.127.626.470
3	Usaha Menengah	98	1.215	11.027.877.750	73.419.185.000

Sumber: profil Disperindagkop Kota Serang tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas jumlah usaha yang paling besar adalah jenis usaha kecil dengan omset dan asset yang paling besar, sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi terdapat pada jenis usaha mikro. Maka dari data tersebut, perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk

mengembangkan UKM karena UKM salah satu penyumbang pendapatan daerah dan pengurang angka pengangguran.

4.2 Pengujian Persyaratan Statistik

4.2.1 Uji Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan suatu instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran.

Untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen yang telah dibuat itu valid atau tidak valid, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

Rumus Korelasi *Product Moment*

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2) - (\sum x)^2 (n \sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

Keterangan :

r = Besarnya korelasi *product moment*

n = Jumlah sampel

x = Jumlah skor dalam sebaran x

y = Jumlah skor dalam sebaran y

xy = Jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan

x^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

y^2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} telah ditentukan sebesar 0,159 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 responden. Dari pengujian di atas maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum dalam lampiran, menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 62 orang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang peneliti berikan sebanyak 43 instrumen, 4 instrumen tidak valid, dan 4 instrumen yang kurang menjadi pisau analisis dihilangkan maka 8 instrumen tersebut dihilangkan, sehingga hanya tersisa jumlah instrumen yang valid. Dengan demikian instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian ini dan dapat diolah dalam analisa berikutnya sebanyak 35 instrumen.

4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji realibilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini adalah kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, Husein. 2009:54). Uji realibilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua, menggunakan uji *Alpha Cronbach*. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:

Rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right)$$

Dimana :

n = Jumlah butir

S_i^2 = Variasi butir

S_t^2 = Variasi total

Dikatakan reliable menurut Siegel, jika $r_{11} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} telah ditentukan sebesar 0,6. Dengan menggunakan teknik perhitungan *SPSS*, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel Reliabilitas 4.5

HASIL UJI RELIABILITAS

(Menggunakan SPSS v. 16)

Case Processing Summary

		N	%
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	62	100.0
	<i>Excluded^a</i>	0	.0
	<i>Total</i>	62	100.0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.964	35

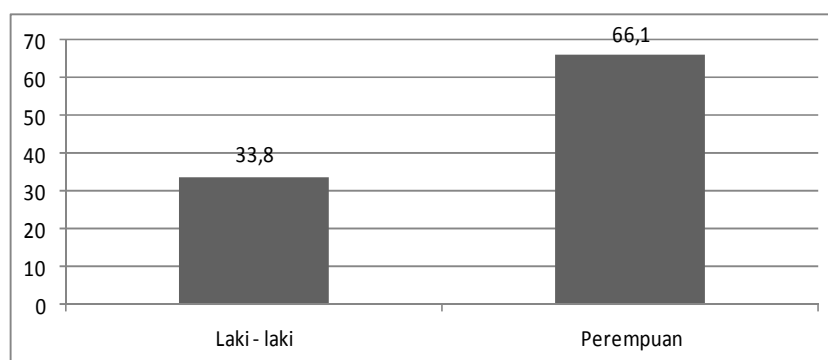
Nilai di atas menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $0,964 > 0,6$. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrumen penelitian ini adalah reliable. Berdasarkan uji validitas dan uji realibilitas yang telah dilakukan, maka instrument dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini.

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pengusaha Industri UKM Unggulan Kota Serang. Berdasarkan hasil penghitungan maka diperoleh 62 responden. Adapun identitas data responden yang diminta oleh peneliti adalah nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis industri, jumlah produksi, dan jumlah pendapatan. Berikut adalah pemaparan dalam bentuk diagram atas identitas data responden yang termuat dalam kuesioner.

Diagram 4.1
Jenis Kelamin Responden

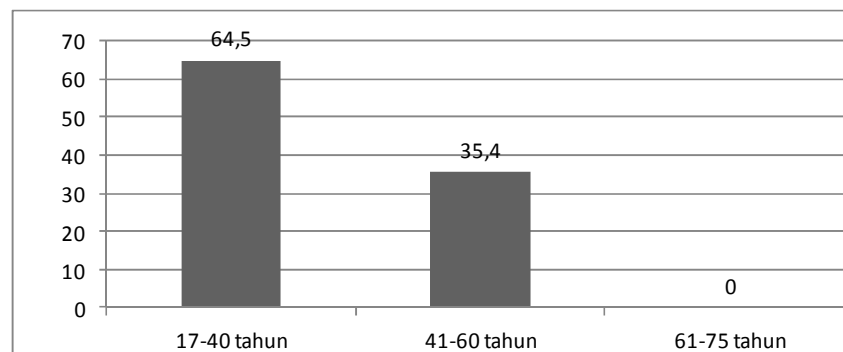


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Identitas responden)

Berdasarkan diagram 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66,1% berarti sebanyak 41 responden didominasi oleh perempuan. Sedangkan sisanya 21 responden adalah laki – laki. Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian

tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan jenis kelamin perempuan.

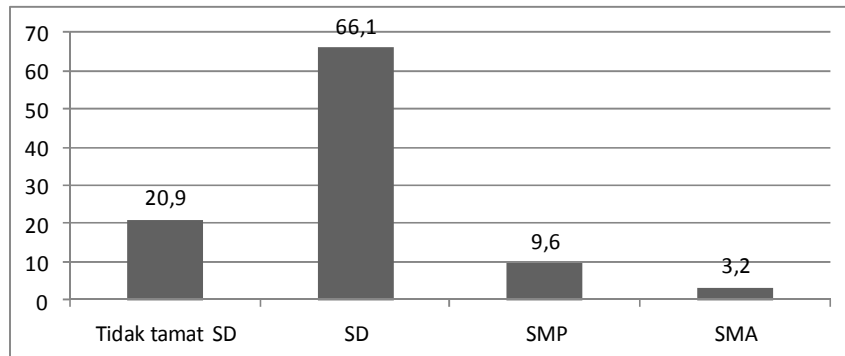
Diagram 4.2
Usia Responden



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Identitas responden)

Berdasarkan diagram 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% berarti sebanyak 40 responden sebagian besar adalah responden dengan usia yang sangat produktif. Sedangkan sisanya 22 responden adalah responden yang berusia kurang produktif karena mendekati usia pensiun. Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan usia yang cukup produktif.

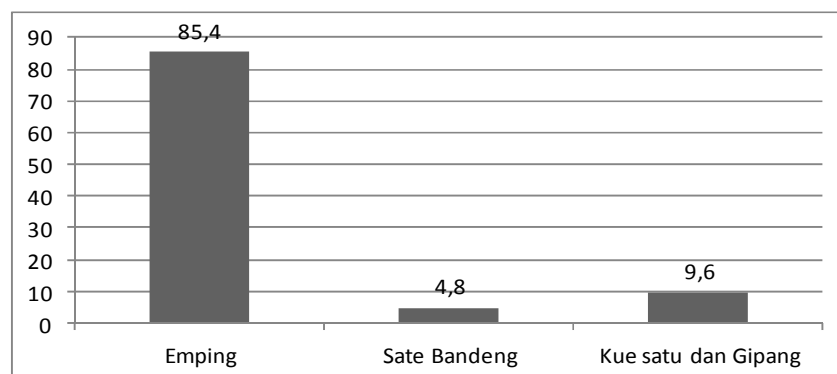
Diagram 4.3
Pendidikan Terakhir Responden



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Identitas responden)

Berdasarkan diagram 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66,1% berarti sebanyak 41 responden didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir atau tamatan SD (sekolah dasar). Sedangkan sisanya 21 responden tidak tamat SD (20,9%), SMP (9,6%), dan SMA (3,2%). Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan pendidikan terakhir tamat SD.

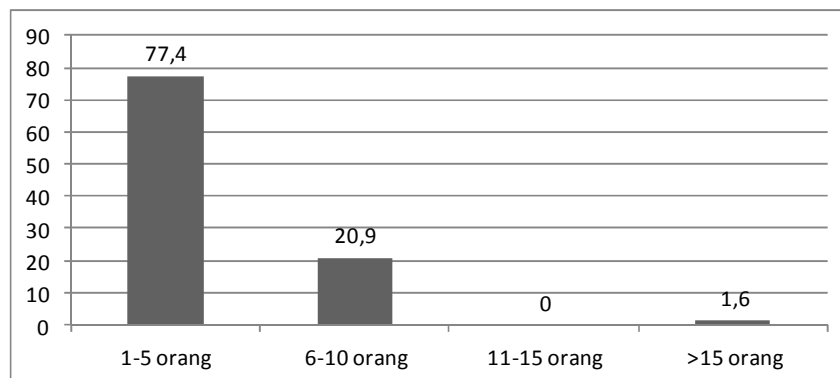
Diagram 4.4
Jenis IndustriUMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Identitas responden)

Berdasarkan diagram 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 85,4% berarti sebanyak 53 responden didominasi oleh pengusaha Emping. Sedangkan sisanya sebanyak 9 responden adalah pengusaha Sate Bandeng (4,8%), Kue Satu dan Kue gipang (9,6%). Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha Emping.

Diagram 4.5
Jumlah karyawan

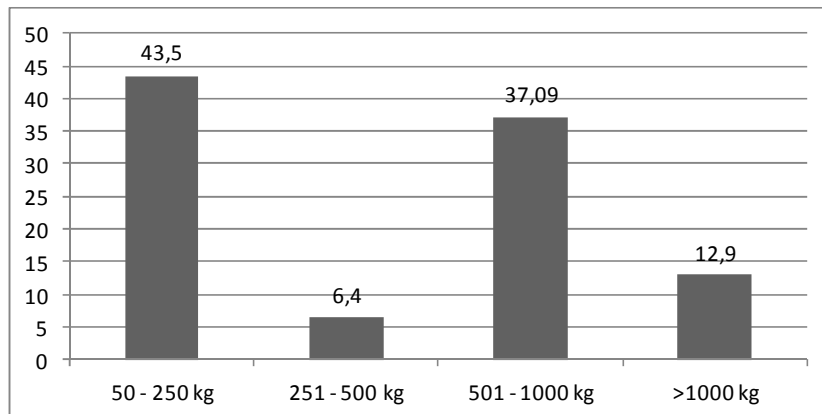


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Data responden)

Berdasarkan diagram 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 77,4% berarti sebanyak 48 responden didominasi pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 1-5 orang karyawan. Sedangkan sisanya 13 responden memiliki jumlah 6-10 karyawan dan 1 responden memiliki jumlah karyawan lebih dari 15 orang. Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan jumlah karyawan 1-5 orang.

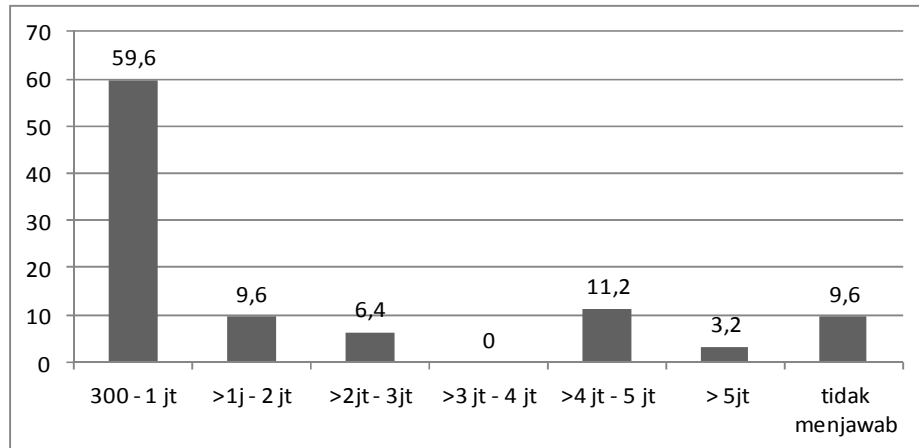
Diagram 4.6
Jumlah produksi perbulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Data responden)

Berdasarkan diagram 4.6 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% berarti sebanyak 27 responden memiliki jumlah produksi perbulan antara 50-250 kg. Sedangkan terbanyak kedua sebanyak 23 responden memiliki jumlah produksi 501-1000 kg perbulan. Sisanya sebanyak 12 responden memiliki jumlah responden masing – masing 251-500 kg sebanyak 6,4% dan lebih dari 1000 kg sebanyak 12,9%. Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan jumlah produksi 50-250 kg perbulan.

Diagram 4.7
Jumlah pendapatan net (bersih) perbulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Data responden)

Berdasarkan diagram 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 59,6% berarti sebanyak 37 memiliki jumlah pendapatan perbulannya antara 300 - 1 jt. Sedangkan jumlah pendapatan responden sebesar >1jt -2jt dan tidak menjawab masing –masing berjumlah 6 responden (9,6%). Sedangkan responden yang memiliki pendapatan dengan jumlah antara >2jt – 3jt sebanyak 6,4% (4 responden). 7 orang responden memiliki jumlah pendapatan >4jt – 5jt. Sedangkan sisanya sebanyak 3,2% (2 orang). Maka yang mengisi kuesioner dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang di dominasi oleh pengusaha – pengusaha dengan jumlah pendapatan terendah yaitu Rp. 300rb- 1jt perbulan.

4.4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penyajian data untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner yang ditunjukkan

kepada 62 pengusaha Industri UMKM Unggulan di Kota Serang yang menjadi sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap besarnya peran Disperindagkop dalam menjalankan tugas pokoknya.

Peneliti menguraikannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban responden dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner kepada responden yaitu pengusah Industri UMKM Unggulan di Kota Serang.

Dengan menggunakan satu variabel penelitian, peneliti menggunakan teori Biddle dan Thomas tentang peran orang-orang atau kelompok yang terdiri dari 4 (empat) indikator, kemudian peneliti menguraikan kedalam 39 pertanyaan dan diajukan ke 62 responden.

Skala yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini adalah dengan menggunakan *skala Likert* dengan mengajukan 4 (empat) pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda. Pilihan jawaban pertanyaan positif tersebut adalah poin A dengan bobot nilai 4, poin B dengan bobot nilai 3, poin C dengan bobot nilai 2, dan poin D dengan bobot nilai 1.

Berikut adalah pemaparan hasil jawaban atau tanggapan responden dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner.

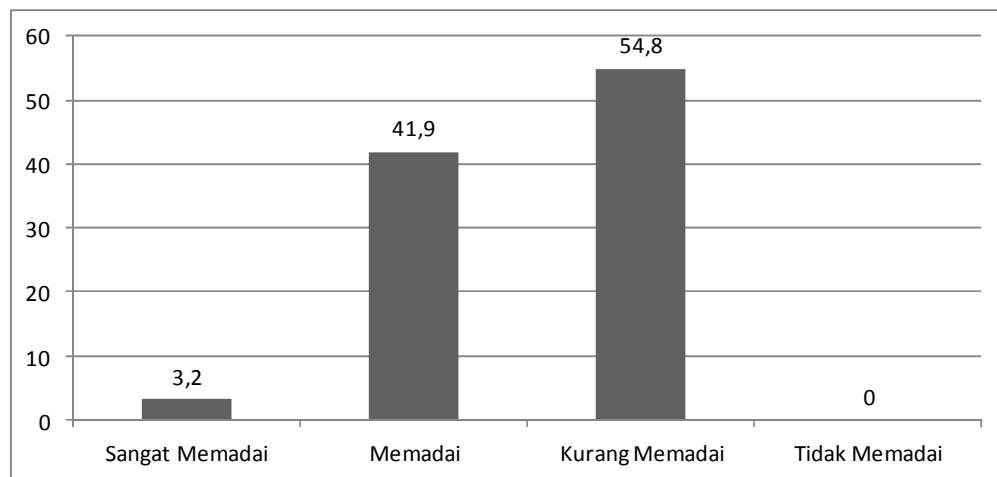
4.4.1 Variabel Peran

4.4.1.1 Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Indikator orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial yang dimaksud adalah para aktor (pemerintah) dan sasaran (pelaku UMKM

Unggulan) dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalamannya dan sikapnya dalam melakukan interaksi dalam hal ini adalah kerjasama (bermitra). Berikut hasil kuesioner dari pertanyaan nomer 5, 8, 9, 10, dan 11 yang memaparkan tentang indikator tersebut:

Diagram 4.8
Jumlah karyawan pengusaha dalam menunjang kegiatan usaha



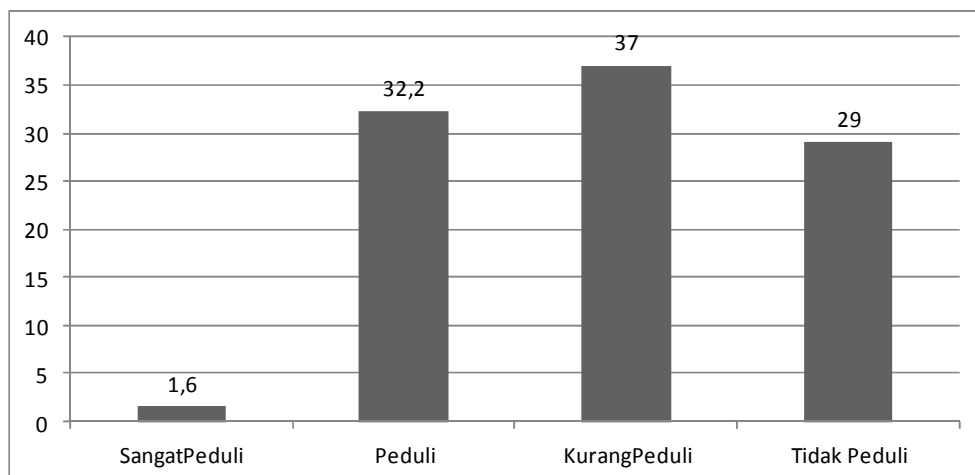
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.5)

Berdasarkan diagram 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 54,8% (34 pengusaha) memilih kurang memadainya jumlah karyawan dalam menunjang kegiatan usaha hal itu berkaitan dengan karyawan yang dipekerjaan oleh para pengusaha UMKM Unggulan yang bersifat tidak tetap. Pegawai yang ada sebagian besar adalah ibu rumah tangga dan para gadis yang masih dibawah umur. Sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya sampingan untuk mengisi waktu luang dan menambah pendapatan keluarga. Sebagian besar respondenpun didominasi oleh pengusaha emping yang kebanyakan karyawannya bekerja sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Jika bahan baku melimpah maka para karyawan akan

melakukan usaha sendiri, sedangkan jika bahan baku terbatas dan mahal, maka para karyawan kembali menjadi karyawan, pada hari – hari besar seperti hari raya keagamaan para karyawan lebih memilih memproduksi sendiri ketimbang menjadi buruh karena permintaan barang pada hari raya besar yang meningkat. Sedangkan sebagian lagi menyatakan sebaliknya, yaitu sebanyak 41,9% (26 pengusaha) menilai jumlah karyawan sudah memadai dalam hal menunjang kegiatan usaha, sisanya sebanyak 3,2% (2 pengusaha) menilai sangat memadai. Berarti sebanyak 30 pengusaha cenderung memberi penilaian positif karena karyawan yang ada sudah menunjang kegiatan usaha karena target produksi yang sudah mencukupi kebutuhan pemasaran dan cenderung didominasi oleh karyawan tetap.

Diagram 4.9

Kepedulian disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan



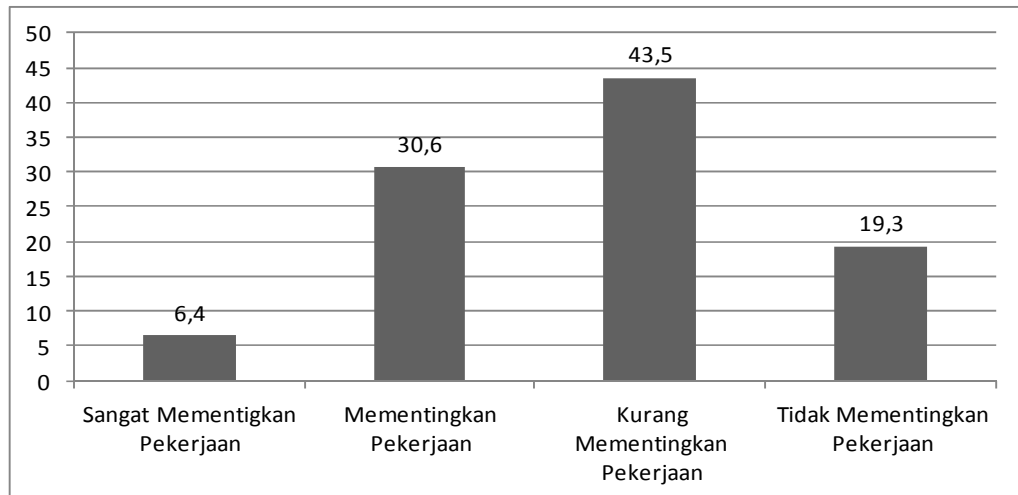
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.8)

Berdasarkan diagram 4.9 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 37% (23 pengusaha) memilih kurang peduli, dan 29% (18 pengusaha) memilih tidak

peduli, yang berarti sebanyak 41 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kepedulian Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan, hal itu pun dikaitkan karena sebagian besar pengusaha UMKM Unggulan mengembangkan usahanya atas kerja keras sendiri tanpa bantuan dari pihak lain untuk melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Padahal Disperindagkop memiliki tugas sebagai Pembina, pendamping yang penting dalam mengembangkan usaha UMKM Unggulan demi tercapainya tujuan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Sedangkan sebanyak 32,2% (20 pengusaha) memilih peduli dan 1,6% (1 pengusaha) memilih sangat peduli hal itu dikarenakan ada sebagian pengusaha UMKM Unggulan merasakan kepedulian yang ditunjukkan secara langsung. Akan tetapi pada dasarnya kebanyakan pengusaha merasakan ketidakpedulian Disperindagkop, karena dalam setiap permasalahan yang muncul dalam menjalankan usaha ada saja kendala yang datang dan pihak Disperindagkop tak menunjukkan kepeduliannya semisal menanyakan masalah atau mencari solusi terbaik.

Diagram 4.10
Prioritas antara tugas dan kepentingan pribadi Disperindagkop



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.9)

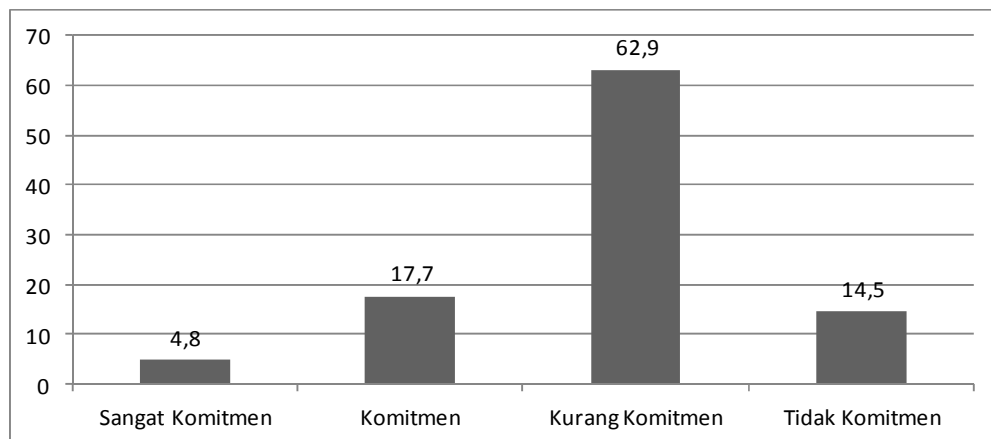
Berdasarkan diagram 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% (27 pengusaha) memilih kurang mementingkan pekerjaan, dan 19,3% (12 pengusaha) memilih tidak mementingkan pekerjaan, yang berarti sebanyak 39 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif. Hal itu dirasakan oleh sebagian besar pengusaha UMKM Unggulan bahwa tugas Disperindagkop di lapangan yang tidak dirasakan, karena mayoritas pengusaha dalam setiap pengembangan usahanya atas tangan sendiri tanpa bantuan pihak Disperindagkop.

Sedangkan sisanya menyatakan sebaliknya, yaitu sebanyak 30,6% (19 pengusaha) menilai Disperindagkop mementingkan pekerjaan dan 6,4% (4 pengusaha) menilai Disperindagkop sangat mementingkan pekerjaan. Berarti sebanyak 23 pengusaha cenderung memberi penilaian positif, hal itu dikarenakan pengusaha UMKM Unggulan menyatakan bahwa pihak Disperindagkop tidak

mencampur adukkan kepentingan pribadinya dengan tugasnya di lapangan, mereka beranggapan Disperindagkop profesional dalam bekerja.

Diagram 4.11

Komitmen dalam pengembangan UMKM Unggulan



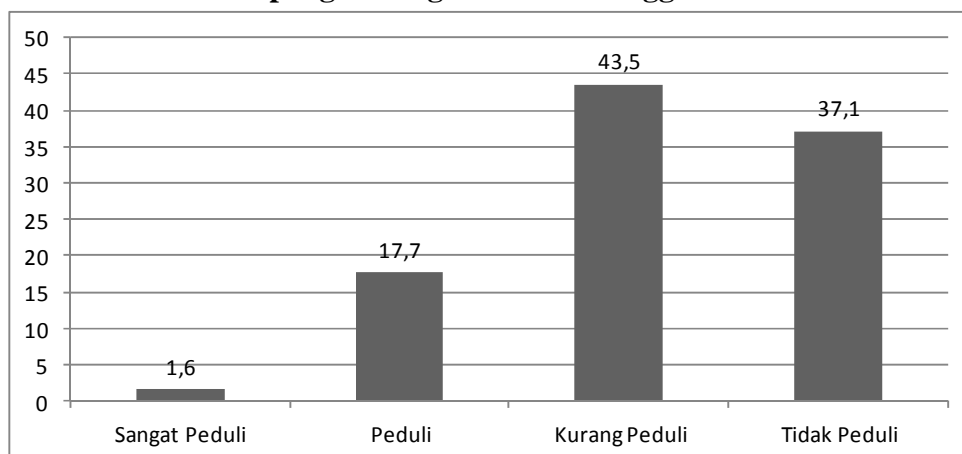
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.10)

Berdasarkan diagram 4.11 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 62,9% ((39 pengusaha) memilih kurang komitmen, dan 14,5% (9 pengusaha) memilih tidak komitmen, yang berarti sebanyak 48 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap komitmen Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan, padahal komitmen diperlukan agar Disperindagkop menjadi lebih bertanggung – sungguh menjalankan tugasnya.

Sedangkan sebanyak 17,7% (11 pengusaha) menilai komitmen dan 4,8% (3 pengusaha) menilai sangat komitmen, yang berarti 14 responden dari 62 responden cenderung memberi penilaian positif terhadap komitmen Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan. Hal itu dikarenakan ada

sebagian pengusaha UMKM Unggulan merasakan komitmen Disperindagkop dalam menjalankan tugasnya sebagai pengembang UMKM Unggulan.

Diagram 4.12
Kepedulian Disperindagkop terhadap masalah-masalah dalam pengembangan UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.11)

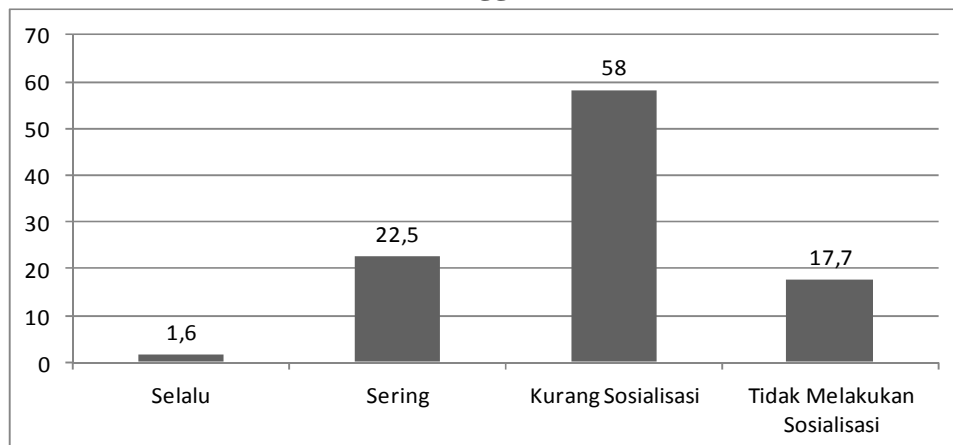
Berdasarkan diagram 4.12 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% (27 pengusaha) memilih kurang peduli, dan 37,1% (23 pengusaha) memilih tidak peduli, yang berarti sebanyak 50 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kepedulian Disperindagkop dalam menghadapi masalah – masalah yang terjadi dalam pengembangan UMKM Unggulan. Sebagian besar pengusaha UMK Unggulan menyatakan bahwa tiap ada permasalahan yang terjadi, pengusaha sendiri yang menghadapi dan mencari solusi tanpa ada campur tangan Diperindagkop. Misalnya dalam hal kekurangan modal, para pengusaha memutar otak bagaimana caranya kekurangan modal tersebut bisa teratasi dengan mencari pinjaman – pinjaman baik pinjaman dari pihak perkreditan maupun pinjaman dari kerabat dekat.

Sedangkan penilaian sebaliknya yang cenderung positif yaitu sebanyak 17,7% (11 pengusaha) menilai peduli dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat peduli. Hal itu dikarenakan ada sebagian pengusaha UMKM Unggulan merasakan kepedulian yang ditunjukkan secara langsung. Akan tetapi pada dasarnya kebanyakan pengusaha merasakan ketidakpedulian Disperindagkop, karena dalam setiap permasalahan yang muncul dalam menjalankan usaha ada saja kendala yang datang pihak Disperindagkop tak menunjukkan kepeduliannya semisal menanyakan masalah atau mencari solusi terbaik.

4.4.1.2 Perilaku yang muncul dalam interaksi

Indikator perilaku yang muncul dalam interaksi sosial yang dimaksud adalah apa saja yang terjadi saat interaksi yang berkenaan dengan kemitraan atau kerjasama tersebut. Yaitu adanya praktek kegiatan, adanya konflik atau masalah yang terjadi saat praktek kegiatan tersebut, adanya pemecahan masalah dan penilaian dari segala perilaku yang muncul dalam kegiatan tersebut. Berikut diagram hasil jawaban responden yang berkenaan dengan perilaku yang muncul dalam interaksi.

Diagram 4.13
Sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan UMKM
Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.12)

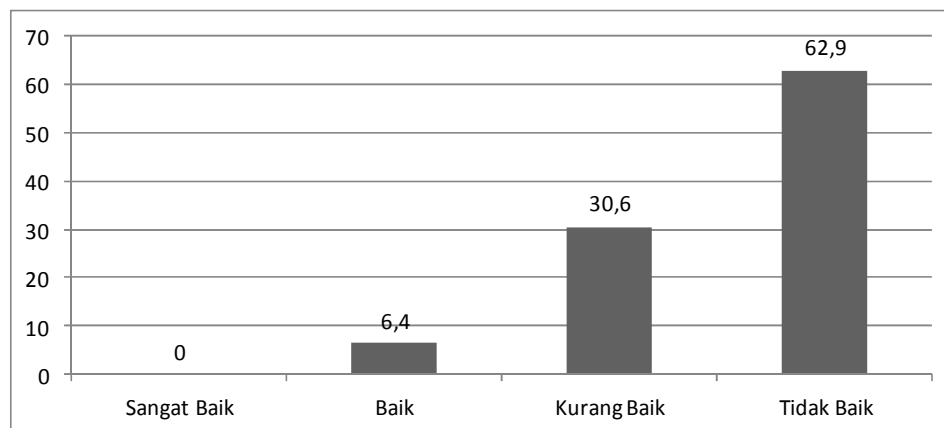
Berdasarkan diagram 4.13 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 58% (36 pengusaha) memilih kurang sosialisidan 17,7% (11 pengusaha) memilih tidak melakukan sosialisasi, yang berarti sebanyak 47 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung member penilaian negatif terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop mengenai kegiatan pengembangan usaha unggulan. Pengusaha menyatakan sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop tidak banyak yang mengetahui, hanya pengusaha – pengusaha tertentu yang mendapatkan sosialisasi, itupun pengusaha yang mengetahui tidak member tahu. Sehingga pemerataan akan sosialisasi kurang optimal dilakukan.

Sedangkan penilaian sebaliknya yang cenderung positif dinilai oleh pengusaha sebanyak 22,5% (14 pengusaha) menilai sering, Pengusaha menyatakan seringnya sosialisasi yang dilakukan Disperindagkop dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Unggulan dan 1,6%

pengusaha memilih selalu diberikan sosialisasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Unggulan, seperti pada pengusaha UMKM yang sudah maju, sedangkan sebagian besar UMK Unggulan yang kurang maju malah kurang mendapatkan sosialisai, padahal UMKM Unggulan yang kurang maju dan berkembanglah yang perlu dibantu dan diikutsertakan dalam setiap kegiatan agar ikut berkembang dan maju.

Diagram 4.14

Pendampingan Disperindagkop terhadap pengusaha UMKM Unggulan

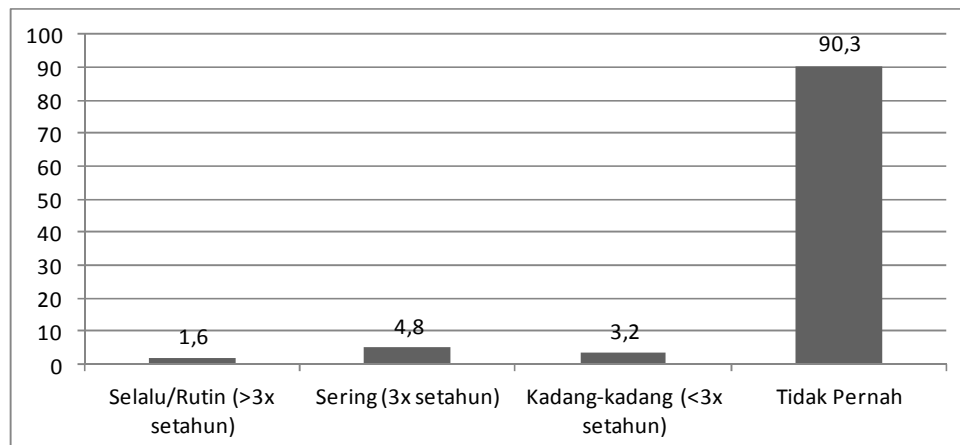


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.13)

Berdasarkan diagram 4.14 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 62,9% (39 pengusaha) menilai tidak baik, dan 30,6% (19 pengusaha) menilai kurang baik, yang berarti sebanyak 58 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendampingan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Serang. Hal itu berkaitan dengan pendampingan yang tidak dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan, misalnya pendampingan dalam peminjaman modal pada pihak ketiga (kreditur) yang dilakukan sendiri tanpa ada pihak Disperindagkop untuk mendampingi.

Sedangkan sisanya memberi penilaian sebaliknya yang cenderung positif yaitu sebanyak 6,4% (4 pengusaha) memberi penilaian baik terhadap pendampingan yang dilakukan Disperindagkop, hal itu berkaitan pengusaha tersebut merasakan bahwa Disperindagkop melakukan pendampingan pada pengembangan usahanya.

Diagram 4.15
Intensitas pendampingan yang dilakukan disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan

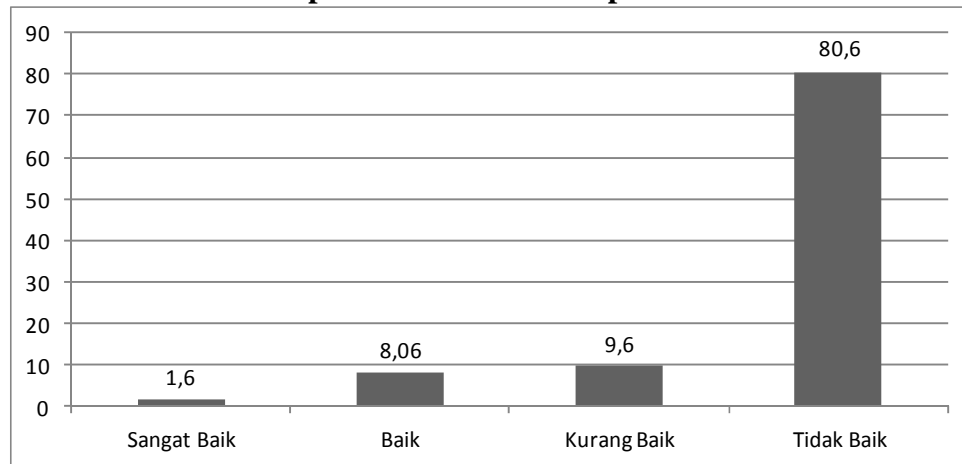


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.14)

Berdasarkan diagram 4.15 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 90,3% memilih tidak pernah, berarti sebanyak 56 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha menyatakan tidak pernah merasakan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Disperindagkop, seperti poin sebelumnya yang menyatakan bahwa pengusaha UMKM Unggulan berdiri sendiri tanpa ada pendampingan yang dilakukan pada setiap peminjaman yang dilakukan ke pihak kreditur.

Sedangkan sisanya sebanyak 6 pengusaha UMKM Unggulan pernah merasakan adanya pendampingan yang dilakukan Disperindagkop.

Diagram 4. 16
Tempat atau lokasi untuk pemasaran



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.15)

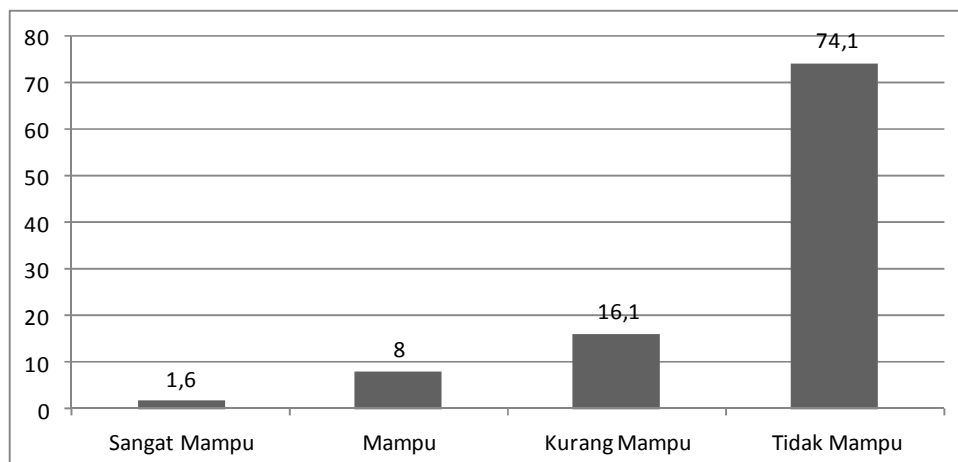
Berdasarkan diagram 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 80,6% (50 pengusaha) memilih tidak baik, dan 9,6% (6 pengusaha) memilih kurang baik, yang berarti sebanyak 56 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap fasilitas tempat atau lokasi yang disediakan oleh Disperindagkop. Hal itu berkaitan dengan tempat yang ada untuk memasarkan produk diusahakan sendiri oleh para pengusaha, seperti memanfaatkan pasar – pasar tradisional, sedangkan pasar modern kebanyakan pengusaha UMKM Unggulan belum memanfaatkan karena banyak faktor – faktor yang dirasakan salah satu sulitnya produk UMKM Unggulan menembus pasar modern.

Sedangkan sisanya memberi penilaian sebaliknya yang cenderung positif terkait fasilitas yang diberikan oleh Disperindagkop. Yaitu sebanyak 8,06% (5 pengusaha) menilai baik dan 1,6% pengusaha memilih sangat baik. Hal itu berkaitan dengan intensitas dalam berinteraksi oleh Disperndagkop menjadikan

pengusaha ini menjadi lebih mudah memasarkan produk karena mendapatkan *link* dari Disperindagkop untuk memasarkan produk.

Diagram 4.17

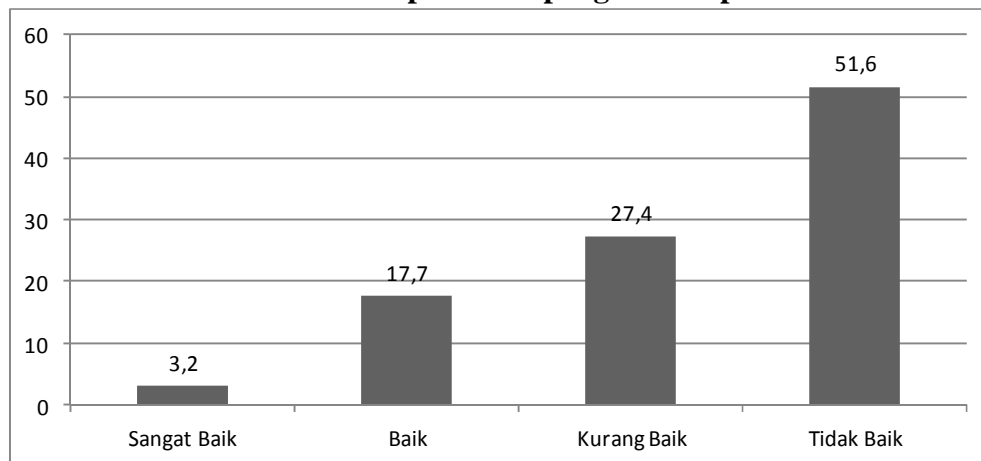
Lokasi atau tempat yang disediakan Disperindagkop mampu menunjang kegiatan usaha



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.16)

Berdasarkan diagram 4.17 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 74,1% (46 pengusaha) memilih tidak mampu, dan 16,1% (10 pengusaha) memilih kurang mampu, yang berarti sebanyak 56 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kemampuan lokasi yang diberikan Disperindagkop dalam menunjang kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan pihak Disperindagkop tidak pernah memberikan fasilitas tempat atau lokasi untuk memasarkan produk – produk UMKM Unggulan, sehingga pengusaha merasakan ketidakmampuan tempat atau lokasi yang disediakan Disperindagkop dalam menunjang kegiatan usaha. Sedangkan sisanya menyatakan sebaliknya, yaitu sebanyak 9,6% menyatakan bahwa Disperindagkop mampu memberikan lokasi yang menunjang kegiatan usaha.

Diagram 4.18
Pendidikan dan pelatihan pengemasan produk

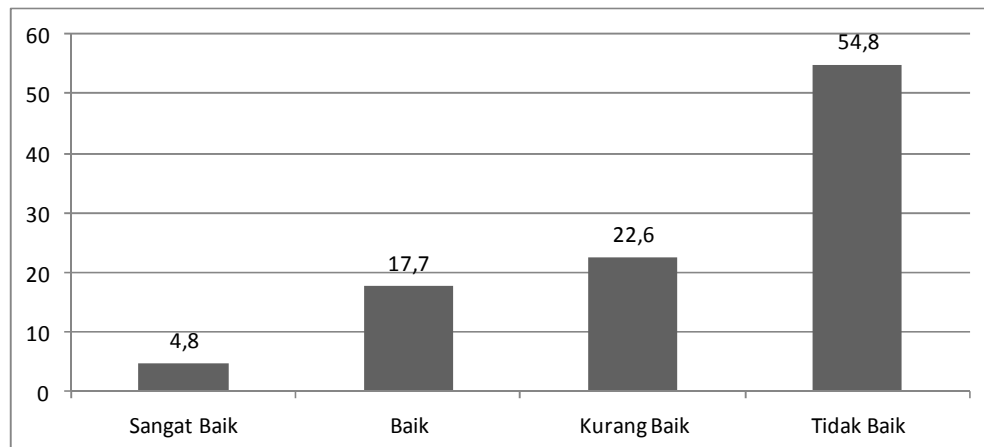


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.18)

Berdasarkan diagram 4.18 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 51,6% memilih tidak baik, dan 27,4% memilih kurang baik, berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendidikan dan pelatihan pengemasan produk yang dilakukan Disperindagkop. Hal itu dikarenakan sebagian besar pengusaha UMKM Unggulan tidak merasakan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut. Padahal pelatihan dan pendidikan tentang pengemasan perlu dilakukan secara merata kesemua pengusaha UMKM Unggulan agar produk yang ada terlihat lebih menarik dan tidak kalah dengan produk – produk yang ada di pasar modern.

Sedangkan penilaian sebaliknya yang cenderung positif yaitu sebanyak 17,7% menyatakan pelatihan dan pendidikan yang baik karena pengusaha sering diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 3,2% memilih sangat baik, karena UMKM Unggulan yang sudah cukup maju selalu diundang jika ada pelatihan dan pendidikan.

Diagam 4.19
Pendidikan dan pelatihan tentang pembuatan label halal



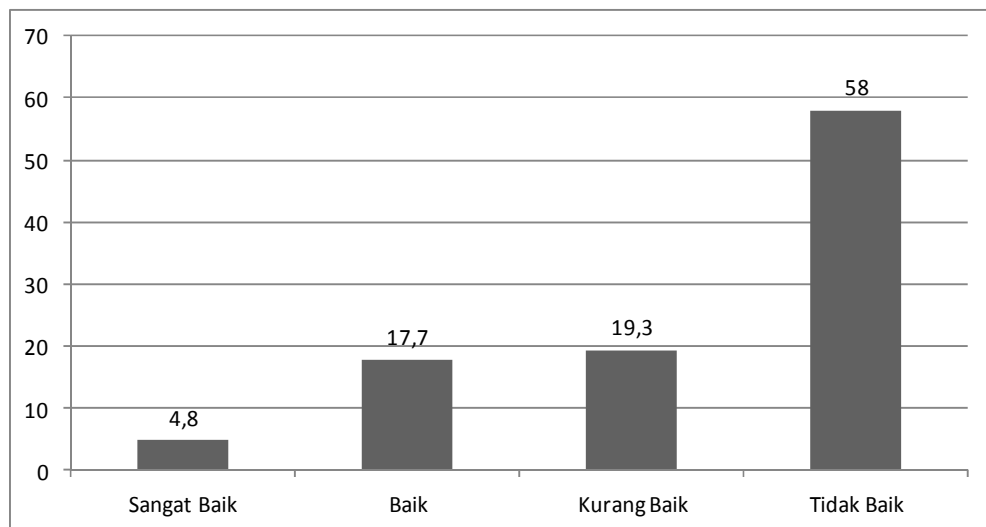
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.19)

Berdasarkan diagram 4.19 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 54,8% (34 pengusaha) memilih tidak baik, dan 22,6% (14 pengusaha) memilih kurang baik, berarti sebanyak 48 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendidikan dan pelatihan tentang pembuatan label halal yang dilakukan Disperindagkop Kota Serang. Hal itu dikarenakan sebagian besar pengusaha tidak merasakan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut. Padahal pelatihan dan pendidikan tentang pembuatan label halal perlu dilakukan kesemua pengusaha UMKM Unggulan secara merata agar produk yang ada menjadi salah satu produk yang terjamin kehalalannya. Sehingga masyarakat sebagai konsumen merasakan aman dan tidak ragu akan kehalalan suatu produk yang telah memiliki label. Tapi pada kenyataan di lapangan, pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh Disperindagkop tidak nyata terasa, padahal pengusaha UMKM jika ada kegiatan seperti itu cukup antusias mengikuti.

Sedangkan penilaian sebaliknya yang cenderung positif diberikan para sebagian kecil pengusaha, yaitu sebanyak 17,7% (11 pengusaha) menilai pelatihan dan pendidikan pembuatan label halal yang dilakukan oleh Disperindagkop dianggap baik, hal itu dikarenakan pengusaha UMKM Unggulan yang cukup dikenal usahanya dan maju sering diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 4,8% memilih sangat baik, karena UMKM Unggulan yang sudah mapan dan lengkap sebagai produk yang memenuhi standar selalu diundang jika ada pelatihan dan pendidikan.

Diagram 4.20

Pendidikan dan pelatihan pemasaran produk



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.20)

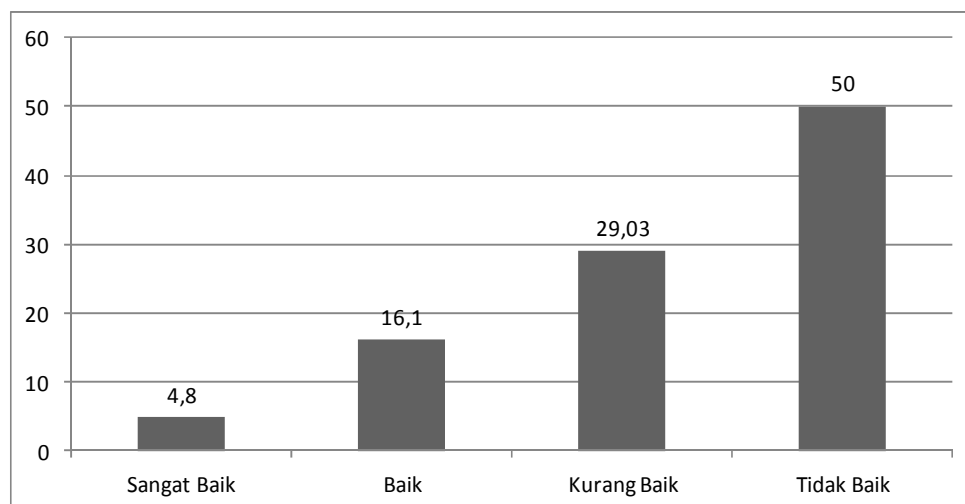
Berdasarkan diagram 4.20 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 58% (36 pengusaha) memilih tidak baik dan 19,3% (12 pengusaha) menilai kurang baik, yang berarti sebanyak 48 pengusaha dari 62 pengusaha UMKM Unggulan cenderung memberi penilaian negatif. Hal itu berkaitan dengan pemasaran yang

dilakukan adalah atas hasil usaha sendiri para pengusaha tanpa ada pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh dinas terkait.

Sedangkan sebanyak 17,7% menilai pelatihan dan pendidikan tentang pemasaran produk yang dilakukan oleh Disperindagkop dianggap baik, hal itu dikarenakan pengusaha UMKM Unggulan yang cukup dikenal usahanya dan maju sering diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 4,8% memilih sangat baik, karena UMKM Unggulan yang sudah mapan dan lengkap sebagai produk yang memenuhi standar selalu diundang jika ada pelatihan dan pendidikan.

Diagram 4.21

Pendidikan dan pelatihan tentang manajemen wirausaha



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.21)

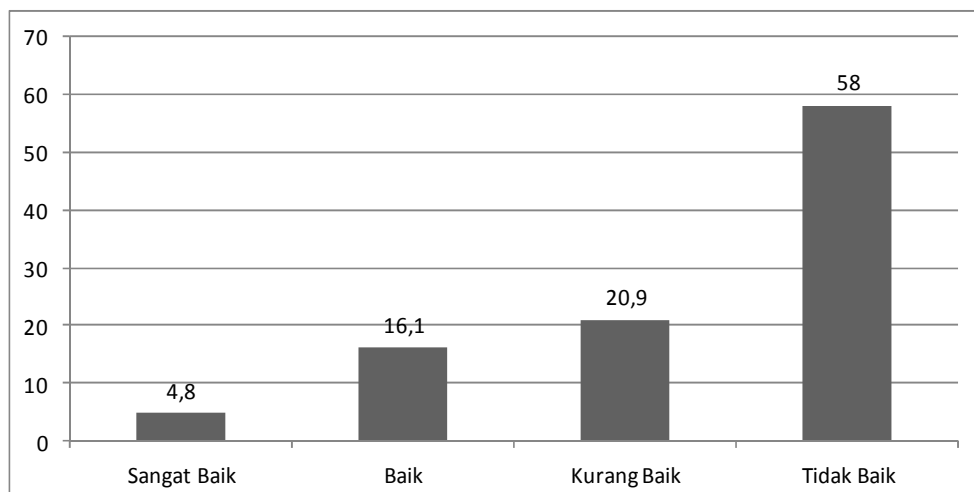
Berdasarkan diagram 4.21 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50% (31 pengusaha) menilai tidak baik, dan 29,03% (18 pengusaha) memilih kurang baik, berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendidikan dan pelatihan tentang manajemen

wirausaha yang dilakukan oleh Disperindagkop. Hal itu dikarenakan sebagian besar pengusaha tidak merasakan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut. Pengusaha UMKM Unggulan menjalankan usahanya dengan ilmu seadanya tanpa ada manajemen wirausaha yang baik.

Sedangkan penilaian sebaliknya yang cenderung positif oleh pengusaha, yaitu sebanyak 16,1% (10 pengusaha) menilai pelatihan dan pendidikan tentang manajemen wirausaha yang dilakukan oleh Disperindagkop dianggap baik, hal itu dikarenakan pengusaha UMKM Unggulan yang cukup dikenal usahanya dan maju sering diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 4,8% memilih sangat baik, karena UMKM Unggulan yang sudah mapan dan lengkap sebagai produk yang memenuhi standar selalu diundang jika ada pelatihan dan pendidikan.

Diagram 4.22

Pendidikan dan pelatihan tentang nomor seri makanan atau P-IRT

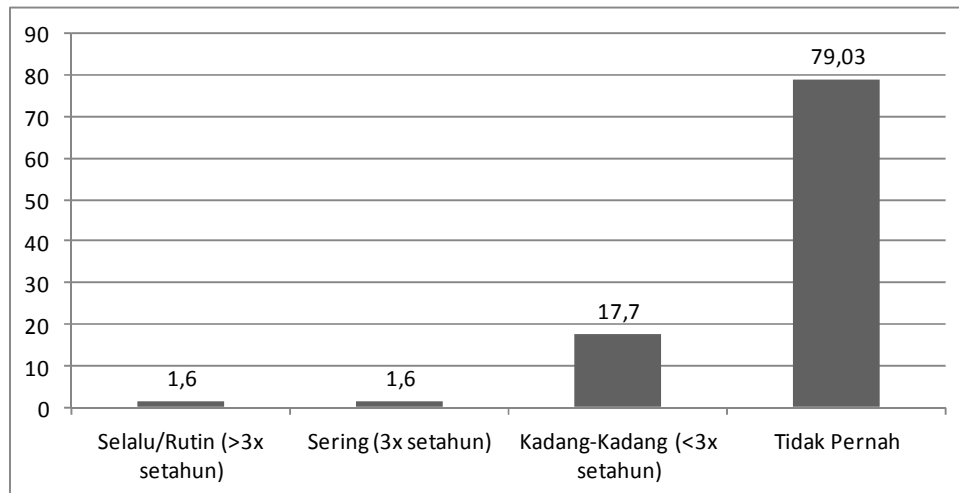


Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.22)

Berdasarkan diagram 4.22 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 58% memilih tidak baik, dan 20,9% memilih kurang baik, berarti sebanyak 54 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendidikan dan pelatihan tentang nomor seri makanan atau P-IRT. Hal itu dikarenakan sebagian besar tidak merasakan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut. Sebagian besar produk UMKM Unggulan belum memiliki nomor P-IRT. Padahal pelatihan dan pendidikan tentang pembuatan nomor seri makanan perlu dilakukan secara merata kesemua pengusaha UMKM Unggulan agar produk yang ada menjadi salah satu produk yang terjamin kualitas dan mendapat izin dari pemerintah, dan dapat menembus pasar modern.

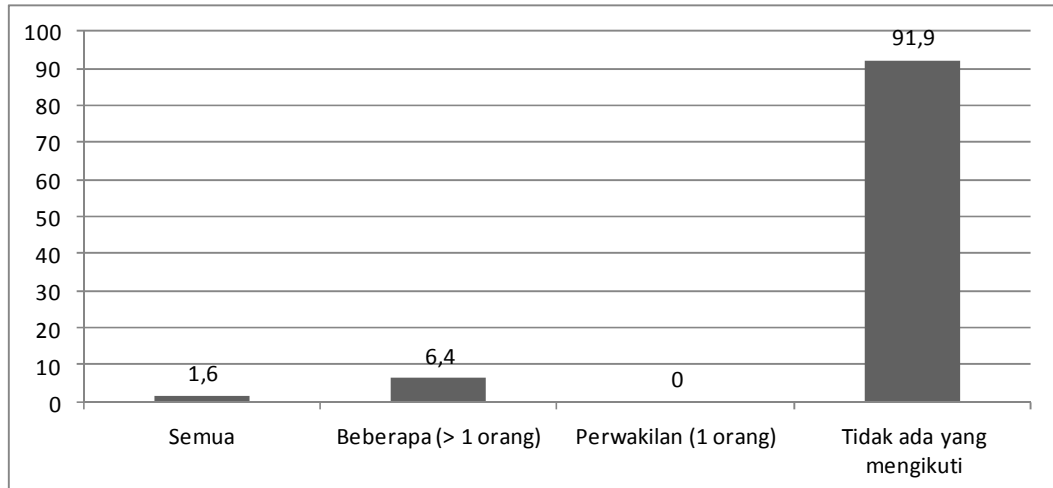
Sedangkan sebanyak 16,1% menyatakan pendidikan dan pelatihan pembuatan nomor seri yang dilakukan oleh Disperindagkop dianggap baik, hal itu dikarenakan pengusaha UMKM Unggulan yang cukup dikenal usahanya dan maju sering diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 4,8% memilih sangat baik, karena UMKM Unggulan yang sudah mapan dan lengkap sebagai produk yang memenuhi standar selalu diundang jika ada pendidikan dan pelatihan.

Diagram 4.23
Intensitas pendidikan dan pelatihan keseluruhan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.23)

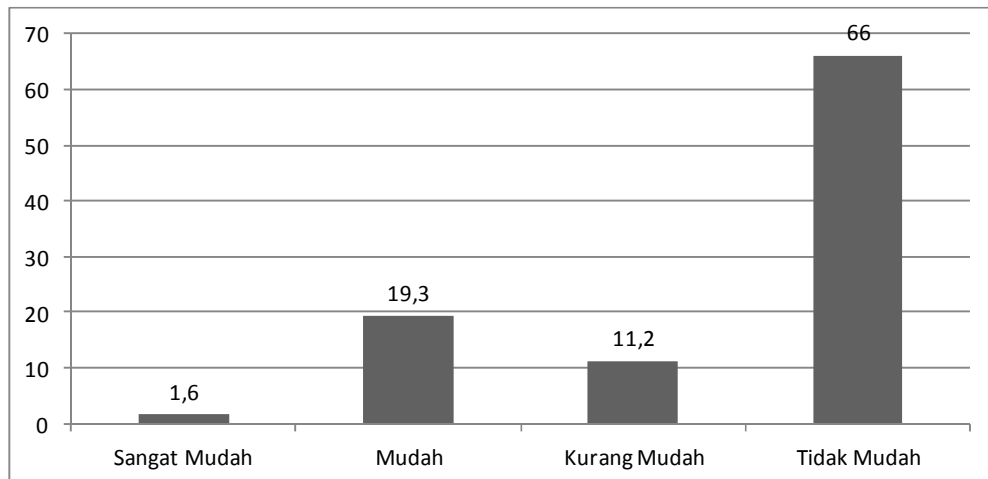
Berdasarkan diagram 4.23 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 79,03% menilai tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindagkop, sehingga tidak heran jika pada poin – poin sebelumnya angka penilaian yang cenderung tidak baik begitu mendominasi. Sedangkan sisanya sebanyak 25,9% menyatakan sebaliknya, yang berarti pengusaha UMKM Unggulan selalu, sering, dan kadang – kadang mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh Disperindagkop.

Diagram 4.24**Keikutsertaan karyawan pengusaha umkm dalam pendidikan dan pelatihan**

Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.24)

Berdasarkan diagram 4.24 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 91,9% memilih tidak ada yang mengikuti, hal tersebut karena Disperindagkop hanya mengikutsertakan pelaku UMKM Unggulan sebagian kecil saja, sisanya dibiarkan begitu saja, sehingga karyawan pun diabaikan dalam peningkatan kualitas sumber dayanya. Sedangkan sisanya sebanyak 8% menyatakan keikutsertaan karyawannya dalam pendidikan dan pelatihan. Keikutsertaannya karena UMKM Unggulan yang mengikuti adalah UMKM Unggulan yang sudah maju. Misalnya UMKM Unggulan sate bandeng dan kue satu maupun gipang.

Diagram 4.25
Praktek Dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.25)

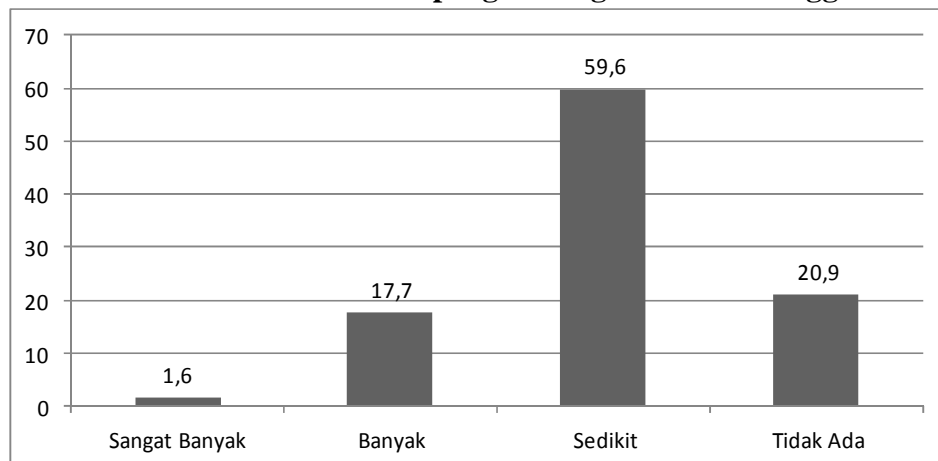
Berdasarkan diagram 4.25 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 66% (41 pengusaha) menilai tidak mudah dan 11,2% (7 pengusaha) menilai kurang mudah, yang berarti sebanyak 48 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap praktek dari kegiatan pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Unggulan yang dilakukan oleh Disperindagkop. Hal tersebut berkaitan dengan tidak meratanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindagkop sehingga pada akhirnya pengusaha menilai hal tersebut dengan penilaian negatif dan didominasi oleh penilaian tidak mudahnya mengimplementasikan suatu pendidikan dan pelatihan karena kebanyakan pengusaha tidak merasakan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut.

Sedangkan sisanya sebanyak 16 pengusaha menyatakan mudah dan sangat mudah untuk mempraktekkan pendidikan dan pelatihan yang didapatkan karena

yang menyatakan tersebut adalah pengusaha – pengusaha UMKM Unggulan yang sudah maju dan sering diundang dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan tersebut.

Diagram 4.26

Hambatan – hambatan pengembangan UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.27)

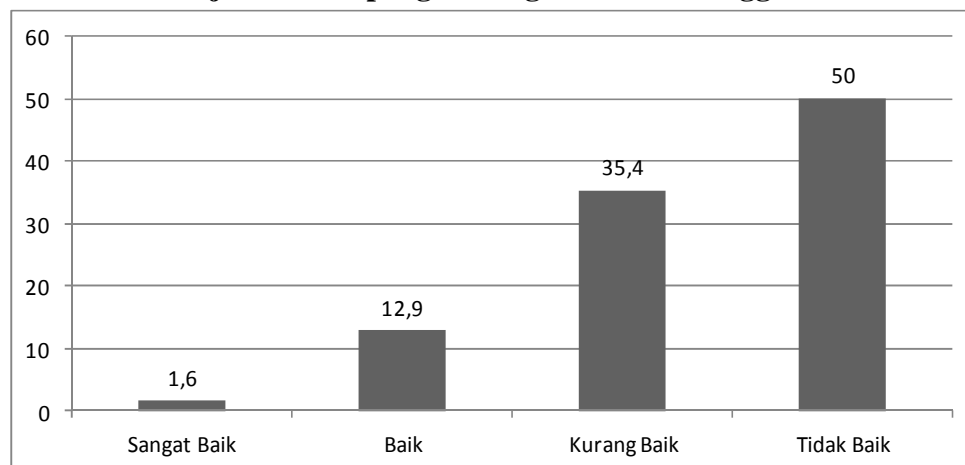
Berdasarkan diagram 4.26 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 59,6% (37 pengusaha) menilai sedikit hambatan – hambatan dalam pengembangan UMKM Unggulan yang dijalani, dalam pertanyaan ini terdapat pertanyaan yang terbuka berkaitan tentang hambatan apa saja yang dirasakan, kebanyakan menyatakan bahwa hambatan yang sering dirasakan adalah modal yang kurang, bahan baku untuk memproduksi suatu barang yang akan dipasarkan.

Sedangkan sebanyak 20,9% pelaku UMKM Unggulan memilih tidak ada hambatan dalam pengembangan usahanya. Pelaku UMKM Unggulan yang memilih tidak ada hambatan karena UMKM tersebut terbilang maju dan bisa konsisten menjalani usahanya untuk mengembangkan UMKM, misalnya UMKM

Unggulan sate bandeng, kue satu dan kue gipang, dan sebagian kecil Industri emping. Sedangkan sebesar 16,1% memilih banyak dan 1,6% memilih sangat banyak, akan tetapi pengusaha sebagian besar menyatakan kurang modal, pemasaran produk, dan ketersediaan bahan baku yang paling banyak diungkapkan oleh pengusaha.

Diagram 4.27

Upaya disperindagkop dalam menyelesaikan hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengembangan UMKM Unggulan



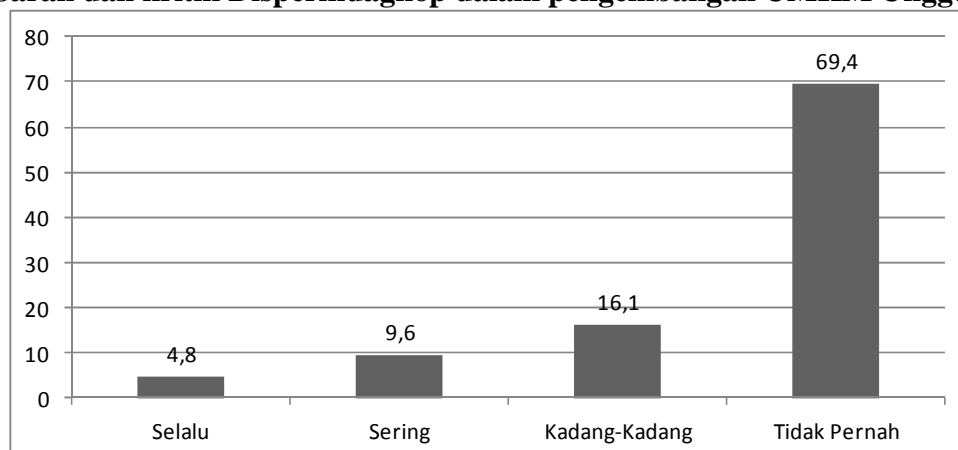
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.28)

Berdasarkan diagram 4.27 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 50% responden memilih tidak baik dan 35,4% memilih kurang baik, yang berarti sebanyak 53 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap upaya Disperindagkop dalam menyelesaikan hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengembangan UMKM Unggulan. Hal itu berkaitan dengan tugas Disperindagkop yang kurang berjalan, sehingga belum ada upaya konkret dari Disperindagkop dalam menangani hambatan –hambatan yang dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan.

Sedangkan sisanya sebanyak 9 pengusaha menilai baik bahkan adapula yang memilih sangat baik terhadap upaya yang telah dilakukan Disperindagkop terhadap hambatan- hambatan yang dirasakan oleh pelaku UMKM Unggulan.

Diagram 4.28

Saran dan kritik Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.29)

Berdasarkan diagram 4.28 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 69,4% (43 pengusaha) menilai tidak pernah mendapatkan masukan – masukan berupa saran dan kritik dalam pengembangan UMKM Unggulan, para pelaku UMKM Unggulan menyatakan bahwa Disperindagkop tidak pernah berkunjung untuk memberikan kritik saran yang membangun bagi pengembangan UMKM Unggulan.

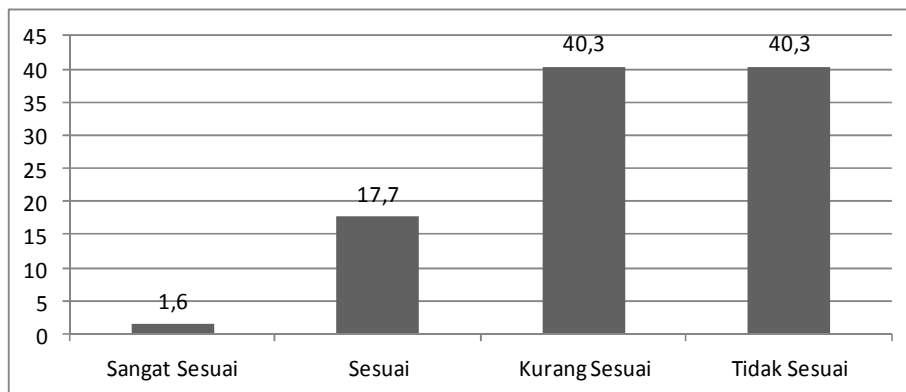
Sedangkan sisanya sebanyak 18 pengusaha menyatakan sebaliknya, hal itu membuktikan bahwa tidak semua pelaku UMKM Unggulan dari 62 pengusaha mendapatkan perhatian dari Disperindagkop untuk masukan – masukan yang membangun dalam pengembangan UMKM Unggulan, hanya beberapa UMKM Unggulan yang mendapat perhatian khusus seperti UMKM Unggulan yang sudah maju.

4.4.1.3 Kedudukan orang – orang dalam perilaku

Indikator ini menjelaskan bagaimana kesesuaian antara jabatan atau kedudukan orang – orang (kelompok) dengan tugasnya. Berikut diagram hasil jawaban responden yang berkenaan dengan kedudukan orang – orang dalam perilaku:

Diagram 4.29

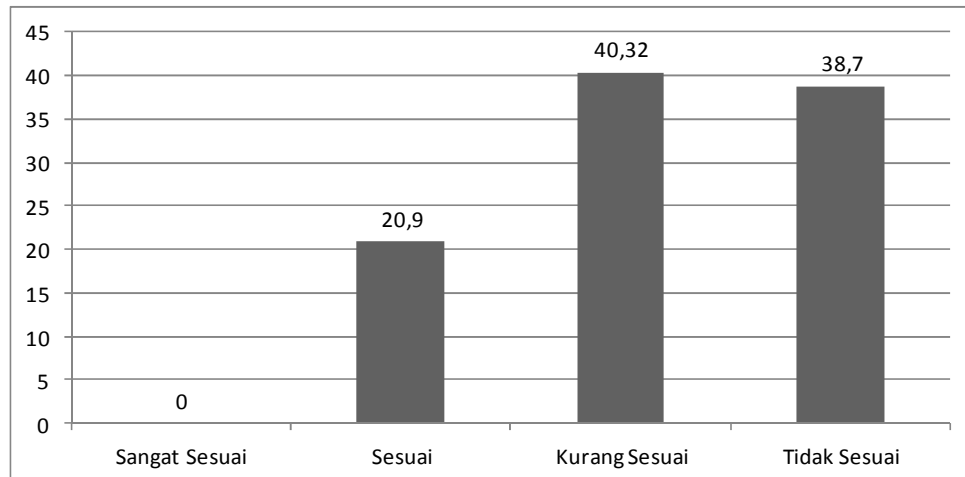
Pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.30)

Berdasarkan diagram 4.29 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 40,3% (25 pengusaha) menilai kurang sesuai dan 40,3% (25 pengusaha) menilai tidak sesuai, yang berarti sebanyak 50 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM Unggulan. Hal itu dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM Unggulan yang merasa tidak pernah ada pendampingan yang dilakukan oleh Disperindagkop dalam pengembangan usaha. Sedangkan sisanya sebanyak 12 pengusaha menyatakan sesuai bahkan ada yang memilih sangat sesuai karena Disperindagkop mendampingi UMKM Unggulan yang sudah maju.

Diagram 4.30
Sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan UMKM
Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.31)

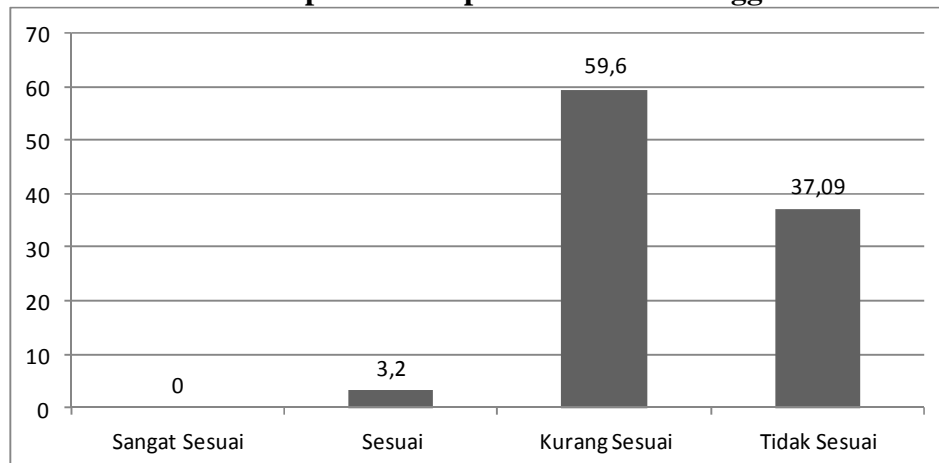
Berdasarkan diagram 4.30 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 38,7% (24 pengusaha) menilai tidak sesuai dan 40,32% (25 pengusaha) memilih kurang sesuai, yang berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap tugas Disperindagkop dalam memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan pengembangan UMKM Unggulan. Hal itu dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM Unggulan yang merasa tidak pernah ada sosialisasi atau informasi terkait kegiatan pengembangan UMKM Unggulan oleh Disperindagkop.

Sedangkan sisanya sebanyak 20,9% (13 pengusaha) cenderung memberikan penilaian positif terhadap sosialisasi yang diberikan oleh Disperindagkop terkait kegiatan pengembangan UMKM Unggulan, pengusaha tersebut menilai sosialisasi yang dilakukan Disperindagkop sudah sesuai dengan

tugasnya. Misalnya sosialisasi adanya pendidikan dan pelatihan, adanya pameran – pameran dan lain sebagainya.

Diagram 4.31

Fasilitas pemasaran produk UMKM Unggulan



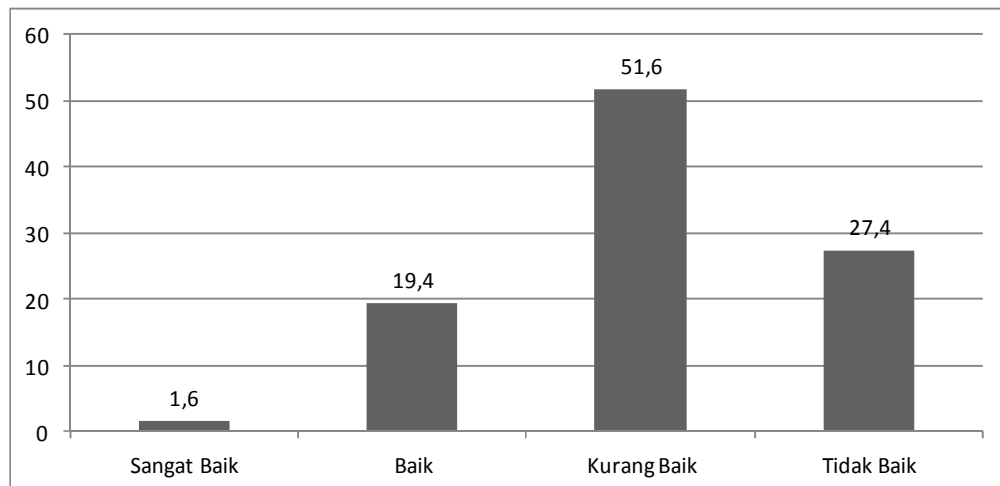
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.32)

Berdasarkan diagram 4.31 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 59,6% (37 pengusaha) menilai kurang sesuai dan 37,09% (23 pengusaha) menilai tidak sesuai, yang berarti sebanyak 60 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap fasilitas pemasaran produk yang dilakukan oleh Disperindagkop, hal itu dikarenakan pelaku UMKM Unggulan tidak merasa diberikan fasilitas dalam hal pemasaran, baik berupa tempat ataupun tawaran kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan UMKM Unggulan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 3,2% (2 pengusaha) cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai fasilitas pemasaran produk sudah sesuai dilakukan oleh Disperindagkop, hal itu dikarenakan pengusaha tersebut merasakan usaha yang dijalankan sudah maju,

walaupun pada dasarnya pengusaha mengakui fasilitas pemasaran produk seperti tempat pemasaran tidak disediakan oleh Disperindagkop.

Diagram 4.32
Kerjasama Disperindagkop dengan pelaku UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.33)

Berdasarkan diagram 4.32 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 51,6% (32 pengusaha) menilai kurang baik dan 27,4% (17 pengusaha) menilai tidak baik, yang berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Disperindagkop dengan para pelaku UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pengusaha kurang merasakan kerjasama semisal adanya kemitraan dengan pihak ketiga seperti kemitraan dengan pemilik pasar modern untuk memasarkan produk UMKM Unggulan agar lebih dikenal, maju dan berdaya saing, akan tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh para pengusaha UMKM Unggulan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 19,4% (12 pengusaha) menilai baik dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat baik,

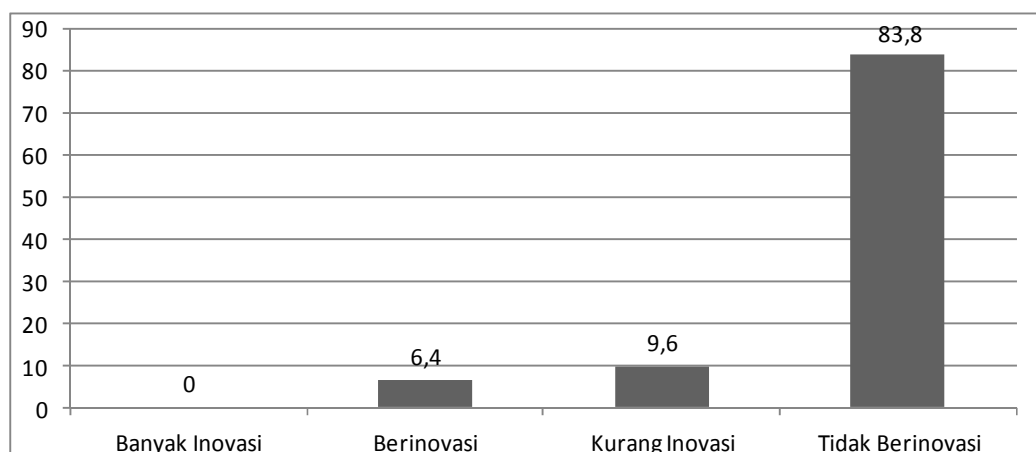
berarti sebanyak 13 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai kerjasama yang dilakukan oleh Disperindagkop sudah baik dilakukan, walau pada dasarnya penilaian tersebut cenderung kurang dapat dibuktikan secara nyata bahwa kerjasama yang dilakukan Disperindagkop berjalan baik.

4.4.1.4 Kaitan antara orang dan perilaku

Indikator kaitan antara orang dan perilaku yang dimaksud adalah profesionalisme pekerjaan sesuai posisi dalam hal ini bagaimana orang –orang tersebut berperilaku, jadi perilaku yang muncul tersebut dikaitkan dengan orang – orang (aktor dan sasaran). Berikut diagram hasil jawaban responden yang berkenaan dengan indikator kaitan antara orang dan perilaku:

Diagram 4.33

Inovasi Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.34)

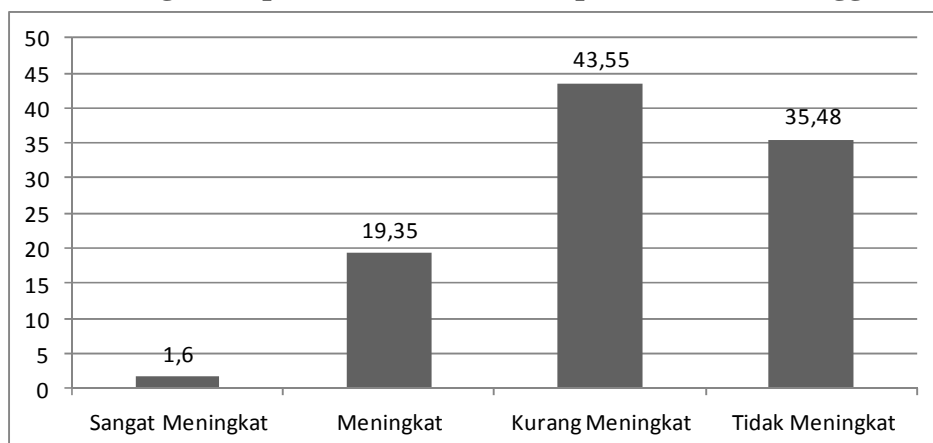
Berdasarkan diagram 4.33 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 9,6% (6 pengusaha) menilai kurang inovasi dan 83,8% (52 pengusaha) menilai tidak

berinovasi, yang berarti sebanyak 59 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap inovasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dalam pengembangan UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pengusaha tidak merasakan inovasi yang dilakukan Disperindagkop.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 6,4% (4 pengusaha) menilai bahwa Disperindagkop telah berinovasi terhadap pengembangan UMKM Unggulan, inovasi yang dilakukan Disperindagkop adalah memberikan masukan – masukan berupa hasil produksi UMKM Unggulan yang lain dari pada yang lain, yaitu dari segi rasa menjadi bermacam – macam rasa. Akan tetapi secara prakteknya inovasi tersebut belum terwujud karena masih berupa masukan – masukan dari Disperindagkop.

Diagram 4.34

Peningkatan pendidikan wirausaha pelaku UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.35)

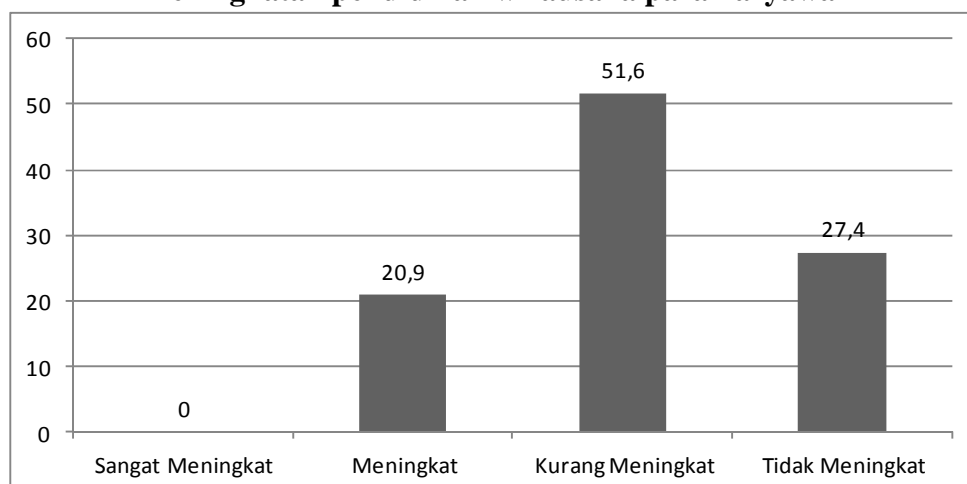
Berdasarkan diagram 4.34 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 43,55% (27 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 35,48% (22 pengusaha) menilai

tidak meningkat, yang berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap peningkatan pendidikan wirausaha para pengusaha UMKM Unggulan. Hal itu dikarenakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan kewirausahaan tidak dirasakan oleh para pengusaha UMKM Unggulan, sehingga menjadi wajar jika pendidikan berwirausaha para pengusaha UMKM Unggulan cenderung kurang meningkat.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 19,35% (12 pengusaha) menilai meningkat dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat meningkat, berarti sebanyak 13 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai pendidikan dan pelatihan yang didapatkan terkait kewirausahaan menjadikan pendidikan mengenai hal tersebut mengalami peningkatan.

Diagram 4.35

Peningkatan pendidikan wirausaha para karyawan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.36)

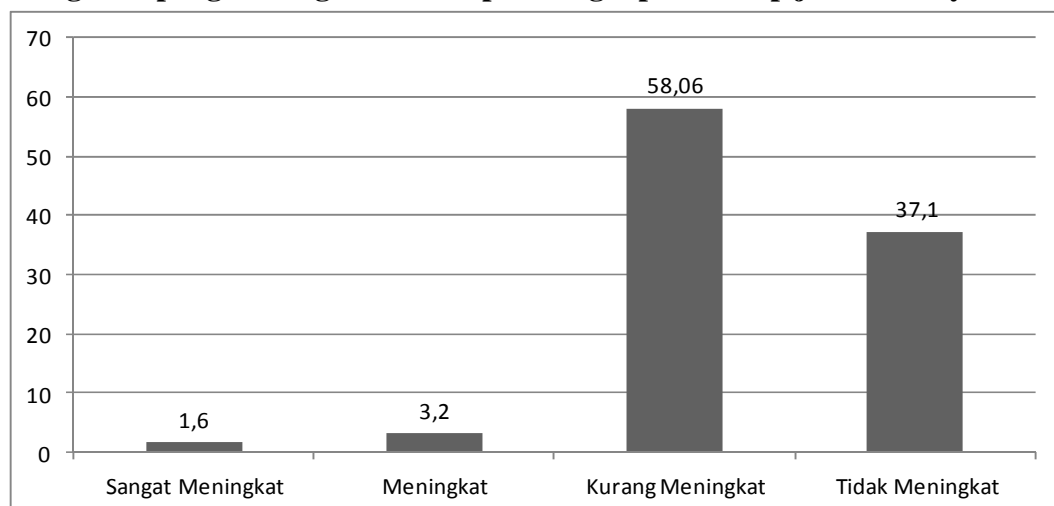
Berdasarkan diagram 4.35 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 51,6% (32 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 27,4% (17 pengusaha) menilai

tidak meningkat, yang berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap peningkatan pendidikan wirausaha para karyawan yang dimiliki oleh pengusaha UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pelatihan dan pendidikan yang tidak didapatkan oleh pengusaha UMKM Unggulan sehingga tidak bias menularkan pendidikan kewirausahaan kepada para karyawan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 20,9% (13 pengusaha) menilai meningkat, hal itu dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang didapat dari Disperindagkop dapat diaplikasikan salah satunya dengan menularkan ilmu yang didapat kepada para karyawan.

Diagram 4.36

Pengaruh pengembangan oleh Disperindagkop terhadap jumlah karyawan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.37)

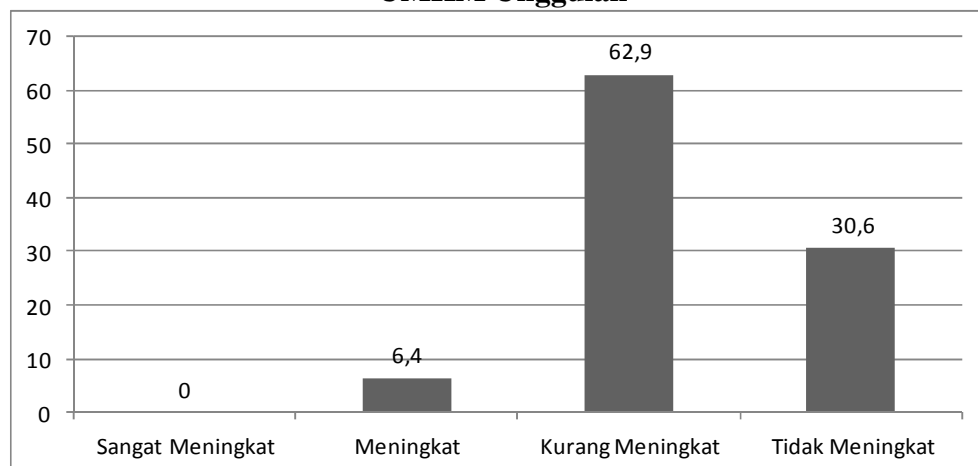
Berdasarkan diagram 4.36 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 58,06% (36 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 37,1% (23 pengusaha) menilai tidak meningkat, yang berarti sebanyak 59 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pengaruh

pengembangan UMKM Unggulan yang dilakukan oleh Disperindagkop terhadap jumlah karyawan pengusaha UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pengembangan yang dilakukan oleh Disperindagkop kurang dirasakan oleh pengusaha, sehingga jumlah karyawan kurang mengalami peningkatan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 3,2% (2 pengusaha) menilai meningkat dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat meningkat, berarti sebanyak 3 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai pengembangan UMKM Unggulan yang dilakukan Disperindagkop berpengaruh terhadap peningkatan jumlah karyawan.

Diagram 4.37

Pengaruh pengembangan oleh Disperindagkop terhadap modal pengusaha UMKM Unggulan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.38)

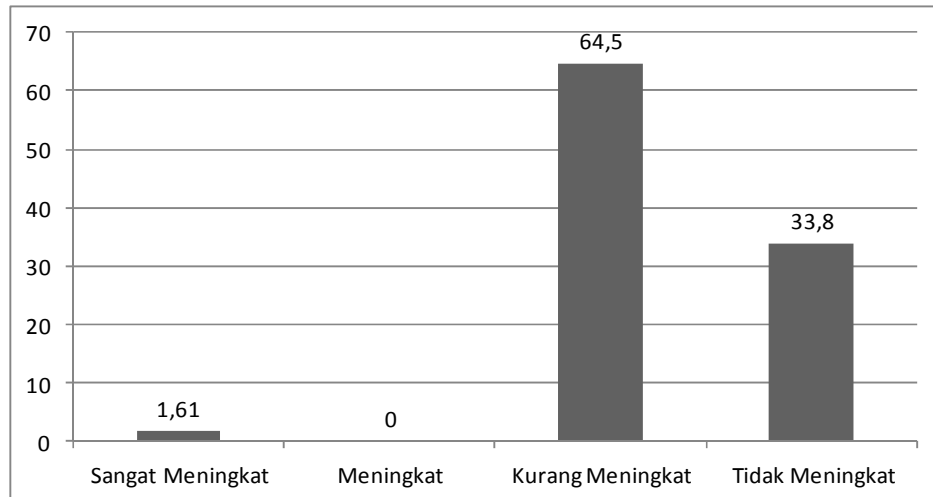
Berdasarkan diagram 4.37 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 62,9% (39 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 30,6% (19 pengusaha) menilai tidak meningkat, yang berarti sebanyak 58 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pengaruh

pengembangan UMKM Unggulan oleh Disperindagkop terhadap modal pengusaha UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pengembangan sebagai salah satu tugas pokok Dipserindagkop tidak dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan sehingga modal yang tersedia tidak mengalami peningkatan karena tidak mengalami pengaruh pengembangan tersebut.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 6,4% (4 pengusaha) menilai meningkat, pengusaha menilai pengembangan yang dilakukan Disperindagkop berpengaruh terhadap peningkatan modal usaha. Walaupun secara nyata belum ada bukti konkretnya.

Diagram 4.38

Pengaruh pengembangan oleh Disperindagkop terhadap omset usaha



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.39)

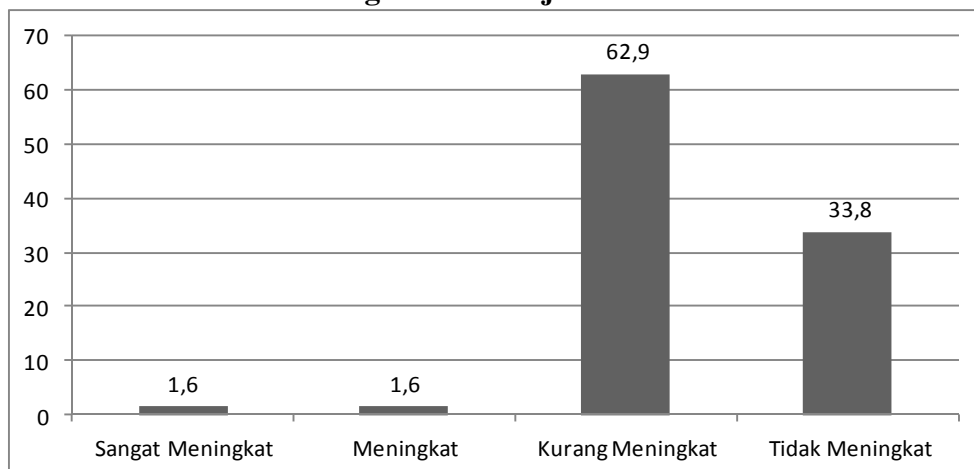
Berdasarkan diagram 4.38 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% (40 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 33,8% (21 pengusaha) menilai tidak meningkat, yang berarti sebanyak 61 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pengaruh

pengembangan oleh Disperindagkop terhadap omset usaha para pengusaha UMKM Unggulan, hal itu dikarenakan pengembangan yang dilakukan tidak dirasakan oleh pengusaha sehingga omset usaha tidak mengalami peningkatan karena tidak ada pengaruh yang diberikan oleh Disperindagkop.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat meningkat, pengusaha tersebut menilai pengembangan yang dilakukan Disperindagkop mempengaruhi omset usaha, sehingga omset pengusaha tersebut mengalami peningkatan.

Diagram 4.39

Peningkatan manajemen usaha



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.40)

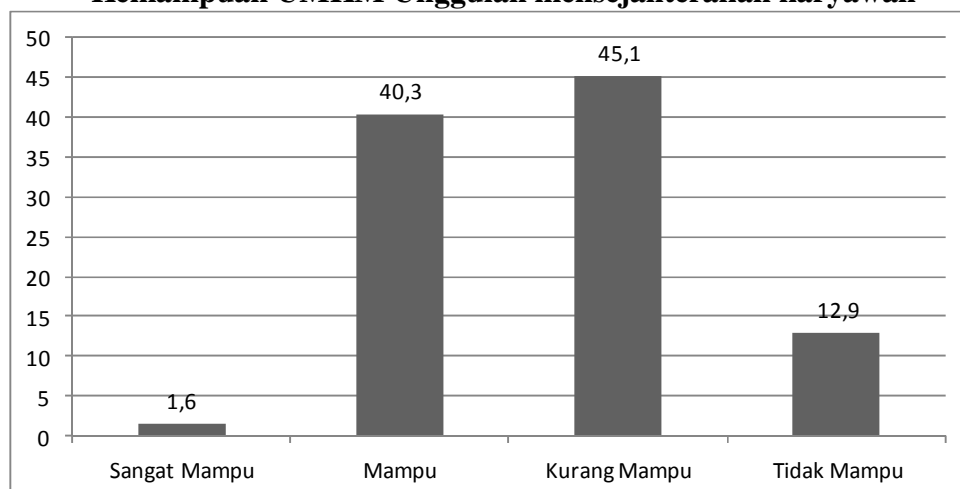
Berdasarkan diagram 4.39 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 62,9% (39 pengusaha) menilai kurang meningkat dan 33,8% (21 pengusaha) menilai tidak meningkat, yang berarti sebanyak 60 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap peningkatan manajemen usaha. Hal itu dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang cenderung kebanyakan

pengusaha tidak merasakan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen usaha, sehingga pengusaha tidak mengalami peningkatan dari segi manajemen usaha. Kebanyakan pengusaha masih menggunakan manajemen tradisional yang kurang optimal diterapkan di zaman yang penuh dengan persaingan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 1,6% (1 pengusaha) menilai meningkat dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat meningkat, berarti sebanyak 2 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai manajemen usahanya mengalami peningkatan sehingga usaha yang dilakuakn menjadi maju dan berkembang.

Diagram 4.40

Kemampuan UMKM Unggulan mensejahterakan karyawan



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.41)

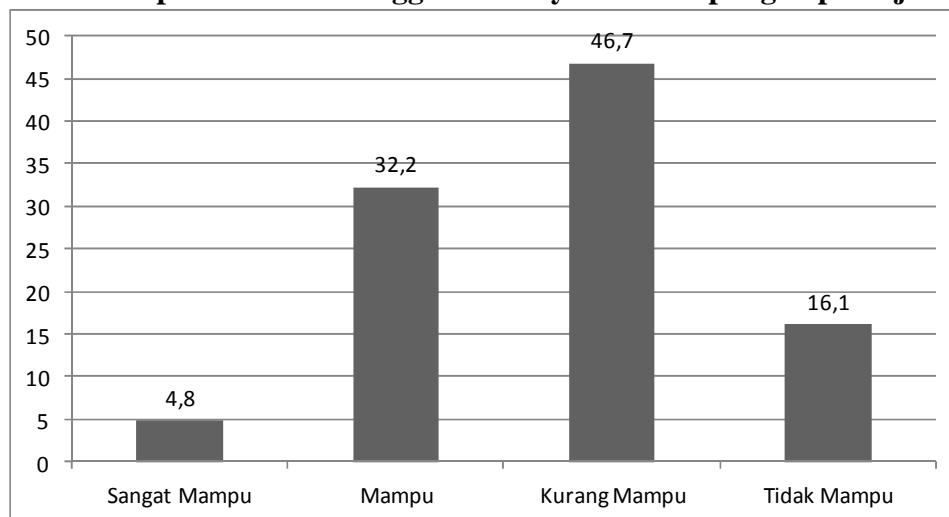
Berdasarkan diagram 4.40 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 45,1% (28 pengusaha) menilai kurang mampu dan 12,9% (8 pengusaha) menilai tidak mampu, yang berarti sebanyak 36 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kemampuan UMKM

Unggulan dalam memnsejahterakan karyawannya, hal itu berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh para pengusaha yang cenderung kecil, sehingga bayaran yang didapat karyawanpun belum mampu mensejahterakan kehidupan karyawan tersebut.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 40,3% (25 pengusaha) menilai mampu dan 1,6% (1 pengusaha) menilai sangat mampu, berarti sebanyak 26 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai usaha yang dilakukan mampu mensejahterakan karyawan karena omset atau pendapatan yang didapat pengusaha tersebut lumayan besar karena usaha yang dijalani sudah cukup maju.

Diagram 4.41

Kemampuan UMKM Unggulan menyediakan lapangan pekerjaan



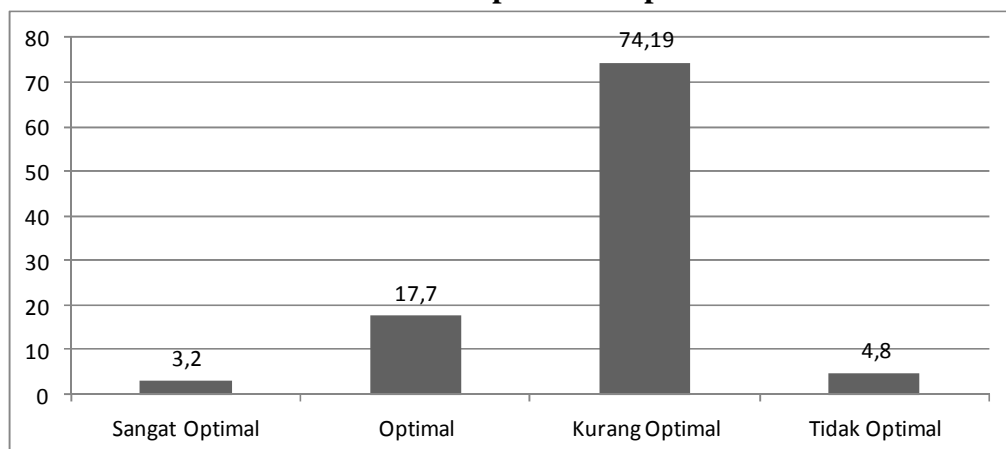
Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.42)

Berdasarkan diagram 4.41 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 46,7% (29 pengusaha) menilai kurang mampu dan 16,1% (10 pengusaha) menilai tidak mampu, yang berarti sebanyak 39 pengusaha UMKM Unggulan dari 62

pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap kemampuan UMKM Unggulan menyediakan lapangan pekerjaan, hal itu dikarenakan sebagian besar usaha UMKM Unggulan yang belum maju dan berkembang menjadikan UMKM Unggulan kurang mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 32,2% (20 pengusaha) menilai mampu dan 4,8% (3 pengusaha) menilai sangat mampu, berarti sebanyak 23 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai usaha yang dilakukan telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja disekitar tempat usahanya.

Diagram 4.42
Pendidikan dan pelatihan optimal



Sumber: Hasil penelitian dari data yang diolah (Kuesioner No.43)

Berdasarkan diagram 4.42 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 74,19% (46 pengusaha) menilai kurang optimal dan 4,8% (3 pengusaha) menilai tidak optimal, yang berarti sebanyak 49 pengusaha UMKM Unggulan dari 62 pengusaha cenderung memberi penilaian negatif terhadap pendidikan dan

pelatihan yang dilakukan oleh Disperindagkop, hal itu dikarenakan sebagian besar pengusaha tidak merasakan adanya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan Disperindagkop.

Sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya, yaitu sebanyak 17,7% (11 pengusaha) menilai optimal dan 3,2% (2 pengusaha) menilai sangat optimal, berarti sebanyak 13 pengusaha cenderung memberikan penilaian positif, pengusaha menilai pendidikan dan pelatihan tersebut sudah dilakukan oleh Disperindagkop. Walau pada kenyataannya pendidikan dan pelatihan tersebut tidak merata dan hanya pengusaha tertentu yang mendapatkannya.

4.5 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang, peneliti memiliki hipotesis berikut:

“Hasil Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang paling rendah mencapai 65% dari nilai ideal”

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa:

Ho: $\mu \geq 65\%$

Ho: “Hasil Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dikatakan rendah apabila lebih kecil atau sama dengan 65%”

Ha: $\mu < 65\%$

Ha: “Hasil Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dikatakan tinggi apabila lebih dari 65%”

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 35 \times 62 = 8680$ (4 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada menurut skala Likert, 35 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 62 = jumlah responden yang ada). Sehingga nilai mean atau rata-rata pada skor ideal instrumen masyarakat adalah $8680 : 62 = 140$.

Sehingga untuk Hasil Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Kota Serang, nilai yang dihipotesiskan tertinggi mencapai 65% dari yang diharapkan. Hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0: \mu \leq 65\% \leq 0,65 \times 8680 : 62 = 91$$

$$H_a: \mu > 65\% > 0,65 \times 8680 : 62 = 91$$

Diketahui:

$$\bar{X} = \frac{3830}{62} = 61,77$$

$$\mu_0 = 91$$

$$s = 17,17$$

Ditanya: t ?

Jawab:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

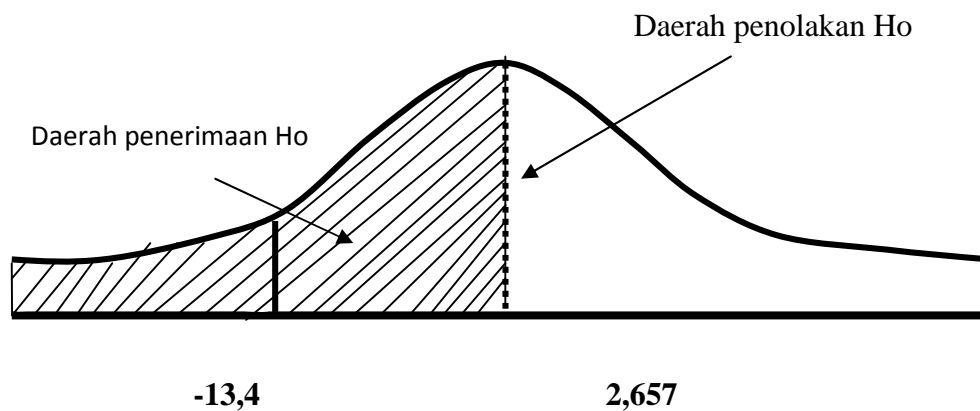
$$\begin{aligned}
 &= \frac{61,77 - 91}{17,17} \\
 &= \frac{-29,23}{2,18} \\
 &= -13,4
 \end{aligned}$$

Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = $(n - 1) = (62 - 1) = 61$ dan taraf kesalahan $\alpha = 1\%$ untuk uji satu pihak kiri, didapat nilai t_{tabel} yaitu . Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($-13,4 < 2,657$) dan jatuh pada daerah penerimaan H_a , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis kerja (H_a) ditolak.

Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan bahwa Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang, yaitu:

$$\frac{3830}{8680} \times 100\% = 44,12\%$$

Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang sebesar 44,12%.



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa t_{hitung} ternyata jatuh pada daerah penerimaan H_0 , dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak.

4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

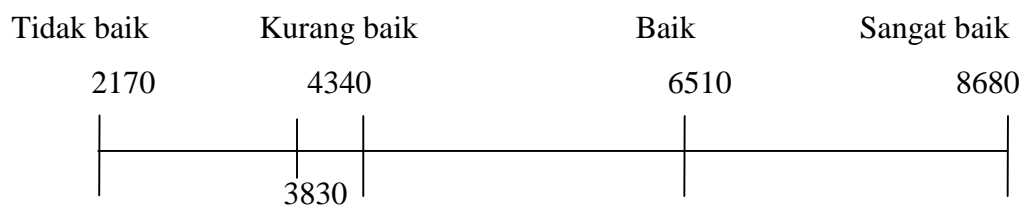
Penelitian dengan judul Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Penembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang bahwa hal yang terpenting adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti pada awal penelitian. Rumusan tersebut adalah “Seberapa Besar Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang ?”.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kita dapat melihat dari pembahasan yang memaparkan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan menguji pihak kanan bahwa harga t_{hitung} lebih kecil ($<$) dari harga t tabel dan hal itu dapat diartikan bahwa H_0 diterima dan H_a

ditolak. Karena hasil pengujian hipotesis mencapai 44,12% dari angka yang diharapkan 65%.

Sehingga dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa “Hasil Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang mencapai angka 44,12%” dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 65%, ini artinya Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang kurang baik atau masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada kategori berikut:

Kategori instrumen:



Nilai 3830 termasuk dalam kategori interval kurang baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik karena hampir mendekati angka dari kategori tersebut.

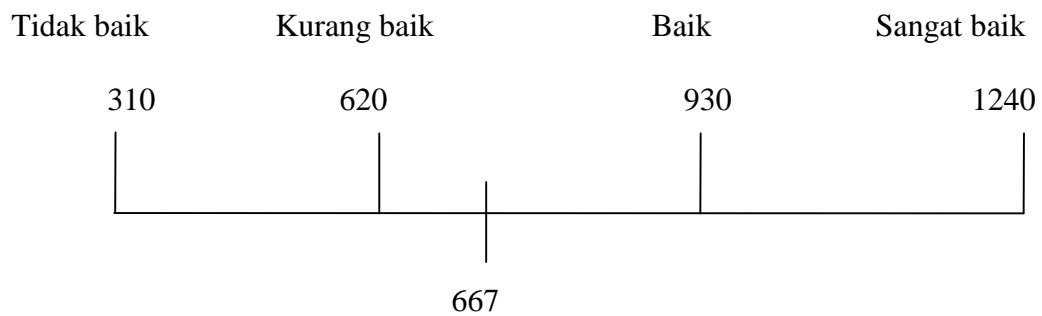
4.7 Pembahasan

Analisis dari Pelaksanaan Peran Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang menunjukkan hasil perhitungan yang hampir sama nilainya. Dilihat

dari teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori peran Biddle dan Thomas yang mempunyai empat indikator yaitu: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, Kaitan antara orang dan perilaku.

1. Indikator Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial merupakan hal yang berkenaan dengan siapa yang memiliki peran dalam suatu interaksi atau kegiatan dilihat dari latar belakang dan sikapnya dalam melakukan kegiatan agar diketahui sesuai dengan tujuannya apa tidak, serta orang – orang (sasaran) yang menjadi bagian dari interaksi tersebut. Dari hasil pengolahan data dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir instrumen pertanyaan untuk indikator pertama didapatkan hasil skor idealnya yaitu $4 \times 62 \times 5 = 1240$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 62 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 5 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $667 : 1240 = 0,5379 \times 100 = 53,79 \%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Pelaksanaan peran Disperindagkop dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Serang berjalan kurang baik bila dilihat dari indikator orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :



Nilai 667 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, karena nilai tersebut lebih mendekati interval kurang baik maka indikator pertama dinilai kurang baik.

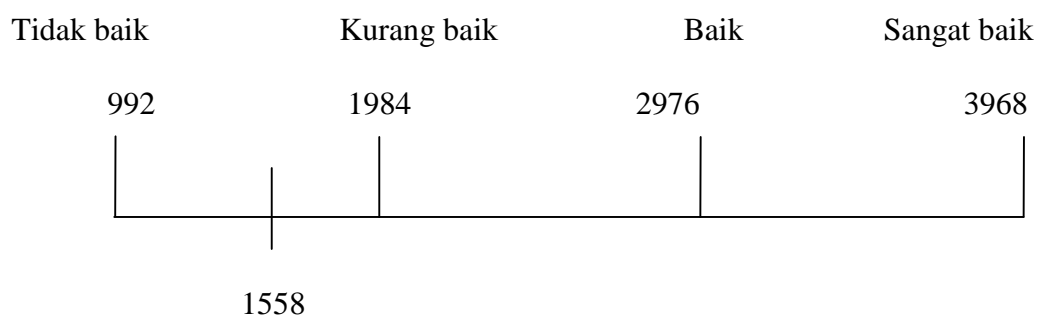
Hal tersebut dikarenakan dari 5 pertanyaan yang diajukan, mayoritas pengusaha UMKM Unggulan memberikan penilaian yang cenderung negatif. Seperti penilaian terhadap kepedulian Disperindagkop dalam pengembangan UMKM dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha pelaku UMKM Unggulan, para pengusaha UMKM Unggulan mayoritas menilai rendah kepedulian Disperindagkop terhadap pengembangan dan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Hal tersebut diperkuat dengan penilaian pengusaha terhadap prioritas dan komitmen yang kurang ditunjukkan, yang pada akhirnya pengusaha memberi penilaian yang cenderung kurang baik.

Dari hasil wawancara kebeberapa pengusaha, mereka menyatakan penilaian yang diberikan cenderung negatif karena Disperindagkop tidak pernah menunjukkan pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan tugas pokok Disperindagkop tersebut. Misalnya tidak mengunjungi satu persatu pengusaha UMKM Unggulan untuk diberikan pendampingan dan masukan – masukan. Hanya beberapa UMKM

Unggulan yang mendapat kunjungan, itupun Disperindagkop hanya memberitahukan adanya undangan pameran atau pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak Provinsi maupun Kementerian. Sedangkan untuk kepedulian atas permasalahan – permasalahan yang terjadi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang kurang peduli.

2. Indikator Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut merupakan berkenaan segala aktivitas yang ditimbulkan dari kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara tugas dengan tujuan yang ditetapkan. Dari hasil pengolahan data dalam indikator penelitian ini memuat 16 butir instrumen pertanyaan didapatkan hasil skor ideal yaitu $4 \times 62 \times 16 = 3968$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 62 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 16 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1558 : 3968 = 0,3926 \times 100 = 39,62 \%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang berjalan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :



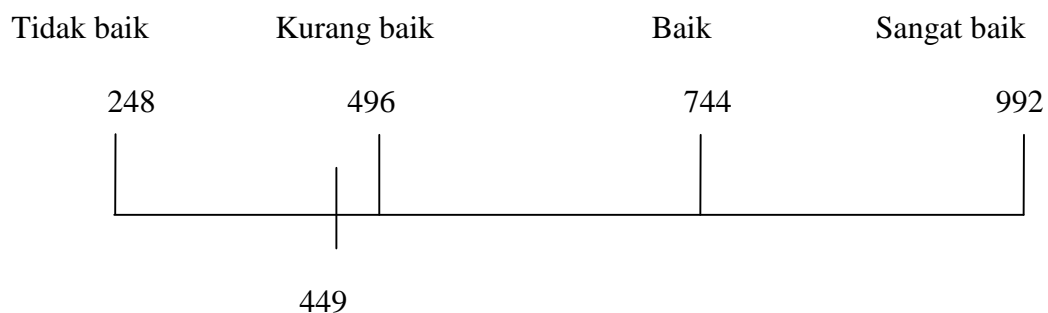
Nilai 1558 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, karena nilai tersebut lebih mendekati interval kurang baik maka indikator kedua dinilai kurang baik.

Hal tersebut dikarenakan dari 16 pertanyaan yang diajukan, keseluruhan pertanyaan yang dijawab pengusaha UMKM Unggulan hasilnya condong negatif atau kurang baik dalam memberi penilaiannya. Seperti sosialisasi, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang semuanya diberikan penilaian kurang baik oleh pengusaha UMKM Unggulan kepada Disperindagkop. Bukan hanya itu, tidak adanya upaya dari Disperindagkop dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan pelaku UMKM Unggulan, dan kerjasama yang kurang baik menjadi penilaian akan praktek dari tugas pokok Disperindagkop menjadi buruk dimata pengusaha UMKM Unggulan.

Dari hasil wawancara beberapa pengusaha, mereka menyatakan belum pernah ada pegawai Disperindagkop Kota Serang yang melakukan pendampingan, sosialisasi, pendidikan pelatihan, dan sebagainya yang berkenaan dengan tugas pokok Disperindagkop. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan adanya kunjungan dari Disperindagkop, itupun sekedar memberikan undangan adanya pameran maupun pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk pendampingan, fasilitas pemasaran, serta upaya Disperindagkop dalam membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi pada usaha para pengusaha UMKM Unggulan belum dilakukan oleh Disperindagkop Kota Serang.

3. Indikator Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan orang-orang dalam perilaku merupakan indikator yang berkenaan dengan posisi atau jabatan orang – orang yang memiliki peranan yang dikaitkan dengan sikap yang muncul dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 4 butir instrumen pertanyaan didapatkan hasil skor ideal yaitu $4 \times 62 \times 4 = 992$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 62 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 4 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator Kedudukan orang-orang dalam perilaku). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $449 : 992 = 0,452 \times 100 = 45,26\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang kurang baik bila dilihat dari indikator kedudukan orang-orang dalam perilaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :



Nilai 449 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, karena nilai tersebut lebih mendekati interval kurang baik maka indikator ketiga dinilai kurang baik.

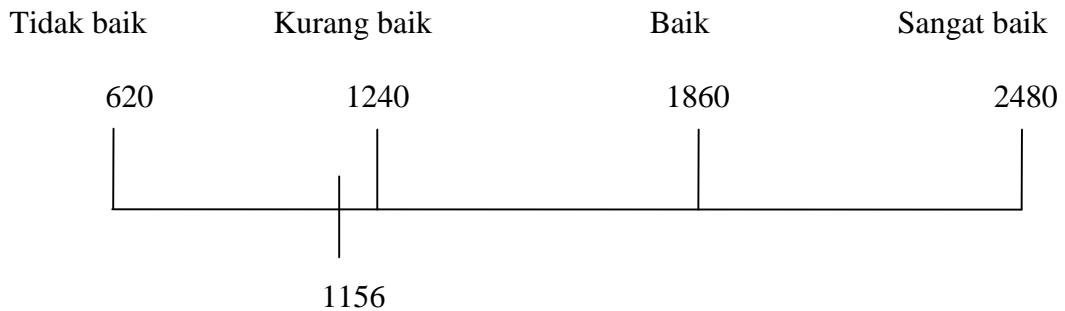
Hal tersebut dikarenakan dari 4 pertanyaan yang diajukan, keseluruhan pertanyaan yang dijawab pengusaha UMKM Unggulan hasilnya condong negatif atau kurang baik dalam memberi penilaiannya. Seperti sosialisasi, pendampingan, kerjasama, dan fasilitas pemasaran yang kurang sesuai dengan tugas pokok Disperindagkop. Jadi antara tugas pokok dan pelaksanaan di lapangan Disperindagkop dinilai kurang sesuai oleh para pengusaha UMKM Unggulan.

Dari beberapa pengusaha menyatakan ketidaksesuaian praktek dan tugas pokok Disperindagkop dikarenakan Disperindagkop tidak pernah terlihat oleh para pengusaha UMKM Unggulan pekerjaan konkret yang telah dilakukan selama ini.

4. Indikator Kaitan antara orang dan perilaku

Berkenaan dengan pencapaian atas perilaku yang muncul yang dikaitkan dengan orang – orang yang melakukan interaksi (aktor dan sasaran). Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 10 butir instrumen pernyataan didapatkan hasil skor ideal yaitu $4 \times 62 \times 10 = 2480$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 62 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 10 = jumlah pertanyaan yang ada pada indikator Kaitan antara orang dan perilaku). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1156 : 2480 = 0,4661 \times 100 = 46,61\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Pelaksanaan Peran Disperindagkop dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal Di Kota Serang kurang baik bila dilihat dari indikator Kaitan antara orang dan perilaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :



Nilai 1156 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, karena nilai tersebut lebih mendekati interval kurang baik maka indikator keempat dinilai kurang baik.

Hal tersebut dikarenakan dari 10 pertanyaan yang diajukan, keseluruhan pertanyaan yang dijawab pengusaha UMKM Unggulan hasilnya condong negatif atau kurang baik dalam memberi penilaiannya. Seperti tidak adanya inovasi yang dilakukan Disperindagkop, walaupun ada yang menyatakan adanya inovasi, itupun baru sekedar perkataan atau ucapan yang belum ada bukti konkret dari inovasi itu sendiri. Kurang meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah kurang merata dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan. Pengusaha yang diberikan undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya pengusaha itu – itu saja yang cenderung sudah maju dan berkembang. Sehingga pemerataan akan kemajuan dan berkembangnya UMKM Unggulan secara merata akan sulit terealisasi. Sedangkan untuk timbal balik dari tugas pokok yang dilakukan Disperindagkop kurang mempengaruhi peningkatan jumlah

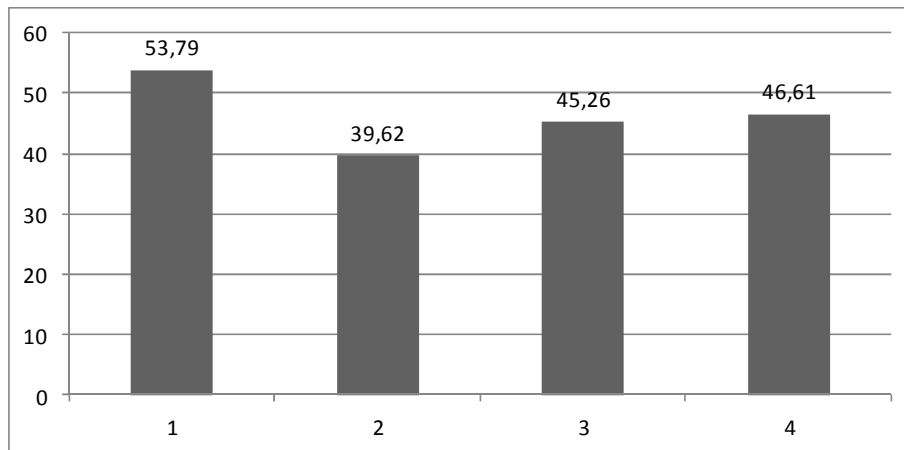
karyawan, maupun omset usaha. Hal itu dikarenakan kurang optimalnya tugas pokok Disperindagkop Kota Serang.

Berdasarkan perhitungan pada setiap indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian Pelaksanaan peran Disperindagkop oleh responden terhadap indikator penelitian yaitu indikator Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 53,79%, indikator Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 39,62%, indikator Kedudukan orang-orang dalam perilaku 45,26%, indikator Kaitan antara orang dan perilaku 46,61%.

Dari masing-masing penilaian tersebut dapat diartikan bahwa Hasil dari Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang, dilihat dari keempat indikator yang diantaranya Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, Kaitan antara orang dan perilaku yang dijadikan pisau analisis peneliti dalam penelitian ini dapat dikatakan kurang baik atau masih rendah.

Berdasarkan hasil kuesioner dan pemaparan di atas, maka total skor pada tiap-tiap indikator dalam penelitian ini dapat dilihat lebih jelas pada digram berikut, dimana dalam penelitian ini menggunakan empat indikator peran Biddle dan Thomas ditunjukkan pada diagram 4.43 berikut:

Diagram 4.43
Skor hasil kuesioner perindikator



Sumber: Peneliti 2014

Berdasarkan diagram 4.43 di atas maka indikator tertinggi adalah indikator pertama, yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, dimana indikator orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial berkenaan dengan latar belakang pendidikan para aktor dan sasaran yang dikaitkan dengan tugas atau pekerjaannya dalam kerjasama atau kemitraan, serta pengalaman dan sikap yang ditunjukkan dalam interaksi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara latar belakang pendidikan Disperindagkop dengan tugasnya di lapangan yang tidak sesuai, hal itu berkenaan dengan sikap Disperindagkop yang kurang peduli terhadap pengembangan UMKM Unggulan yang menjadi salah satu usaha untuk memanfaatkan sumber daya lokal agar lebih optimal.

Sedangkan, indikator terendah adalah indikator perilaku yang muncul dalam interaksi, dimana berkenaan dengan praktek kegiatan, dimana adanya permasalahan, solusi, dan penilaian yang dikaitkan dengan sikap Disperindagkop yang berperan sebagai pembina UMKM untuk melakukan pengembangan UMKM Unggulan. Dalam hal ini pelaku UMKM Unggulan menilai kurang baik karena

pelaksanaan dari tugas Disperidagkop yang tidak berjalan sehingga tidak dirasakan oleh para pelaku UMKM Unggulan, begitupun dengan sikap Disperindagkop dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam pengembangan UMKM Unggulan yang melakukan pembiaran dalam artian tidak peduli atas permasalahan yang muncul dalam kegiatan usaha UMKM Unggulan.

Kemudian peneliti mempertegas kembali tentang jawaban atas perumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu bagaimanakah Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Serang mencapai angka 44,12%” dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 65%, ini artinya Peran Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Khususnya Industri Pangan Lokal) Di Kota Serang kurang baik atau masih rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya Pelaksanaan Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang. hal itu dibuktikan dengan data statistik berupa hasil perhitungan kuesioner yang telah disebar dan wawancara dari beberapa pengusaha UMKM Unggulan di Kota Serang.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran dari penulis terhadap Pelaksanaan Peran Disperindakop dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Serang adalah:

Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Serang

1. memberikan sosialisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM kepada pengusaha dan memberikan fasilitas berupa promosi produk kemasyarakat agar masyarakat cinta dengan produk lokal.
2. Melakukan pendampingan yang baik dan merata kepada pengusaha kecil menengah dengan pihak perkreditan maupun swasta guna peningkatan modal usaha.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan pelatihan dan pendidikan.
4. Memberikan pelatihan tentang kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan usaha secara merata dan optimal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada UMKM secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dari kegiatan usaha, agar UMKM yang ada tetap berkembang dan maju.

Bagi Pengusaha Kecil menengah (UMKM Unggulan)

1. Memotivasi diri untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam mengembangkan usahanya.
2. Mempraktekkan ilmu yang didapatkan dalam pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Serang.
3. Merubah manajemen tradisional menjadi manajemen modern yang lebih tersistematis dan memiliki pembukuan agar dapat mengetahui perkembangan usaha.
4. Aktif melakukan pengawasan terhadap tugas pokok Disperindagkop dalam melakukan tugasnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Jamaluddin. 2002. *Ekonomi Publik II*. Jakarta :Universitas Terbuka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang. 2011. *Kota Serang Dalam Angka 2011*. Serang: BPS Kota Serang.
- Black, James A., Dean J. Champion. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hudaeridan Ruby, Achmad. 2005. *Tasbih dan Golok: Kedudukan, Peran, dan Jaringan Kyai dan Jawara di Banten*. Cilegon: CV. Larabaya.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Alberth. 2010. *Belajar Mudah SPSS untuk Pemula*. Yogyakarta: MediaKom.
- Muluk, M. R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan: Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarwono, WirawanSarlito. 2008. *Teori – Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S. Alam. 2007. *Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI*. Jakarta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah: Realitas dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sandjaja B., Alberto Heriyanto. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka karaya.
- Santoso, Singgih. 2003. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11.5*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2010. *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, Slamet. 2010. *Teori – Teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri., Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarma, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- SuharkodanHari S. 1996. *Pengantar Sosial I*. _PT. Intan Perwira.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini.,Purnomo Setiady A. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: BumiAksara.

PeraturanPerundangan:

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Sumber Lain:

- Supriyadi, R. Ery. 2007. *Telaah Kendala Penerapan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

LAN (Laboratorium Administrasi Negara). *Refleksi Satu Tahun Kinerja Pemerintah Atut-Rano*. 2012. FISIP UNTIRTA.

Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran. (diakses 24 Juli 2013).

(<http://www.bintan-s.web.id/2010/12/pengertian-pondampingan.html>. di akses 30 September 2014).

(NPL/*Non Performance Loan*)(<http://smedcugm.blogspot.com/>. (diakses 04 Juni 2013).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Peraturan Perundangan Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah . . .

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

c. pengembangan . . .

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki . . .

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan . . .

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan

d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

d. memberikan . . .

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan . . .

- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;

c. pemberian . . .

- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi . . .

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 282254-283073 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 430 /UN.43.VI.1/PG/2012
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

13 Desember 2012

Kepada Yth.
Kepala Dinas UMKM Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Bayinah
NIM : 6661091174
Semester : VII
Mata Kuliah: SKRIPSI
Judul : Peran Dinas UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Serang
Data : Tupoksi Dinas UMKM dan Data Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.Sos., M. Si
NIP. 197407052006042011

LAMPIRAN 3

Kuesioner Penelitian

No. Responden:

KUESIONER

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah kuesioner ini dengan teliti, agar Bapak/Ibu mengerti maksud pertanyaannya.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang cocok dari beberapa pilihan dengan cara memberi tanda silang (X) yang menurut Bapak/Ibu anggap sesuai.
3. Mohon diisi informasi data responden.
4. Setiap pertanyaan hanya memiliki satu alternatif jawaban.

INFORMASI DATA RESPONDEN	
Jenis Kelamin	a. Laki-laki b. Perempuan
Usia tahun
Pendidikan	a. SD d. D-3 b. SMP e. S-1 c. SMA f. Lainnya (.....)
INFORMASI DATA UMKM	
Industri UMKM
Jumlah Karyawan
Jumlah Produksi
Jumlah Pendapatan

Pertanyaan:

1.1.

1. Apakah pendidikan bapak/ibu sesuai dengan jenis usaha yang dijalani ?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
2. Apakah pendidikan karyawan bapak/ibu sesuai dengan pekerjaannya ?
 - a. Sangat sesuai
 - c. Kurang sesuai

- b. Sesuai
d. Tidak sesuai
3. Apakah bapak/ibu mengetahui latar belakang Pendidikan atau gelar para pegawai Disperindagkop ?
- a. Sangat mengetahui
c. Kurang mengetahui
b. Mengetahui
d. Tidak mengetahui

(Kalau jawaban poin 3 anda menjawab pilihan (d), maka pertanyaan poin 4 dilewat).

4. Apakah pendidikan atau gelar para pegawai disperindagkop sudah sesuai dengan tugasnya di lapangan?
- a. Sangat sesuai
c. Kurang sesuai
b. Sesuai
d. Tidak sesuai

1.2.

5. Apakah jumlah karyawan ibu atau bapak sudah memadai dalam hal menunjang kegiatan usaha?
- a. Sangat memadai
c. Kurang memadai
b. Memadai
d. Tidak memadai
6. Apakah UMKM bapak/ibu pernah melakukan kerjasama (kemitraan) dengan pihak perkreditan untuk menambah modal usaha?
- a. Sangat pernah
c. Kurang pernah
b. Pernah
d. Tidak pernah
7. Apakah UMKM bapak/ibu pernah melakukan kerjasama dengan pihak minimarket, supermarket maupun waralaba lainnya yang sejenis untuk memasarkan produk UMKM?
- a. Sangat pernah
c. Kurang pernah
b. Pernah
d. Tidak pernah

1.3

8. Apakah Disperindagkop peduli terhadap pengembangan UMKM?
- a. Sangat peduli
c. Kurang peduli
b. Peduli
d. Tidak peduli
9. Apakah Disperindagkop lebih mementingkan tugas pokoknya dibandingkan kepentingan pribadi?
- a. Sangat mementingkan pekerjaan
c. Kurang mementingkan pekerjaan
b. Mementingkan pekerjaan
d. Tidak Mementingkan pekerjaan
10. Apakah Disperindagkop memiliki komitmen dalam pengembangan UMKM bapak/ibu?
- a. Sangat komitmen
c. Kurang komitmen
b. Komitmen
d. Tidak komitmen

11. Apakah Disperindagkop peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam usaha bapak/ibu?
- a. Sangat peduli
 - b. Peduli
 - c. Kurang peduli
 - d. Tidak peduli

2.1

12. Apakah Disperindagkop selalu memberikan sosialisasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kurang sosialisasi
 - d. Tidak melakukan sosialisasi
13. Apakah Disperindagkop memberikan pendampingan dengan baik, seperti pendampingan dalam penambahan modal dengan peminjaman modal kepihak Kreditur?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
14. Pendampingan tersebut diberikan secara rutin?
- a. Selalu/rutin (>3x setahun)
 - b. Sering (3x setahun)
 - c. Kadang-kadang (<3x setahun)
 - d. Tidak pernah
15. Apakah Disperindagkop menyediakan lokasi atau tempat yang baik untuk memasarkan produk UMKM Unggulan?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
16. Apakah lokasi atau tempat yang disediakan Disperindagkop tersebut mampu menunjang kegiatan pemasaran produk usaha?
- a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu
17. Apakah modal yang tersedia milik bapak/ibu mampu menunjang peningkatan usaha UMKM Unggulan?
- a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu
18. Apakah bapak/ibu diberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik tentang pengemasan produk oleh Disperindagkop?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
19. Apakah bapak/ibu diberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik tentang pembuatan label halal oleh Disperindagkop?
- a. Sangat baik
 - c. Kurang baik

- b. Baik
d. Tidak baik
20. Apakah bapak/ibu diberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik tentang pemasaran produk oleh Disperindagkop?
a. Sangat baik
c. Kurang baik
b. Baik
d. Tidak baik
21. Apakah bapak/ibu diberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik tentang manajemen wirausaha oleh Disperindagkop?
a. Sangat baik
c. Kurang baik
b. Baik
d. Tidak baik
22. Apakah bapak/ibu diberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik tentang pembuatan nomor seri makanan yang dikeluarkan dari pemerintah oleh Disperindagkop?
a. Sangat baik
c. Kurang baik
b. Baik
d. Tidak baik
23. Apakah Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM oleh Disperindagkop dilakukan secara rutin/selalu?
a. Selalu/rutin (>3x setahun)
c. Kadang-kadang (<3x setahun)
b. Sering (3x setahun)
d. Tidak pernah
24. Apakah karyawan bapak/ibu mengikuti pelatihan dan pendidikan tersebut?
a. Semua
c. Perwakilan (1 orang)
b. Beberapa (>1 orang: orang)
d. Tidak ada yang mengikuti
25. Apakah Pelatihan dan pendidikan yang diperoleh tersebut dapat dengan mudah diwujudkan pada Industri UMKM?
a. Sangat mudah
c. Sulit
b. Mudah
d. Sangat sulit

2.2

26. Apakah Kondisi UMKM bapak/ibu saat ini cukup aktif?
a. Sangat aktif
c. Kurang aktif
b. Aktif
d. Tidak aktif
27. Apakah ada Hambatan-hambatan yang dirasakan bapak/ibu dalam upaya pengembangan usaha?
a. Sangat banyak
c. Sedikit
b. Banyak
d. Tidak ada
(Hambatan:.....
.....
.....)

2.3

28. Apakah Disperindagkop telah melakukan upaya dengan baik dalam menyelesaikan masalah atau hambatan bapak/ibu dalam mengembangkan usaha?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

29. Apakah Disperindagkop selalu memberikan masukan-masukan seperti saran dan kritik kepada bapak/ibu dalam pengembangan usaha?
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

3.1

30. Apakah Disperindagkop selaku Pembina dan pemberdayaan UMKM sudah sesuai melakukan tugasnya dalam memberikan pendampingan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bapak/ibu?

- a. Sangat sesuai
- b. Sesuai
- c. Kurang sesuai
- d. Tidak sesuai

31. Apakah Disperindagkop selaku Pembina dan pemberdayaan UMKM sudah sesuai melakukan tugasnya dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha bapak/ibu?

- a. Sangat sesuai
- b. Sesuai
- c. Kurang sesuai
- d. Tidak sesuai

32. Apakah Disperindagkop selaku Pembina dan pemberdayaan UMKM sudah sesuai melakukan tugasnya dalam memberikan fasilitas dalam hal pemasaran produk usaha bapak/ibu?

- a. Sangat sesuai
- b. Sesuai
- c. Kurang sesuai
- d. Tidak sesuai

33. Apakah Disperindagkop sebagai salah satu bagian yang mengembangkan UMKM sudah melakukan kerjasama yang baik dengan bapak/ibu selaku pengusaha UMKM?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

4.1.

34. Disperindagkop telah menciptakan suatu inovasi dalam pengembangan ekonomi khususnya dalam usaha Industri UMKM Unggulan (seperti memberikan fasilitas tempat untuk pemasaran, kerjasama dengan pihak lain, dll)?

- a. Banyak inovasi
- b. Berinovasi
- c. Kurang inovasi
- d. Tidak berinovasi

(Sebutkan inovasi tersebut:
.....)

35. Apakah Pengusaha Industri UMKM Unggulan mengalami peningkatan dalam hal pendidikan berwirausaha (seperti pengetahuan tentang menjalin hubungan kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain)?

- a. Sangat meningkat
- b. Meningkat
- c. Kurang meningkat
- d. Tidak meningkat

36. Apakah karyawan bapak/ibu mengalami peningkatan dalam hal pendidikan berwirausaha?
- a. Sangat meningkat
 - b. Meningkatkan
 - c. Kurang meningkat
 - d. Tidak meningkat
37. Apakah dengan adanya pelatihan, pendampingan, dan pengembangan UMKM yang dilakukan Disperindagkop Industri UMKM Unggulan mengalami peningkatan jumlah karyawan?
- a. Sangat meningkat
 - b. Meningkatkan
 - c. Kurang meningkat
 - d. Tidak meningkat
38. Apakah dengan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Disperindagkop menjadikan Industri UMKM Unggulan bapak/ibu mengalami peningkatan modal?
- a. Sangat meningkat
 - b. Meningkatkan
 - c. Kurang meningkat
 - d. Tidak meningkat
39. Apakah dengan adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Disperindagkop menjadikan Industri UMKM Unggulan bapak/ibu mengalami peningkatan omzet usaha?
- a. Sangat meningkat
 - b. Meningkatkan
 - c. Kurang meningkat
 - d. Tidak meningkat
40. Apakah industri UMKM Unggulan mengalami peningkatan dalam hal manajemen UMKM (seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan)?
- a. Sangat meningkat
 - b. Meningkatkan
 - c. Kurang meningkat
 - d. Tidak meningkat
41. Apakah industri UMKM Unggulan bapak/ibu mampu mensejahterakan karyawannya?
- a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu
42. Apakah industri UMKM Unggulan bapak/ibu mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?
- a. Sangat mampu
 - b. Mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu
43. Apakah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindagkop kepada bapak/ibu sudah dilakukan dengan optimal?
- a. Optimal
 - b. Cukup optimal
 - c. Kurang optimal
 - d. Sangat kurang optimal

LAMPIRAN 4

Pengolahan Data Kuesioner Dalam

Bentuk Excel

24	2	3	2	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	3	1	2	3	2	4	2	1	2	3	2	2	3	4	1	2	3	3	2	4	75
25	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2	2	56	
26	4	3	4	4	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	89	
27	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	129	
28	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	2	2	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	81
29	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	40
30	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	84
31	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	61
32	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	94
33	2	3	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	3	1	3	3	1	3	2	2	2	4	2	68	
34	3	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	62
35	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	51
36	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	3	2	54	
37	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	54
38	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	47	
39	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	47
40	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51
41	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	54
42	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	58
43	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	40	
44	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	84
45	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	61
46	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	94
47	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	3	3	2	1	2	2	1	2	3	3	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	81

48	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	40				
49	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	84	
50	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	61	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	94	
52	2	3	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	3	1	3	3	1	3	2	2	2	4	2	68		
53	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	47	
54	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51	
55	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	54	
56	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	58
57	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	40	
58	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	84
59	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	61	
60	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	40	
61	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	84	
62	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	61	
																												SUM	3830								
																												AVERAGE	61,774193 55								
																												STDEV	17,174532 57								

	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	JENIS INDUSTRI	JUMLAH KARYAWAN	PRODUKSI	PENDAPATAN
1	1	3	3	3	1	1	2
2	1	3	3	3	4	3	6
3	1	2	4	3	4	2	2
4	1	2	3	3	4	4	6
5	1	3	2	3	4	4	6
6	2	2	3	3	3	2	4
7	1	3	3	3	4	2	0
8	2	2	4	3	4	2	6
9	2	3	3	3	4	4	6
10	1	3	2	3	4	4	6
11	1	3	3	3	4	3	6
12	1	2	3	3	4	4	4
13	1	3	2	3	4	4	5
14	1	2	3	3	4	4	6
15	1	3	3	3	4	4	6
16	1	3	3	3	4	4	5
17	1	3	3	3	4	4	6
18	2	2	3	3	3	1	0
19	1	2	4	3	4	4	4
20	2	3	3	3	3	2	6
21	2	2	3	3	4	2	5
22	2	3	2	3	3	1	0
23	1	2	4	3	4	3	6
24	1	3	3	3	4	4	5
25	2	2	4	3	3	1	1
26	1	3	2	1	3	2	2
27	2	2	1	2	4	1	0
28	2	3	1	1	3	2	5
29	1	3	3	1	4	2	6
30	2	3	2	1	3	1	1
31	2	2	3	1	4	2	5
32	1	3	3	1	3	1	4
33	1	2	4	3	4	2	2
34	1	3	3	3	4	4	6
35	1	3	3	3	4	3	6
36	1	3	3	3	4	4	6
37	1	2	4	3	4	2	2
38	2	3	3	3	3	2	6
39	1	3	3	3	4	4	6

40	1	3	3	3	4	4	6
41	1	2	3	2	4	1	0
42	2	2	4	3	4	2	6
43	1	3	3	3	4	4	6
44	1	2	4	3	4	2	2
45	1	3	3	3	4	4	6
46	1	3	3	3	4	4	6
47	2	2	4	3	4	2	6
48	2	3	3	3	3	2	6
49	1	3	3	3	4	4	6
50	2	2	4	3	4	2	6
51	1	3	3	3	4	4	6
52	1	3	3	3	4	4	6
53	1	2	4	3	4	2	2
54	1	3	3	3	4	4	6
55	2	3	3	3	3	2	6
56	1	3	3	3	4	4	6
57	2	3	3	2	4	2	0
58	1	3	3	3	4	4	6
59	1	3	3	3	4	4	6
60	2	2	4	3	4	2	6
61	2	3	3	3	3	2	6
62	1	3	3	3	4	4	6

JENIS KELAMIN	
Laki	33,87096774
Perempuan	66,12903226

PENDIDIKAN	
tidak tamat SD	20,96774194
SD	66,12903226
SMP	9,677419355
SMA	3,225806452

produksi	
50-250 kg	43,5483871
251-500 kg	6,451612903
501-1000 kg	37,09677419
>1000 kg	12,90322581
tidak menjawab	0

INDUSTRI	
Emping	85,48387097
sate bandeng	4,838709677
kue gipang dan satu	9,677419355

PENDAPATAN	
300-1 jt	59,67741935
>1 jt- 2jt	9,677419355
>2jt - 3 jt	6,451612903
>3jt - 4jt	0
>4jt - 5jt	11,29032258
>5jt	3,225806452
tidak menjawab	9,677419355

USIA	
18-40 tahun	64,51612903
41-60 tahun	35,48387097
61-80 tahun	0

KARYAWAN	
1- 5 karyawan	77,41935484
6-10 karyawan	20,96774194
11-15 karyawan	0
>16 karyawan	1,612903226

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Validitas

Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26
.166	.361	.136	.327	.167	.166	.197	.177	.162	.361	.265	.273	.053
.150	.004	.200	.010	.125	.228	.125	.188	.155	.005	.037	.031	.684
E2	62	32	62	E2	62	62	62	E2	32	62	62	62
.275	.511	.135	.198	.209	.101	.117	.118	.178	.347	.167	.206	.023
.030	.014	.302	.124	.104	.436	.364	.359	.171	.007	.194	.109	.858
E2	62	32	62	E2	62	62	62	E2	32	62	62	62
.265	.270	.100	.125	.430	.441	.440	.410	.405	.516	.329	.409	-.000
.037	.034	.236	.034	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.003	.000	.814
E2	62	52	62	E2	62	62	62	E2	52	62	62	62
.252	.375	.523	.189	.114	.085	.133	.128	.157	.325	.255	.412	-.207
.069	.003	.010	.141	.378	.500	.303	.322	.267	.010	.043	.001	.107
E2	62	32	62	E2	62	62	62	E2	32	62	62	62
.370	.008	.077	.117	.637	.571	.665	.365	.526	.521	.409	.362	.288
.702	.950	.555	.587	.700	.000	.007	.001	.700	.070	.001	.002	.023
E2	62	32	62	E2	62	62	62	E2	32	62	62	62
-.162	-.143	-.134	-.173	-.008	-.147	-.073	-.029	-.023	-.009	-.174	.190	.016
.167	.260	.300	.179	.061	.254	.542	.621	.361	.946	.173	.140	.901
F2	62	32	62	F2	62	62	62	F2	32	62	62	62
.344	.511	.268	.006	.008	.070	.001	.016	.063	.000	.042	.018	.122
.753	.014	.023	.456	.348	.590	.992	.608	.326	.935	.745	.692	.344
E2	62	52	62	E2	62	62	62	E2	52	62	62	62
.361	.481	.483	.212	.570	.473	.493	.418	.431	.624	.364	.624	.019
.002	.000	.000	.098	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.004	.000	.886
E2	62	32	62	E2	62	62	62	E2	32	62	62	62
.376	.761	.125	.130	.630	.580	.695	.511	.610	.781	.369	.562	.040
.703	.000	.071	.213	.700	.000	.007	.000	.700	.070	.004	.000	.258
E2	62	52	62	E2	62	62	62	E2	52	62	62	62
.454	.218	.261	.092	.635	.700	.673	.623	.635	.604	.471	.565	.176
.000	.089	.040	.475	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.170
F2	62	32	62	F2	62	62	62	F2	32	62	62	62

Q40	Q41	Q42	Q43	JUM AF
.282'	.215	.151	318"	.413'
.027	.016	.242	.300	.001
.62	.22	.62	.62	.62
.193	.050	.090	.190	.007'
.121	.65	.445	.134	.007
.62	.22	.62	.62	.62
.230	.293'	.105	511"	.532'
.072	.02	.405	.300	.000
.62	.22	.62	.62	.62
.352'	.335"	.364"	343"	.453'
.002	.018	.004	.306	.000
.62	.22	.62	.62	.62
.353'	.125	.194	470"	.113'
.002	.129	.132	.300	.000
.62	.22	.62	.62	.62
.172	.048	.212	.360	.151
.544	.713	.097	.344	.240
.62	.22	.62	.62	.62
.151	.113	.180	.323	.181
.241	.314	.151	.358	.156
.62	.22	.62	.62	.62
.655'	.437"	.578"	636"	.813'
.002	.010	.000	.300	.000
.62	.22	.62	.62	.62
.578'	.283	.427"	414"	.763'
.002	.016	.000	.301	.000
.62	.22	.62	.62	.62
.644'	.593"	.919	839"	.847'
.002	.010	.011	.300	.000
.62	.22	.62	.62	.62

Q11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	220 087 62	143 268 62	.335* .004 62	.239 .062 62	.557** .000 62	.070 .548 62	.140 .266 62	.632* .000 62	.640* .001 62	.724* .000 62	1 .000 62	.733** .000 62	.456** .000 62
Q12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	262* 040 62	135 296 62	.372* .001 62	.426* .001 62	.491** .000 62	.305* .015 62	.180 .161 62	.772* .000 62	.647* .001 62	.818* .000 62	.733** .000 62	.1 .000 62	.265* .000 62
Q13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	105 415 62	148 251 62	.277 .022 62	-.002 .990 62	.232 .070 62	-.351** .005 62	-.195 .129 62	.137 .289 62	.231 .062 62	.280 .027 62	.453** .000 62	.265* .038 62	1 .000 62
Q14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.185 .150 62	.375* 000 62	.265 .037 62	.232 .069 62	.373** .002 62	-.112 .157 62	-.074 .733 62	.381* .002 62	.375* .001 62	.454* .000 62	.425** .001 62	.412** .001 62	.597** .000 62
Q15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.261** .004 62	.211* 014 62	.270 .034 62	.375* .003 62	-.000 .950 62	-.140 .229 62	.011 .014 62	.240* .000 62	.246* .001 62	.210 .089 62	.270* .029 62	.155 .230 62	.105 .418 62
Q16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.165 200 62	133 302 62	.135 .282 62	.326* .010 62	.077 .553 62	-.114 .310 62	.283* 023 62	.463* .000 62	.425* .001 62	.261 .040 62	.322* .011 62	.208 .104 62	.075 .565 62
Q17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.227** 010 62	190 124 62	.125 .334 62	.109 .141 62	-.117 .567 62	-.173 .179 62	.096 .456 62	.212 .098 62	.101 .317 62	.092 .475 62	.171 .185 62	.034 .670 62	-.071 .583 62
Q18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.197 .125 62	209 104 62	.439* .001 62	.114 .378 62	.507** .000 62	-.018 .051 62	.008 .948 62	.502* .000 62	.560* .001 62	.865* .000 62	.813** .000 62	.615** .000 62	.466** .000 62
Q19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.166 226 62	101 436 62	.441* .001 62	.185 .509 62	.571** .000 62	.147 .254 62	.070 .590 62	.473* .000 62	.590* .000 62	.710* .000 62	.715** .000 62	.552** .000 62	.496** .000 62
Q20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.197 .125 62	117 361 62	.448* .001 62	.133 .303 62	.585** .000 62	-.079 .542 62	.001 .992 62	.493* .000 62	.595* .001 62	.876* .000 62	.723** .000 62	.573** .000 62	.463** .000 62

420'	.278'	.322'	.171	810'	7' 0"	.729"	.038"	.757"	304'	.473"	.473'	1' 30"	-.038	404	344'
.001	.029	.01	.185	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.218	.628	.001	.006
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
412'	.155	.203	.064	615'	.552"	.573"	.531"	.589"	.553'	.433"	.557'	1' 18"	.141	563	596'
.001	.200	.104	.620	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.030	.270	.000	.000
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
597'	.105	.075	-.071	438'	.439"	.460"	.039"	.400"	.027'	.571"	.252	.200	.274	456	.200
070	4' 3	5' 5	5' 3	7' 7	7' 0"	7' 7	7' 0"	0' 0"	7' 5	0' 0"	1' 48	1' 27	1' 31	0' 7	1' 9
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
1	.227	.254	.187	417'	.425"	.401"	.543"	.411"	.357'	.685"	.651'	.290	.124	538	.630'
	.073	.067	.143	.00'	.00'	.00'	.000	.001	.000	.000	.000	.022	.330	.000	.000
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
.227	1	8' 0"	5' 8"	.087	1' 58	1' 3	1' 2"	1' 58	.253	.291	.13'	-1' 21	-1' 10	-.077	1' 2'
076		7' 7	0' 7	7' 7	7' 7	1' 3	3' 5	2' 7	7' 7	0' 7	2' 8	2' 7	2' 8	8' 3	2' 8
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
.234	.070		.438"	.06'	1' 00	.073	.015	.006	.207	.261	.040	.010	-.235	.024	.140
.037	.000		.000	.323	1' 04	.563	.31'	.606	.024	0' 0"	.737	.636	.138	.854	.252
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
.137	.508	.456'	1	.123	0' 7	.000	0' 6	.000	.268	.214	.325	-1' 33	-.036	.172	.178
.146	.000	.000		.323	7' 14	.000	7' 06	1' 000	.034	.034	.070	.431	6' 7	.162	.136
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
417'	.087	.06'	.123		8' 0"	.822"	.834"	.870"	.372'	.593"	.567'	1' 30"	.134	420	336'
.001	.500	.353	.323		.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.315	.130	.001	.007
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
425'	.159	.103	.047	815'		.544"	.573"	.532"	.364'	.481"	.707'	1' 10"	.235	515	525'
.001	.277	.414	.774	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.244	.136	.000	.000
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32
430'	.173	.075	.000	822'	.844"		.836"	.853"	.543'	.486"	.563'	1' 10	.233	426	454'
.001	.173	.503	1.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.335	.038	.001	.000
32	62	62	62	62	62	62	62	32	62	32	32	32	32	62	32

Q21	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.177 .63 62	.118 .358 62	.418 .001 62	.175 .323 62	.795 .001 62	-.029 .82 62	.115 .208 62	.418 .001 62	.511 .000 62	.693 .000 62	.678 .000 62	.591 .000 62	.397 .000 62
Q22	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.192 .35 62	.176 .17 62	.435 .000 62	.137 .287 62	.526 .010 62	-.023 .86 62	.163 .226 62	.481 .000 62	.617 .010 62	.665 .000 62	.757 .000 62	.589 .000 62	.483 .010 62
Q23	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.351 .005 62	.342 .007 62	.516 .000 62	.325 .000 62	.521 .000 62	-.009 .948 62	.103 .283 62	.424 .000 62	.481 .000 62	.804 .000 62	.654 .000 62	.659 .000 62	.327 .009 62
Q24	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.265 .037 62	.167 .194 62	.329 .000 62	.265 .043 62	.409 .001 62	-.174 .176 62	-.042 .745 62	.364 .004 62	.362 .004 62	.471 .000 62	.176 .000 62	.133 .000 62	.671 .000 62
Q25	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.272 .031 62	.206 .109 62	.429 .000 62	.412 .001 62	.582 .000 62	.190 .140 62	.118 .292 62	.424 .000 62	.582 .000 62	.565 .000 62	.478 .000 62	.667 .000 62	.252 .049 62
Q26	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.053 .684 62	.023 .858 62	-.130 .172 62	-.207 .107 62	.282 .053 62	.016 .90 62	.122 .144 62	.019 .886 62	.040 .758 62	.176 .170 62	.160 .215 62	.118 .360 62	.233 .076 62
Q27	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.203 .13 62	.174 .176 62	.240 .060 62	.060 .645 62	-.006 .508 62	.095 .46 62	-.005 .785 62	.059 .852 62	.057 .858 62	.204 .112 62	-.060 .623 62	.141 .273 62	.274 .051 62
Q28	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.115 .373 62	.087 .502 62	.143 .743 62	.082 .493 62	.302 .015 62	.126 .330 62	.125 .349 62	.371 .003 62	.452 .000 62	.411 .000 62	.414 .001 62	.552 .000 62	.452 .000 62
Q29	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.235 .063 62	.171 .184 62	.321 .002 62	.317 .003 62	.789 .003 62	.075 .563 62	-.142 .748 62	.474 .000 62	.627 .000 62	.659 .000 62	.344 .003 62	.596 .000 62	.270 .119 62
Q30	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.389 .003 62	.424 .000 62	.439 .000 62	.317 .002 62	.510 .010 62	.066 .809 62	.175 .263 62	.475 .000 62	.764 .010 62	.719 .000 62	.758 .000 62	.700 .000 62	.372 .012 62

393'	121	015	049	824"	363	398	1	316	634'	456	616'	.047	215	402"	.539"
302	348	811	708	.030	.000	.030		.000	.030	.000	.000	717	363	30'	.003
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
411'	156	036	000	873"	354	360	315'	1	631'	46'	632'	.123	257	424"	413"
30'	220	836	1000	.030	.000	.030		.000	.030	.000	.000	.539	364	30'	.001
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
362'	260	267	268	672"	364	340	354'	36'	1	568	677'	.274'	212	436"	.638"
300	047	.024	034	.030	.000	.030	.000	.000		.000	.000	.031	363	300	.000
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
365'	294	26'	214	363"	490	498	455'	46'	536'	1	534'	.185	167	647"	.634"
300	020	.040	034	.031	.000	.030	.000	.000	.030		.000	.161	125	300	.000
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
493'	134	043	228	667"	702	360	316'	362	677'	504		.070	303'	334"	778"
300	236	.337	078	.030	.000	.030	.000	.000	.030	.000		.686	317	300	.000
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
260	-121	010	-132	130	150	110	.047	.123	.274'	.165	.070	1	364	236	.163
322	347	836	431	216	244	235	717	333	.031	.161	563		515	365	.123
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
124	-140	-236	-036	134	235	235	216	257	212	.167	.030	.084		376"	.534"
336	276	.109	617	130	.063	.036	.033	.064	.038	.125	.317	815		302	.004
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
563'	-017	.024	172	423"	513	426	402'	424	436'	547	734'	.233	376'		.656"
300	893	854	132	.031	.000	.031	.031	.001	.030	.000	.000	.065	302		.000
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
353'	124	148	178	353"	523	467	363'	410	636'	364	776'	.193	334'	656"	1
300	336	.252	136	.037	.000	.030	.033	.001	.030	.000	.000	.123	304	300	
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62
502'	352"	363'	26'	711"	714	700	361'	752	734'	476	711'	.163	123	436"	.634"
300	006	.033	048	.030	.000	.030	.000	.000	.030	.000	.000	.217	340	300	.000
62	32	32	32	32	62	32	32	62	32	62	62	62	62	62	62

.661"	.735"	.637"	.479"	.673"	.495	.444"	.243	.236	.371	.352	.474"	.159	.603"	.728"
.030	.000	.033	.000	.005	.000	.000	.052	.062	.003	.033	.000	.217	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.762"	.740"	.637"	.635"	.402"	.536	.629"	.257	.322	.406	.373	.402"	.135	.624"	.738"
.030	.000	.037	.000	.001	.000	.000	.044	.011	.001	.033	.001	.157	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.764"	.632"	.640"	.656"	.632"	.595	.677"	.556	.246	.556	.622	.563"	.363"	.804"	.646"
.030	.000	.037	.000	.002	.000	.000	.000	.052	.000	.030	.000	.034	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.473"	.456"	.430"	.455"	.793"	.460	.577"	.276	.266	.446	.420	.322	.147	.323	.650"
.030	.000	.030	.000	.000	.000	.005	.050	.036	.000	.031	.011	.275	.017	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.711"	.649"	.144	.630"	.639"	.782	.703"	.122	.421	.434	.420	.443"	.561"	.562"	.609"
.030	.000	.233	.000	.001	.000	.000	.345	.001	.000	.030	.000	.000	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.159	.001	.038	.146	.182	.206	.060	.223	.041	.113	.153	-.064	-.019	.148	.137
.217	.396	.435	.257	.157	.110	.346	.074	.750	.370	.213	.613	.635	.257	.126
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.123	.226	-.179	.166	.174	.280	.637"	.113	.256	.063	.041	.054	-.037	.128	.255
.640	.081	.135	.200	.176	.026	.002	.362	.046	.505	.743	.764	.613	.622	.045
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.463"	.402"	.153	.653"	.452"	.777	.637"	.163	.490	.441	.423	.222	.445"	.341"	.638"
.030	.001	.234	.000	.000	.000	.000	.213	.000	.000	.030	.062	.000	.037	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.604"	.613"	.233	.630"	.637"	.356	.625"	.354	.387	.491	.520	.363"	.424"	.563"	.733"
.030	.000	.039	.000	.000	.000	.000	.005	.002	.000	.030	.004	.000	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32
.650"	.427"	.722"	.634"	.546	.634"	.386	.411	.421	.447	.363"	.503"	.603"	.603"	.672"
.000	.037	.000	.004	.000	.000	.000	.002	.001	.001	.030	.001	.000	.000	.000
.32	.62	.32	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.62	.32	.62	.32	.32	.32

Q31	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.321 .011 62	.254 .147 62	.50" .000 62	.326 .017 62	.395" .001 62	.113 .385 62	.093 .451 62	.541" .000 62	.607" .000 62	.381 .007 62	.675" .000 62	.69" .000 62	.305 .015 62
Q32	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	-.083 .497 62	-.149 .247 62	-.020 .845 62	.051 .693 62	.223 .182 62	-.219 .087 62	-.003 .943 62	.196 .127 62	.326" .014 62	.413 .001 62	.415" .001 62	.296 .024 62	.203 .113 62
Q33	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.154 .231 62	.093 .470 62	.505 .015 62	.477 .000 62	.235 .020 62	.157 .225 62	.063 .594 62	.625" .000 62	.523" .000 62	.270 .000 62	.564" .000 62	.79" .000 62	.264 .033 62
Q34	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.133 .200 62	.062 .034 62	.254 .040 62	.161 .210 62	.168 .191 62	-.167 .190 62	-.052 .691 62	.217 .090 62	.266 .030 62	.339 .007 62	.277 .029 62	.210 .102 62	.473 .000 62
Q35	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.093 .450 62	.045 .727 62	.220 .075 62	.231 .071 62	.517" .000 62	.266 .037 62	-.032 .805 62	.545" .000 62	.473" .000 62	.533 .000 62	.537" .000 62	.696" .000 62	.324 .010 62
Q36	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.384 .002 62	.342 .007 62	.428" .001 62	.562 .000 62	.238 .023 62	.364" .004 62	.154 .232 62	.774" .000 62	.639" .000 62	.343 .000 62	.525" .000 62	.697" .000 62	.294 .020 62
Q37	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.123 .342 62	.178 .167 62	.113 .385 62	.070 .587 62	.231 .022 62	-.010 .910 62	.041 .753 62	.457" .000 62	.397" .001 62	.202 .000 62	.411" .001 62	.293 .021 62	.184 .152 62
Q38	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.187 .143 62	.137 .289 62	.047 .715 62	.311 .014 62	.271 .033 62	.373" .005 62	.281 .023 62	.632" .000 62	.608" .000 62	.365 .004 62	.435" .000 62	.646" .000 62	.163 .193 62
Q39	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.281 .020 62	.248 .052 62	.166 .195 62	.293 .021 62	.424" .001 62	.263 .040 62	.252 .042 62	.682" .000 62	.680" .000 62	.552 .000 62	.565" .000 62	.62" .000 62	.250 .050 62
Q40	Feasor Corclator Sig (2-tal ed) N	.282 .027 62	.199 .121 62	.230 .072 62	.282 .002 62	.381" .002 62	.079 .544 62	.151 .241 62	.685" .000 62	.518" .000 62	.344 .000 62	.542" .000 62	.634" .000 62	.220 .085 62

.863"		.413"	.862	.363"	.405"	.536	.127	.323	.264'	.215	.556	.436"	.576'	.776
.030		.001	.033	.033	.001	.003	.324	.011	.023	.063	.300	.300	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.421"	.413"	1	.577	.422"	.123	.115	.372	.042	.243	.254	.230	.361	.162	.380
.03'	.03'		.033	.03'	.322	.375	.003	.702	.063	.043	.372	.336	.202	.302
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.722"	.862"	.577"	1	.363"	.623"	.366	.292	.467'	.441	.502	.436	.532"	.534'	.766
.030	.030	.003		.032	.003	.003	.021	.002	.003	.003	.300	.300	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.364"	.363"	.422"	.363		.324"	.334	.301	.125	.223	.256	.112	.314	.222	.476
.034	.033	.001	.032		.003	.003	.017	.322	.073	.045	.387	.311	.062	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.543"	.405"	.123	.623	.324"	1	.766	.396	.675'	.584	.336	.246	.510"	.466'	.722
.030	.03'	.322	.033	.038		.003	.002	.002	.003	.003	.351	.300	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.604"	.523"	.115	.663	.324"	.763"	1	.487	.713'	.702	.377	.401	.478"	.526'	.796
.030	.030	.375	.033	.038	.003		.003	.002	.003	.003	.301	.300	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.363"	.127	.372"	.233'	.301'	.325"	.487	1	.367'	.576	.360	.217	.396	.356'	.476
.032	.224	.003	.021	.017	.002	.003		.001	.003	.003	.391	.446	.004	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.411"	.323	.043	.467	.125	.675"	.710	.397	1	.396	.380	.146	.549"	.142	.581
.03'	.01'	.703	.033	.233	.003	.003	.001		.003	.003	.256	.300	.242	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.421"	.264'	.243	.441	.226	.564"	.702	.576	.665'	1	.326	.442	.292	.344'	.392
.03'	.020	.063	.033	.078	.003	.003	.003	.002		.003	.300	.321	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62
.447"	.215	.264'	.503	.263'	.623"	.377	.660	.663'	.326	1	.374	.415"	.466'	.396
.030	.033	.043	.033	.045	.003	.003	.003	.002	.003		.302	.301	.002	.300
32	32	E2	32	32	E2	E2	E2	E2	E2	E2	62	62	E2	62

396	.503"	.230	.455"	1'2	246	.407"	.217	.149	443	.374"		.403"	.578"	560
.001	.000	.072	.000	387	351	301	.061	.253	.000	.003		.000	300	300
E2	32	32	32	62	62	62	E2	E2	E2	32	32	32	62	62
306	.453"	-.167	.552"	3'4	3'1	.478"	.063	.543"	.263'	.415"	.438"		.349"	3'4
007	070	F39	070	3'1	700	700	443	007	051	072	070		700	700
F2	32	32	32	62	62	62	F2	F2	F2	32	32	32	62	62
336	.573"	.133	.554"	225	465	.528"	356	.149	344	.463"	.578"	.363"		731
.000	.000	.236	.000	382	300	300	.007	.243	.003	.000	.000	.007		300
E2	32	32	32	62	62	62	E2	E2	E2	32	32	32	62	62
372	.775"	.630"	.763"	.475"	725	.735"	476	.561"	392	.655"	.630"	.514"	.737"	1
.000	.000	.032	.000	300	300	300	.000	.000	.000	.000	.000	.000	300	
C2	32	32	32	62	62	62	C2	C2	C2	32	32	32	62	62

Hasil Uji Validitas (Menggunakan SPSS v.16)

No	r hitung	r table	Ket
1	0,416	0,159	Valid
2	0,337	0,159	Valid
3	0,532	0,159	Valid
4	0,456	0,159	Valid
5	0,519	0,159	Valid
6	0,151	0,159	Tidak Valid
7	0,181	0,159	Tidak Valid
8	0,819	0,159	Valid
9	0,763	0,159	Valid
10	0,847	0,159	Valid
11	0,800	0,159	Valid
12	0,833	0,159	Valid
13	0,431	0,159	Valid
14	0,630	0,159	Valid
15	0,381	0,159	Valid
16	0,363	0,159	Valid
17	0,226	0,159	Tidak Valid
18	0,750	0,159	Valid
19	0,792	0,159	Valid
20	0,778	0,159	Valid
21	0,728	0,159	Valid

22	0,788	0,159	Valid
23	0,846	0,159	Valid
24	0,650	0,159	Valid
25	0,809	0,159	Valid
26	0,197	0,159	Tidak Valid
27	0,255	0,159	Valid
28	0,638	0,159	Valid
29	0,733	0,159	Valid
30	0,872	0,159	Valid
31	0,775	0,159	Valid
32	0,380	0,159	Valid
33	0,766	0,159	Valid
34	0,475	0,159	Valid
35	0,723	0,159	Valid
36	0,795	0,159	Valid
37	0,478	0,159	Valid
38	0,581	0,159	Valid
39	0,692	0,159	Valid
40	0,695	0,159	Valid
41	0,560	0,159	Valid
42	0,514	0,159	Valid
43	0,731	0,159	Valid

LAMPIRAN 6

Tabel Product Moment t

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

LAMPIRAN 7

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	62	1.00	4.00	2.7258	.60515
VAR00002	62	1.00	4.00	2.7742	.55573
VAR00003	62	1.00	4.00	2.2097	.70448
VAR00004	62	.00	3.00	2.1129	.81190
VAR00005	62	2.00	4.00	2.4839	.56516
VAR00006	62	1.00	3.00	1.4516	.76131
VAR00007	62	1.00	3.00	1.3710	.68314
VAR00008	62	1.00	4.00	2.0645	.82722
VAR00009	62	1.00	4.00	2.2419	.84321
VAR00010	62	1.00	4.00	2.1290	.71251
VAR00011	62	1.00	4.00	1.8387	.77234
VAR00012	62	1.00	4.00	2.0806	.68469
VAR00013	62	1.00	3.00	1.4355	.61726
VAR00014	62	1.00	4.00	1.1774	.58741
VAR00015	62	1.00	4.00	1.3065	.69161
VAR00016	62	1.00	4.00	1.3710	.70673
VAR00017	62	1.00	4.00	2.0000	.74658
VAR00018	62	1.00	4.00	1.7258	.87158
VAR00019	62	1.00	4.00	1.7258	.92629
VAR00020	62	1.00	4.00	1.6935	.93368
VAR00021	62	1.00	4.00	1.7581	.89964
VAR00022	62	1.00	4.00	1.6774	.91927
VAR00023	62	1.00	4.00	1.2581	.57075
VAR00024	62	1.00	4.00	1.1774	.61469
VAR00025	62	1.00	4.00	1.5806	.87868
VAR00026	62	1.00	4.00	2.5484	.86228
VAR00027	62	1.00	4.00	2.0000	.67751
VAR00028	62	1.00	4.00	1.6613	.76702
VAR00029	62	1.00	4.00	1.5000	.86366
VAR00030	62	1.00	4.00	1.8065	.78592
VAR00031	62	1.00	3.00	1.8226	.75800
VAR00032	62	1.00	3.00	1.6613	.54151
VAR00033	62	1.00	4.00	1.9516	.73390
VAR00034	62	1.00	3.00	1.2258	.55573
VAR00035	62	1.00	4.00	1.8710	.77848
VAR00036	62	1.00	3.00	1.9355	.69826
VAR00037	62	1.00	4.00	1.6935	.61641
VAR00038	62	1.00	3.00	1.7581	.56352
VAR00039	62	1.00	4.00	1.6935	.56070
VAR00040	62	1.00	4.00	1.7097	.58358
VAR00041	62	1.00	4.00	2.3065	.71492
VAR00042	62	1.00	4.00	2.2581	.78793
VAR00043	62	1.00	4.00	2.1935	.56796
Y	62	56.00	154.00	78.9677	18.76688
Valid N (listwise)	62				

LAMPIRAN 8

Dokumentasi



Contoh UMKM Unggulan yang cukup maju dan dikenal masyarakat sekitar



Contoh beberapa dokumentasi saat menyebarkan kuesioner penelitian



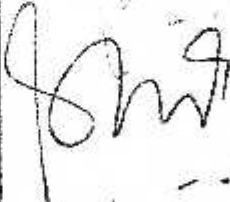





Beberapa contoh proses produksi produk UMKM Unggulan


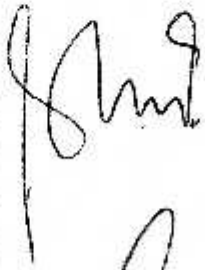
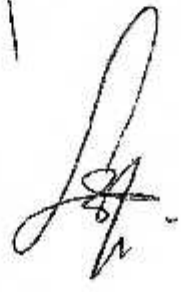

LAMPIRAN 9

Absensi Bimbingan Skripsi

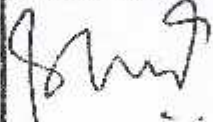
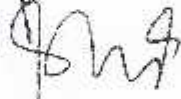

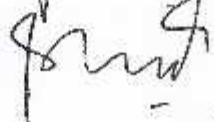
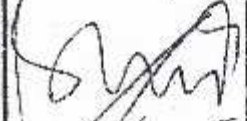
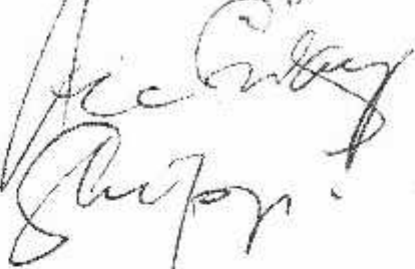

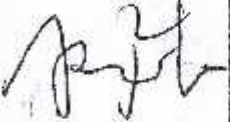
PANDUAN SKRIPSI

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
1.	Jelas, 26.03.13	proposal	
2.	Senin, 04.04.13	Revisi ?	
3.	8/6-13	Revisi BAB I, Rumit BAB 2 + 3	
4.	9/5-13	revisi teori	
5.	1/10-13	Revisi proposal	
6.	3/10-13	subodj informasi manfaat & Staf tabel produk ke bentuk, jenis faktanya saja	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
7.	9/10-13	Ace Review proposisi	
8.	10/10-13	Ace Seminar proposisi	
9.	10/3 14	Perbaiki pertanyaan seorang atau party dan jumlah	
10.	1/4 14	Ace ke lapangan dgn syarat perbaikan kuesioner.	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

No	Hari, Tgl	Uraian/Catatan Pembimbing	Paraf Dosen
11.	16/4 -14	Revisi Kuesioner	
12.	21/5 -14	Ace ke lapangan	
13.	3/7-14	Revisi BAB 4	
14.	18/7-14	Revisi kesimpulan	
15.	9/9 -14	ACE sedang Kapsi	
16.	18/9 14		
	21/10/14	Kordinasi culup. Ace	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 (tujuh) kali/total 14 (empat belas) kali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : Bayinah |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Serang, 08 April 1992 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Golongan Darah | : - |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 7. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 8. Alamat | : Kp. Majalawang, Serang-Banten |

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Majalawang
2. SMP Negeri 6 Serang
3. SMA Negeri 3 Serang
4. S1 UNTIRTA Serang

Riwayat Keluarga

1. Bapak Rahmat (Alm)
2. Ibu Sholihah